



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR : 12 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (6)
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2022;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2015-2035;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2035;

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

dan

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2017-2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

RPJMD merupakan :

- (1) Penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Dokumen perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Penetapan RPJMD dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan dalam Penyusunan rencana strategi Perangkat Daerah, rencana kerja pembangunan daerah, rencana kerja Perangkat Daerah, dan perencanaan penganggaran.
- (2) RPJMD mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat.



BAB IV  
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJMD meliputi :

- BAB I : Pendahuluan.
- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan.
- BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis
- BAB V : Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran.
- BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah.
- BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah.
- BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- BAB IX : Penutup.

BAB V

ISI DAN URAIAN RPJMD

Pasal 5

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 22 November 2017

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

  
YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat  
pada tanggal 11 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



SYAIFUL JANNAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2017  
NOMOR: 12

NOREG PERDA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI  
SUMATERA BARAT: (12/162/2017)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 12 TAHUN 2017  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI 2017-2022

I. Umum

Salah satu bentuk perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati terpilih yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional. sesuai amanat dalam Pasal 15 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah, peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik. Berdasarkan hal dimaksud perlu dibentuk peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022. RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah serta mengacu pada kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025. Selanjutnya RPJMD menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) bagi satuan kerja di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

II. Pasal Demi Pasal

- PASAL 1 :  
Cukup jelas
- PASAL 2 :  
Cukup jelas
- PASAL 3 :  
Cukup jelas
- PASAL 4 :  
Cukup jelas
- PASAL 5 :  
Cukup jelas
- PASAL 6 :  
Cukup jelas
- PASAL 7 :  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 12

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	4
1.4 Maksud dan Tujuan	7
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	12
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	20
2.3 Aspek Pelayanan Umum	34
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	65
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	72
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	83
3.3. Kerangka Pendanaan	89
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	
4.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai	99
4.2 Isu-Isu Strategis Kabupaten Kepulauan Mentawai	118
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	
5.1 Visi	132
5.2 Misi	134
5.3. Tujuan dan Sasaran	136
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	145
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	182
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	201
BAB IX PENUTUP	218

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keadaan Geografis dan Administratif Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai .....	12
Tabel 2.2	Kelerengan Tanah Di Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	13
Tabel 2.3	Nama-nama Sungai di Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	14
Tabel 2.4	Desa – Desa Rawan Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai	17
Tabel 2.5	Wilayah Abrasi Pantai Terparah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	17
Tabel 2.6	Keadaan Jumlah Penduduk, Luas Daerah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016.....	18
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016.....	19
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Menurut Usia Produktif dan Jenis Kelamin Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016.....	19
Tabel 2.9	Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Kabupaten Kepulauan Mentawai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2012-2016.....	21
Tabel 2.10	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016.....	22
Tabel 2.11	Nilai Inflasi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2011-2014.....	23
Tabel 2.12	Angka Kriminalitas Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016	27
Tabel 2.13	Indikator Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016.....	29
Tabel 2.14	Indikator Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016	31
Tabel 2.15	Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama (persen) 2012-2015.....	32
Tabel 2.16	Indikator Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016.....	33
Tabel 2.17	Perkembangan Seni, Budaya, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016	34
Tabel 2.18	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016	36
Tabel 2.19	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016.....	37
Tabel 2.20	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016.....	38

Tabel 2.21	Jumlah Peserta UN dan yang Lulus UN Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016.....	39
Tabel 2.22	Jumlah Guru dengan Kualifikasi Akademik S1/D-IV Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016.....	40
Tabel 2.23	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016.....	41
Tabel 2.24	Jumlah Layanan Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016.....	41
Tabel 2.25	Rasio Jumlah Tenaga Medis dan Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016.....	42
Tabel 2.26	Jumlah Bayi yang Diberi Imunisasi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016.....	43
Tabel 2.27	Kondisi Jalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016	43
Tabel 2.28	Kondisi Jembatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016.....	44
Tabel 2.29	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016.....	47
Tabel 2.30	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016.....	48
Tabel 2.31	Perkembangan Indikator Urusan Sosial Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016.....	48
Tabel 2.32	Perkembangan Indikator Urusan Sosial Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016.....	49
Tabel 2.33	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016.....	50
Tabel 2.34	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pangan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016.....	50
Tabel 2.35	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016.....	51
Tabel 2.36	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016.....	51
Tabel 2.37	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016.....	52
Tabel 2.38	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016.....	53

Tabel 2.39	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016.....	54
Tabel 2.40	Jumlah Pelabuhan/Dermaga dan Bandara, Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016.....	54
Tabel 2.41	Kondisi Indikator Kinerja Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016	55
Tabel 2.42	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016	55
Tabel 2.43	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016.....	56
Tabel 2.44	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016.....	56
Tabel 2.45	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016.....	57
Tabel 2.46	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016.....	58
Tabel 2.47	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016.....	58
Tabel 2.48	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016.....	59
Tabel 2.49	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kearsipan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016.....	59
Tabel 2.50	Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Padi Sawah, 2012-2016.....	60
Tabel 2.51	Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Keladi, 2012-2016	61
Tabel 2.52	Perkembangan Hasil Komoditi Pertanian Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016.....	62
Tabel 2.53	Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing, Babi dan Unggas (ekor), 2012-2016.....	62
Tabel 2.54	Jumlah Nelayan dan Produksi Ikan Laut Kabupaten kepulauan Mentawai, 2012-2016.....	63
Tabel 2.55	Jumlah Pelanggan Listrik dan Daya Tersambung, 2012-2016.....	63
Tabel 2.56	Banyaknya dan jenis Objek Wisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016.....	64
Tabel 2.57	Banyaknya Resort, Wisma, dan Penginapan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016.....	65
Tabel 2.58	Penggunaan Konsumsi Rumah Tangga dan Non Pangan per Kapita Tahun 2011-2014 Kabupaten Kepulauan Mentawai	66
Tabel 2.59	Produktivitas per Sektor di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2012-2016.....	68

Tabel 2.60	Jumlah Orang/Barang Pengguna Terminal Tahun 2012-2016 Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	69
Tabel 2.61	Persentase jumlah penginapan/ hotel Tahun 2010-2015 Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	69
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012-2016	75
Tabel 3.2	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Beserta Pertumbuhannya.....	79
Tabel 3.3	Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2011-2016.....	80
Tabel 3.4	Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011 – 2016.....	82
Tabel 3.5	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2014 – 2016.....	85
Tabel 3.6	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur.....	86
Tabel 3.7	Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2012– 2016.....	87
Tabel 3.8	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	87
Tabel 3.9	Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2012 – 2016.....	88
Tabel 3.10	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2012 – 2022.....	90
Tabel 3.11	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022.....	91
Tabel 3.12	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022.....	94
Tabel 3.13	Proyeksi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2017-2022.....	95
Tabel 3.14	Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Kepulauan Mentawai, tahun 2017 – 2022.....	96
Tabel 3.15	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022.....	96
Tabel 3.16	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2017– 2022.....	97
Tabel 5.1	Keselarasn Nawacita dengan Misi RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	135
Tabel 5.2	Keterkaitan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran.....	137
Tabel 5.3	Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	140
Tabel 6.1	Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan	145



Tabel 6.2	Sinergitas Dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai Dengan Prioritas Pembangunan Nasional Dan Provinsi Sumatera Barat	158
Tabel 6.3	Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif	160
Tabel 7.1	Integrasi Program/Kegiatan Prioritas dengan Pusat dan Provinsi Sumatera Barat beserta Sumber Pendanaannya	184
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	186
Tabel 8.1	Indikator Kinerja Utama	202
Tabel 8.2	Indikator Kinerja Daerah	206

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Keterkaitan Dokumen Perencanaan Menurut UU Nomor 25 Tahun 2004.....	5
Gambar	2.1	Peta Mitigasi Bencana.....	17
Gambar	2.2	Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, 2011-2014.....	24
Gambar	2.3	Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, 2012-2016.....	25
Gambar	2.4	Rasio Gini Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi, 2012-2016.....	26
Gambar	2.5	IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, 2012-2016.....	28
Gambar	2.6	Nilai Tukar Petani Kabupaten Kepulauan Mentawai	68
Gambar	3.1	Realisasi Pendapatan dan Pertumbuhannya	76
Gambar	3.2	Realisasi PAD dan Pertumbuhannya	77
Gambar	5.1	Visi RPJMPD, RPJMN, DAN RPJMD Provinsi Sumatera Barat	134



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan didefinisikan sebagai proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di bidang perencanaan, diamanatkan juga bahwa Pemerintahan Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan dokumen perencanaan daerah mencakup pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up).

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menyusun sebuah perencanaan lima tahunan 2017-2022 agar dalam pelaksanaannya, pembangunan di wilayah



Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama. Dokumen RPJMD 2017-2022 ini sekaligus merupakan implementasi dari tahap lima tahun 2005-2025 tahap ke III 2015-2020 dan Tahap IV 2021-2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2025.

RPJM Daerah 2017-2022 Kabupaten Kepulauan Mentawai ini disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif lima tahun yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Melalui serangkaian proses yang menyeluruh dan pelibatan masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai secara penuh, di satu sisi dapat ditegaskan bahwa dokumen RPJM Daerah 2017-2022 ini merupakan produk perencanaan daerah, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan *good will* dari semua pihak dan seluruh lapisan masyarakat.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 dilakukan berdasar pada beberapa peraturan, perundangan, antara lain seperti :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (6)
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik



- Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
  11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana



#### Kerja Pemerintah Daerah

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2022;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011-2016;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2015-2035;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu sasaran SPPN 2004 adalah untuk meningkatkan keterpaduan dan sinergitas perencanaan antara pusat dan daerah serta antar daerah terkait. Hal ini sangat penting artinya dalam rangka mewujudkan kesatuan arah dan efisiensi proses pembangunan secara nasional sehingga sasaran yang dituju akan dapat diwujudkan secara lebih cepat dan tepat. Aspek ini menjadi lebih penting dalam era desentralisasi dewasa ini, dimana daerah diberikan kewenangan yang lebih luas sehingga dapat menentukan sendiri arah, strategi, dan kebijakan pembangunan.

Di dalam SPPN 2004, upaya untuk meningkatkan keterpaduan dan sinergitas pembangunan nasional tersebut dilakukan dengan meningkatkan keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Bahkan keterkaitan ini tidak hanya antar dokumen perencanaan, tetapi sampai dokumen anggaran :





Hubungan dan keselarasan antar RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai ini, dijelaskan sebagai berikut :

1. RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017 – 2022 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017 – 2022 berpedoman pada RPJPN 2005–2025 dan RPJMN Tahun 2015–2019 dengan memperhatikan keselarasan isu strategis, sasaran dan indikator pembangunan nasional, prioritas nasional serta program prioritas nasional.
3. RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017 – 2022 berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 terlihat dari keselarasan visi, misi dan program prioritas serta indikator-indikator kinerja.
4. RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017–2022 telah dipedomani, dan diakomodir serta telah mengintegrasikan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat (Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012) dan mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008) serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015)
5. RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017 – 2022 berpedoman pada RPJPD 2005–2025 Kabupaten Kepulauan Mentawai tahap III dan IV dengan arah kebijakan pembangunan untuk mendorong investasi dan pengembangan ekonomi maritim
6. RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017 – 2022 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Yang





merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran teknis operasional dari RPJMD ke dalam arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan, bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

7. RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017–2022 juga memperhatikan Dokumen kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kepulauan Mentawai.

#### **1.4. Maksud Dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan RPJMD adalah membuat perangkat pedoman kerja pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun yang dipakai sebagai pedoman membangun daerah, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat pada umumnya untuk periode pembangunan tahun 2017-2021.

Adapun penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai ini bertujuan untuk:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar lebih terarah, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Sebagai pedoman perencanaan jangka menengah Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD).
3. Sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.
4. Sebagai pedoman pengendalian pembangunan daerah
5. Sebagai dasar penyusunan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Bab I menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJMD, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab pendahuluan ini setidaknya memuat: 1) Latar Belakang. Pada Sub bab ini



menjelaskan pengertian ringkas tentang RPJMD, proses penyusunan RPJMD, kedudukan RPJMD tahun rencana dalam RPJPD, keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPd dan Renstra SKPD; 2) Dasar Hukum Penyusunan. Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Apabila di daerah telah diterbitkan peraturan daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan. Pada sub-bab ini tidak perlu semua peraturan-perundangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan-perundangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RPJMD; 3) Hubungan Antar Dokumen. Sub bab ini menjelaskan hubungan RPJMD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterkaitan dengan dokumen lain, seperti: RPJMN, RPJMD Provinsi, RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW kab/kota; 4) Sistematika Penulisan. Sub bab ini menjelaskan organisasi penyusunan dokumen RPJMD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya; dan 5) Maksud dan Tujuan. Sub bab ini memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah yang bersangkutan.

## **Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Bab II ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bab ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan yang meliputi; 1) Aspek kesejahteraan masyarakat, 2) aspek pelayanan umum, dan 3) dan aspek daya saing daerah.

## **Bab III Gambaran Keuangan Daerah**

Bab III ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan. Pembahasan bab ini setidaknya memuat; 1) Kinerja Keuangan Masa Lalu. Pada bab ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, dijelaskan gambaran kinerja

keuangan daerah yang mencakup; 2) Kinerja Pelaksanaan APBD. Sub bab ini menguraikan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah; dan 3) Neraca Daerah. Sub bab ini menguraikan sekurang-kurangnya mengenai perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas.

#### **Bab IV Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Daerah**

Bab IV ini mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan Bab IV ini adalah mengidentifikasi isu-isu strategis bagi pembangunan daerah. Identifikasi isu strategis tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari OPD. Bab ini setidaknya memuat dua hal: 1) Permasalahan Pembangunan, 2) Isu Strategis

#### **Bab V Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran**

Bab V ini memuat penerjemahan visi-misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Visi-misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Kekhawatiran bahwa kepemimpinan yang berbeda dapat menghasilkan visi dan misi yang berbeda akan dikupas secara tuntas di dalam bab ini, sehingga menjadi landasan penyusunan dokumen RPJMD yang dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

## **Bab VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah**

Bab VI ini menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan, yakni rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan *strategic* tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi

## **Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah.**

Bab ini menguraikan Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Uraian bab ini bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui kebijakan umum diperoleh uraian strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya

## **Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.**

Bab VIII ini memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau

kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

## **Bab IX Penutup.**

Bab IX ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Dalam Bab IX ini juga dinyatakan bahwa RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya.

Sementara itu terkait dengan kaidah pelaksanaan juga ditegaskan bahwa OPD, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya; OPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja OPD setiap tahun, OPD juga berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra OPD.

**BAB II****GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH****2.1 Aspek Geografis dan Demografi****2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan posisi geografis yang terletak antara 0°55'00"-3°21'00" Lintang Selatan dan 98°35'00"-100°32'00" Bujur Timur dengan luas wilayah 6.011,35 km<sup>2</sup> dan garis pantai sepanjang 1.402,66 km. Secara geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai berbatasan dengan:

- sebelah utara berbatasan dengan Selat Siberut,
- sebelah timur berbatasan dengan Selat Mentawai,
- sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia,
- sedangkan sebelah barat juga berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri atas gugusan pulau-pulau yang berjumlah sebanyak 99 buah. Secara administratif Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari 10 Kecamatan, 43 Desa dan 341 buah Dusun.

**Tabel 2.1****Keadaan Geografis dan Administratif Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai**

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Lintang Selatan	Bujur Timur
1	Pagai Selatan	Bulasat	901,08	2°49'04"-3°21'00"	100°07'01"-100°32'00"
2	Sikakap	Taikako	278,45	2°37'12"-3°55'04"	100°00'00"-100°16'12"
3	Pagai Utara	Saumanganya	342,02	2°30'00"-2°51'36"	99°57'00"-100°09'36"
4	Sipora Selatan	Sioban	268,47	2°06'00"-2°24'36"	99°36'00"-99°52'12"
5	Sipora Utara	Sido Makmur	383,08	1°57'00"-2°18'00"	98°30'00"-99°42'00"
6	Siberut Selatan	Muara Siberut	508,33	1°19'48"-1°42'00"	98°48'00"-99°18'00"
7	Siberut Barat Daya	Pei-Pei	649,08	1°27'36"-1°57'00"	98°45'00"-99°19'48"
8	Siberut Tengah	Saibi Samukop	739,87	1°15'00"-1°33'00"	98°54'00"-99°12'00"
9	Siberut Utara	Muara Sikabalan	816,11	0°54'00"-1°27'00"	98°40'48"-99°06'00"
10	Siberut Barat	Betaet	1.124,86	0°55'00"-1°34'12"	98°35'00"-98°59'24"

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2016

Kondisi **Topografi** Kabupaten Kepulauan Mentawai bervariasi antara dataran, sungai dan berbukit-bukit, dengan rata-rata ketinggian daerah seluruh ibukota



kecamatan 2 meter dari permukaan laut (dpl). Kabupaten Kepulauan Mentawai beribukota di Tuapejat yang terletak di Kecamatan Sipora Utara dengan jarak tempuh ke Kota Padang sepanjang 95,1 mil. Untuk mencapai ibukota Provinsi Sumatera Barat ini harus ditempuh melalui jalan laut dan melalui transportasi udara. Keadaan topografi Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan kelereangan dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 2.2**  
**Kelereangan Tanah Di Kabupaten Kepulauan Mentawai**

No	Kelas Lereng	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1.	0 % – 8 %	237.756	39,55
2.	8 % – 14 %	185.921	30,93
3.	15 % – 25 %	158.726	26,40
4.	25 % – 40 %	18.362	3,05
5.	> 40 %	370	0,05
Kab. Kep. Mentawai		601.135	100

Sumber : Intepretasi Data Peta Topografi JAN TOP-AD , diolah Tahun 2011

Ditinjau dari segi **Geologi**, Pulau Sipora dan Pulau Siberut mempunyai batu lempungan dengan di beberapa tempat ada sisipan batu beku. Dari umur geologi dapat diindikasikan sebagai wilayah yang masih muda. Untuk Pulau Siberut memiliki laju sedimentasi yang tinggi sehingga pulau ini juga merupakan pulau sedimentasi, yang dipenuhi oleh lumpur, tanah liat bercampur kapur yang masih relatif muda.

Sebagai pulau sedimen muda, jenis dan karakter tanah di Mentawai, terutama di pulau Siberut adalah jenis tanah aluvial yang tidak subur. Tanah di Siberut tergolong muda dengan kondisi tanah yang lunak dan tidak mengandung bebatuan yang besar. Hal ini karena memiliki litologi yang didominasi oleh sifat lempungan dan pola sesar yang berkembang secara intensif. Keadaan di Pulau Sipora hampir serupa, tanah berupa tanah liat yang berwarna keputihan.

Kondisi **Hidrologi** Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki 18 sungai yang tersebar di keempat pulau. Pulau Siberut misalnya mengalir Sungai Saibi dan Sungai Sikabaluhan sementara di Pagai Selatan terdapat Sungai Makalo. Curah hujan yang tinggi menjamin ketersediaan air yang cukup sepanjang tahun. Berikut ini daftar nama-nama sungai yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tabel 2.3 berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**Nama – nama Sungai di Kabupaten Kepulauan Mentawai**

No	Nama Sungai	Daerah Yang Dilalui	Panjang (Km)
1	Sungai Talopulai	Pagai Selatan	1
2	Sungai Makalo	Pagai Selatan	5
3	Sungai Silabu	Pagai Utara	8
4	Sungai Saumanganya	Pagai Utara	1
5	Sungai Taikako	Sikakap	1
6	Sungai Matobe	Sikakap	1
7	Sungai Saureinuk	Sipora Selatan	2
8	Sungai Pogari	Sipora Utara	1
9	Sungai Berimanua	Sipora Utara	1
10	Sungai Betumonga	Sipora Utara	1
11	Sungai Sagulubbek	Siberut Barat Daya	1
12	Sungai Taileleu	Siberut Barat Daya	1
13	Sungai Saibi	Siberut Tengah	1
14	Sungai Siberut	Siberut Selatan	2
15	Sungai Sikabaluan	Siberut Utara	3
16	Sungai Simalegi	Siberut Barat	4
17	Sungai Simatalu	Siberut Barat	2
18	Sungai Berisigep	Siberut Barat	3

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2016

Seperti dikemukakan bahwa sungai-sungai ini membawa padatan terlarut akibat erosi karena tanah yang nonresisten serta adanya kerusakan hutan di bagian hulu. Selain itu, sungai-sungai ini amat berperan penting bagi pertumbuhan vegetasi rawa seperti *Terminalia phellocarpa*. Pulau Siberut merupakan salah satu pulau di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki litologi yang didominasi oleh sifat lempungan dan pola sesar yang berkembang secara intensif. Keadaan ini akan mempengaruhi ketersediaan air tanah maupun air permukaan. Air tanah yang ada dapat mengalami pengkayaan oleh unsur seperti Fe (besi).

Sesar-sesar yang ada memungkinkan terjadinya sejumlah mata air yang berasal dari aliran air tanah dangkal. Keberadaan air tanah ini sangat dipengaruhi oleh luasnya daerah tangkapan air dan tutupan lahan.

Secara **klimatologi** Kepulauan Mentawai yang dikelilingi oleh Samudera Indonesia dan terletak di daerah khatulistiwa mempunyai iklim dengan udara yang panas dan lembab dengan curah hujan yang tinggi. Berdasarkan pola iklim yang ada di Indonesia, iklim Kabupaten Kepulauan Mentawai dipengaruhi oleh fenomena



*global dipole mode* yang menghasilkan sirkulasi musim Mansoon dan konvergensi inter tropis (PMK-BMG, 2008). Sirkulasi angin bergerak ke arah Barat Laut-Tenggara menghasilkan musim penghujan (November – Maret). Sirkulasi angin Tenggara – Barat akan menghasilkan musim kemarau yang berlangsung mulai bulan Mei – Oktober.

Kondisi iklim mempengaruhi temperatur suhu permukaan laut yang menyebabkan perairan Kepulauan Mentawai banyak didiami ikan-ikan pelagis besar. Dari segi transportasi, cuaca di Kepulauan Mentawai bisa menjadi tidak bersahabat jika timbul angin dengan kecepatan besar yang menimbulkan tinggi gelombang > 2 meter pada bulan Agustus - Januari. Kondisi ini menyulitkan mobilitas transportasi laut, karena ketika kondisi gelombang tinggi, akses transportasi untuk ke Kepulauan Mentawai menjadi terhambat.

Curah hujan di Kepulauan Mentawai berkisar antara 2.500 – 4.700 mm/tahun dengan jumlah hari hujan antara 132 – 267 hari hujan per tahun, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.4. Sedangkan suhu berkisar antara 22<sup>o</sup>-32<sup>o</sup>C dengan kelembaban antara 82 - 85%. Curah hujan yang tinggi pada tanah non resisten akan berakibat pada banyaknya tanah yang terbawa oleh sungai dan ditimbun atau diendapkan pada dataran di daerah pantai timur dan pantai barat daya.

Badai menjadi salah satu kendala utama transportasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mengandalkan transportasi laut. Musim badai biasanya mencapai puncaknya bulan Agustus sampai September. Pada saat musim badai biasanya angkutan penyeberangan melayani penumpang dengan mempertimbangkan keadaan alam, bila tidak memungkinkan kapal tidak akan melayani rute pelayaran, sehingga arus mobilitas barang, jasa dan manusia menjadi terhambat.

### **2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah**

Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari pulau-pulau dengan potensi yang berbeda beda sebagai berikut :

#### **1. Pulau Siberut**

- a. Pengembangan Pusat-pusat Pelayanan Kegiatan baru
- b. Pengembangan dan Pembangunan Jalan Baru pada setiap Pulau
- c. Pengembangan Bandar Udara
- d. Pengembangan Pelabuhan Laut



- e. Pengembangan Kawasan Wisata
- f. Pembangunan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian / perikanan / peternakan
- g. Pembangunan prasarana dan sarana serta jaringan jalan dalam kawasan Taman Nasional

## **2. Pulau Sipora**

- a. Pembangunan Kawasan Huntap dan Lahan Usaha
- b. Pengembangan Pusat-pusat Pelayanan Kegiatan baru
- c. Pengembangan dan Pembangunan Jalan Baru pada setiap Pulau
- d. Pengembangan Bandar Udara
- e. Pengembangan Pelabuhan Laut
- f. Pengembangan Kawasan Wisata
- g. Pembangunan kegiatan industri

## **3. Pagai Utara**

- a. Pengembangan Pusat-pusat Pelayanan Kegiatan baru
- b. Pengembangan dan Pembangunan Jalan Baru pada setiap Pulau
- c. Pengembangan Bandar Udara
- d. Pengembangan Pelabuhan Laut
- e. Pengembangan Kawasan Wisata
- f. Pembangunan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian / perikanan / peternakan
- g. Pembangunan prasarana dan sarana serta jaringan jalan dalam kawasan Taman Nasional

## **4. Pagai Selatan**

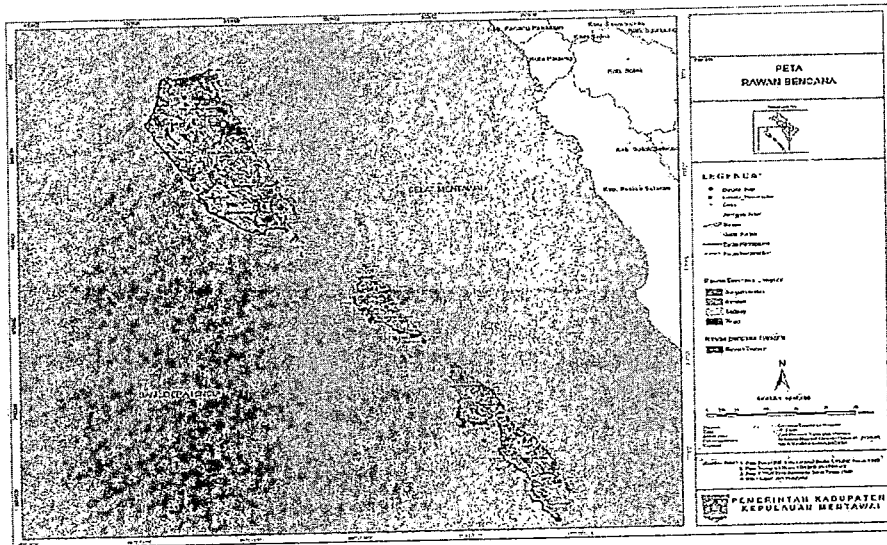
- a. Pembangunan Kawasan Huntap dan Lahan Usaha
- b. Pengembangan Pusat-pusat Pelayanan Kegiatan baru
- c. Pengembangan dan Pembangunan Jalan Baru pada setiap Pulau
- d. Pengembangan Pelabuhan Laut
- e. Pengembangan Kawasan Wisata
- f. Pengembangan kawasan pertanian dan peternakan

### **2.1.3 Daerah Rawan Bencana**

Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terletak di pertemuan lempeng Indo-

Australia dan Euro Asia di Samudera Hindia, yang membuat Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi daerah rawan bencana, gempa, longsor maupun banjir.

**Gambar 2.1**  
**Peta Mitigasi Bencana**



**Tabel 2.4**  
**Desa – Desa Rawan Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai**

NO	Jenis	Jumlah Desa
1	Gempa bumi	43 desa
2	Tanah longsor	13 desa
3	Banjir	26 desa
4	Desa di kawasan lindung	10 desa

Sumber : BPBD kabupaten Kepulauan Mentawai

**Tabel 2.5**  
**Wilayah Abrasi Pantai Terparah di Kabupaten Kepulauan Mentawai**

No	Kecamatan	Lokasi	Keterangan
1	Siberut Utara	Pantai Muara Sikabaluan	Abrasi sudah mengarah kei pemukiman
2	Siberut Selatan	Pantai Muara Siberut	Abrasi sudah mengarah kei pemukiman
3	Sipora Utara	Pantai Mapadegat	Abrasi sudah mengarah ke akses jalan
		Pantai Tuapejat	Abrasi sudah mengarah ke akses Jalan
4	Sipora Selatan	Pantai Sioban	Abrasi sudah mengarah ke akses jalan
		Pantai Beriulou	Abrasi sudah mengarah Pemukiman
		Pantai desa Bosua	Abrasi mengarah ke akses jalan



No	Kecamatan	Lokasi	Keterangan
		Pantai Bandara Rokot Matobek	Abrasi mengarah ke lokasi Bandara
5	Sikakap	Pantai depan SMA I Sikakap	Abrasi mengarah ke halaman sekolah

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Mentawai

Berdasarkan data-data diatas dapat disimpulkan hampir semua desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah yang rawan bencana. Oleh sebab itu kegiatan pencegahan dan program penyiapan menghadapi bencana perlu mendapat perhatian oleh Pemerintah Daerah.

#### 2.1.4 Demografi

Sementara itu kondisi demografi Kabupaten Kepulauan Mentawai secara umum dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kebijakan pemerintah dalam upaya menjaga laju pertumbuhan penduduk berorientasi pada penurunan tingkat kelahiran dan kematian serta meningkatkan mobilitas penduduk.

Jumlah penduduk per kecamatan, luas daerah dan kepadatan penduduk disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.6**  
**Keadaan Jumlah Penduduk, Luas Daerah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016**

No	Kecamatan	Luas Daerah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah	Kepadatan Penduduk (orang/km <sup>2</sup> )
			Laki-Laki	Perempuan		
1	Pagai Selatan	901,08	5.539	4.949	10.488	11,64
2	Sikakap	278,45	5.492	5.027	10.519	37,78
3	Pagai Utara	342,02	3.259	3.006	6.265	18,32
4	Sipora Selatan	268,47	5.365	5.040	10.405	38,76
5	Sipora Utara	383,08	5.756	5.292	11.048	28,84
6	Siberut Selatan	508,33	5.243	4.937	10.180	20,03
7	Siberut Barat Daya	649,08	3.799	3.485	7.284	11,22
8	Siberut Tengah	739,87	3.863	3.552	7.415	10,02
9	Siberut Utara	816,11	4.599	4.285	8.884	10,89
10	Siberut Barat	1.124,86	4.185	3.818	8.003	7,11
TOTAL		6.011,35	47.100	43.391	90.491	15.05

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2016 tercatat sebanyak 90.491 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 47.100 jiwa dan

penduduk perempuan sebanyak 43.391 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2016 rata-rata 15 orang per km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Sipora Selatan yang hampir mencapai 39 orang per km<sup>2</sup>, sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Siberut Barat dengan 7 orang per km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.7**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**  
**Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016**

Kelompok Umur (tahun)	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
0-04	2.677	2.425	5.102
05-09	5.117	4.829	9.946
10-14	5.682	5.304	10.986
15-19	5.191	4.853	10.044
20-24	4.347	4.171	8.518
25-29	3.977	3.909	7.886
30-34	4.150	3.692	7.842
35-39	3.454	3.091	6.545
40-44	3.039	2.772	5.811
45-49	2.581	2.268	4.849
50-54	2.125	1.758	3.883
55-59	1.667	1.598	3.265
60-64	1.215	981	2.196
65-69	755	731	1.045
70-74	557	488	1.045
+75	566	521	1.087

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.6 dan 2.7 menunjukkan kelompok usia produktif dalam 5-10 tahun kedepan akan mengalami surplus (bonus demografi), sehingga tingkat ketergantungan setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif semakin kecil. Hal ini merupakan modal penting dalam ketersediaan sumber daya manusia produktif dalam keberlanjutan proses pembangunan.

**Tabel 2.8**  
**Jumlah Penduduk Menurut Usia Produktif dan Jenis Kelamin**  
**Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016**

Kelompok Umur.	Jenis Kelamin (jiwa)		Total (jiwa)
	Laki-Laki	Perempuan	
0 -19 tahun	18.667	17.411	36.078
20 - 64 tahun	26.555	24.240	50.795
65 + tahun	1.878	1.740	3.618
Jumlah	47.100	43.391	90.491

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Analisa kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilakukan melalui beberapa indikator-indikator antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, pendapatan per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan Williamson (indeks ketimpangan regional), persentase penduduk di atas garis kemiskinan, angka partisipasi sekolah, angka kematian ibu dan anak, dan pelbagai indikator kesejahteraan masyarakat lainnya. Seluruh aktivitas pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai secara umum ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan paradigma pembangunan itu sendiri.

### 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pada hakekatnya tujuan penyelenggaraan pemerintahan sebesar-besarnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita dan indeks gini serta rasio penduduk miskin. Kinerja indikator-indikator tersebut sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

#### a. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah dapat digambarkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu. Angka pertumbuhan ekonomi mengindikasikan seberapa besar kemampuan suatu daerah secara riil dalam memproduksi karena hanya dipengaruhi oleh perubahan *output* tanpa dipengaruhi besarnya perubahan harga.

Tabel 2.9 menunjukkan terjadinya peningkatan ekonomi masyarakat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat peningkatan jumlah PDRB Kabupaten Kepulauan

Mentawai dalam kurun waktu 2012-2016. Begitu juga laju pertumbuhan ekonomi setiap tahun mengalami peningkatan. Namun, di tahun 2015 sampai 2016 terjadi perlambatan laju pertumbuhan yaitu pada angka 5,19 sedangkan di tahun 2015 melambat menjadi 5,01 pada angka 2016. Ini tidak terlepas dari gejolak ekonomi global yang berdampak pada ekonomi nasional hingga ke daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai atas dasar harga konstan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.9**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Kabupaten Kepulauan**  
**Mentawai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2012-2016**

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian	4,1	5,03	3,44	4,36	4,41
2	Pertambangan dan Penggalian	3,29	6,88	4,10	3,91	5,32
3	Industri Pengolahan	7,23	6,68	5,42	3,24	5,83
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,94	7,02	17,58	4,66	10,2
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,68	8,7	9	5,37	6,98
6	Konstruksi	8,83	9,77	9,45	9,20	6,76
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,07	7,26	8,74	4,53	6,04
8	Transportasi dan Pergudangan	6,34	4,9	9,56	5,21	2,72
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,72	4,29	8,67	7,27	12,6
10	Informasi dan Komunikasi	10,69	9,25	7,85	8,77	9,15
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,03	7,52	7,20	4,23	6,83
12	Real Estate	4,25	4,37	7,93	5,41	5,03
13	Jasa Perusahaan	8,71	9,88	10,13	7,50	5,38
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,98	2,38	2,87	5,80	4,72
15	Jasa Pendidikan	10,12	9,34	5,84	7,72	8,27
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,17	8,03	8,54	6,36	4,58
18	Jasa Lainnya	8,92	3,49	7,49	5,72	12,3
<b>JUMLAH</b>		<b>5,38</b>	<b>5,77</b>	<b>5,57</b>	<b>5,19</b>	<b>5,01</b>

Sumber : PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai 2012-2016

Struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Provinsi Sumatera Barat masih didominasi oleh sektor pertanian, ini disebabkan oleh mayoritas masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Provinsi Sumatera Barat umumnya masih



mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencarian dalam mendukung dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Selain sektor pertanian, sektor jasa lainnya juga memiliki potensi untuk berkembang di tahun mendatang. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan sektor jasa lainnya yang mengalami pertumbuhan paling besar pada tahun 2016 yaitu naik sebesar 12,3%.

Tabel 2.10 menunjukkan bahwa sektor pertanian selama kurun waktu 2012 hingga 2016 memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian masyarakat di Kepulauan Mentawai akan tetapi terus mengalami penurunan. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB berdasarkan harga konstan untuk setiap lapangan usaha tahun 2012 hingga tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.10**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010**  
**Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016**

NO	Lapangan Usaha	Tahun (Juta Rupiah)									
		2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
1	Pertanian	1.074.513,7	50,82	1.128.611,2	50,47	1.167.404,01	49,39	1.218.327,13	49,05	1.272.047,21	48,78
2	Pertambangan dan Penggalian	36.719,0	1,74	39.246,6	1,75	40.856,74	1,73	42.454,65	1,71	44.676,02	1,71
3	Industri Pengolahan	75.526,4	3,57	80.571,1	3,60	84.938,64	3,60	87.690,38	3,53	92.801,64	3,56
4	Pengadaan Listrik dan Gas	434,6	0,02	465,1	0,02	546,88	0,02	572,38	0,02	630,78	0,02
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	70,1	0,003	76,2	0,003	83,05	0,004	87,51	0,004	93,63	0,004
6	Konstruksi	222.543,2	10,53	244.278,3	10,92	267.362,63	11,34	291.960,00	11,74	311.704,93	11,95
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	253.729,7	12,00	272.145,1	12,17	295.931,46	12,54	309.335,10	12,46	328.012,24	12,58
8	Transportasi dan Pergudangan	201.239,2	9,52	211.100,8	9,44	231.792,40	9,83	243.348,68	9,83	249.959,04	9,59
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12.612,2	0,60	13.152,8	0,59	14.293,76	0,61	15.332,44	0,62	17.264,61	0,66
10	Informasi dan Komunikasi	19.152,3	0,91	20.923,3	0,94	22.565,00	0,96	24.543,10	0,99	26.788,34	1,03
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.597,9	0,12	2.793,3	0,12	2.994,49	0,13	3.121,23	0,13	3.334,55	0,13
12	Real Estate	19.670,2	0,93	20.529,4	0,92	22.156,50	0,94	23.354,15	0,94	24.527,77	0,94
13	Jasa Perusahaan	918,3	0,04	1.009,0	0,05	1.111,24	0,05	1.194,62	0,05	1.258,90	0,05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	148.868,5	7,04	152.415,1	6,82	156.792,89	6,64	165.892,84	6,67	173.731,21	6,66
15	Jasa Pendidikan	18.877,4	0,89	20.639,8	0,92	21.845,65	0,93	23.531,56	0,95	25.478,39	0,98
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11.732,6	0,55	12.674,7	0,57	13.757,08	0,58	14.632,60	0,59	15.302,69	0,59
17	Jasa Lainnya	15.114,0	0,71	15.641,8	0,70	16.813,39	0,71	17.775,73	0,72	19.962,86	0,77
JUMLAH		2.114.319,3		2.236.273,6		2.361.245,81		2.483.154,10		2.607.574,80	

Sumber: PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai 2012-2016



**b. Inflasi**

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Keadaan tingginya inflasi memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Stabilitas perekonomian daerah dapat tercermin dari tingkat inflasi suatu daerah. Secara umum, keadaan inflasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih baik, karena nilai inflasi kurun waktu 2011-2014 masih dalam kategori inflasi rendah (<10 persen).

**Tabel 2.11**  
**Nilai Inflasi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2011-2014**

Uraian	2011	2012	2013	2014
Inflasi	6,62	4,90	5,92	7,18

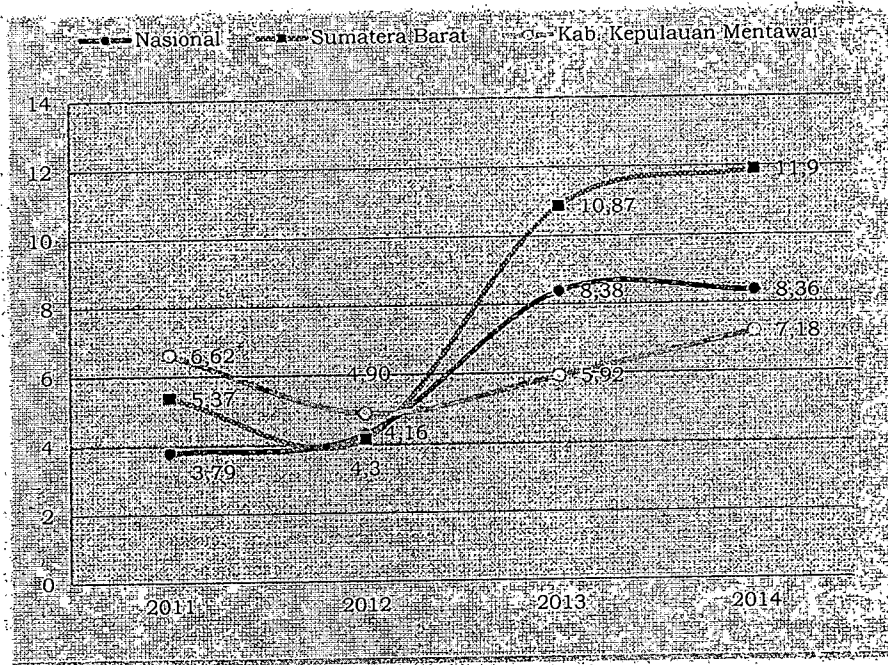
Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai (diolah)

Inflasi dapat disebabkan baik dari sisi permintaan (*demand side*) di mana terjadi peningkatan total agregat permintaan maupun dari sisi suplai (*supply side*) yang biasanya diakibatkan oleh kelangkaan barang atau kenaikan biaya produksi.

Keadaan inflasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2011 hingga tahun 2014 mengalami fluktuasi, yaitu dari 6,62 pada tahun 2011 turun menjadi 4,90 di tahun 2012, walaupun sedikit ada kenaikan di tahun 2012 dengan tingkat inflasi sebesar 5,92. Adanya gejolak harga di penghujung tahun 2014, terkhususnya kenaikan harga BBM memberikan dampak pada kenaikan laju inflasi Kepulauan Mentawai tahun 2014 pada posisi 7,18 persen. Namun, keadaan ini harus diperbaiki agar tingkat inflasi tidak melebihi 10 persen karena akan mengakibatkan terjadinya akselerasi kenaikan harga secara umum yang akan mengganggu stabilitas ekonomi baik nasional maupun di daerah.

Gambar 2.2 dapat dilihat bahwa pola inflasi tahunan Kabupaten Kepulauan Mentawai selama tahun 2011-2014 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pola inflasi Kepulauan Mentawai dapat dipertahankan lebih rendah dari inflasi provinsi dan nasional sejak tahun 2014.

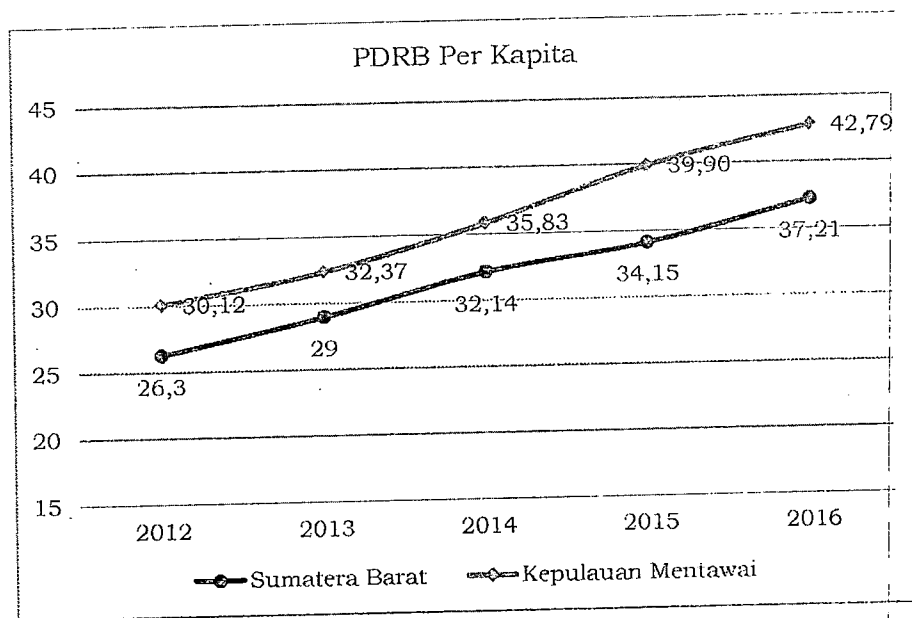
**Gambar 2.2**  
**Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Kepulauan Mentawai**  
**Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, 2011-2014**



### c. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDRB per kapita. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah. Pendapatan per kapita juga dapat menjadi indikator penting dalam pengambilan keputusan investasi daerah. Pendapatan per kapita yang tinggi mengindikasikan tingginya daya beli masyarakat. Gambar 2.2 menunjukkan bahwa perkembangan pendapatan per kapita masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih berada di atas pendapatan pendapatan per kapita Provinsi Sumatera Barat.

**Gambar 2.3**  
**Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Kepulauan Mentawai**  
**Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, 2012-2016**



Sumber: BPS Kepulauan Mentawai

Kendati demikian, kurun waktu 2012-2016 terjadi *trend* positif kenaikan pendapatan per kapita masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

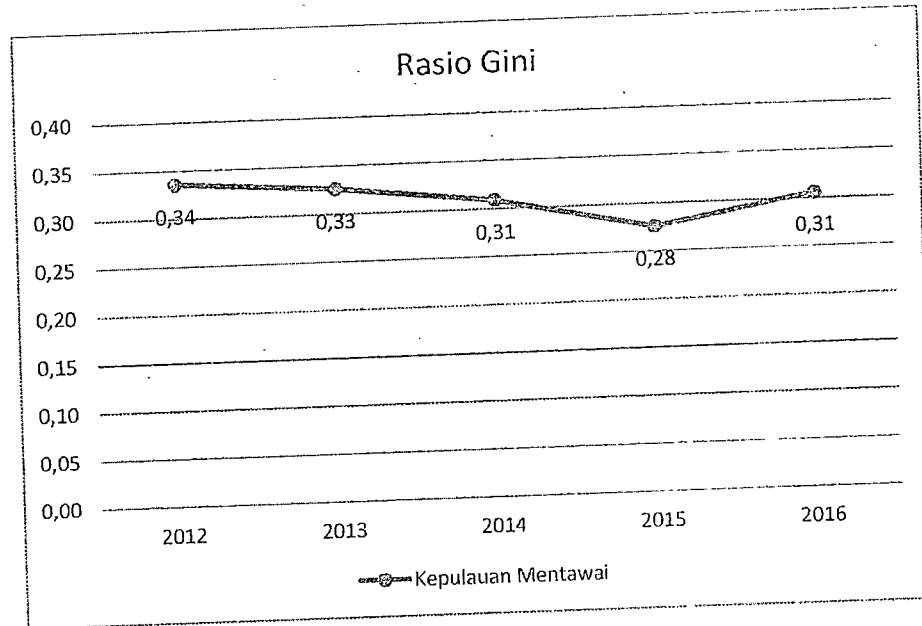
#### d. Rasio Gini

Perkembangan pendapatan per kapita secara kurun waktu mengalami peningkatan harus diikuti dengan peningkatan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Pemerataan pendapatan (*redistribusi pendapatan/distribution of income*) merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah agar pendapatan masyarakat terbagi merata mungkin di antara warga masyarakat. Pengertian merata di sini tidak berarti bahwa semua warga masyarakat pendapatannya dibuat sama, tetapi masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendapatan. Tujuannya adalah agar tidak terjadi ketimpangan pendapatan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan keresahan dan kecemburuan ataupun konflik sosial yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas daerah.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan adalah menggunakan rasio gini. Rasio Gini bernilai antara 0 dan 1. Nilai 1 menunjukkan *complete inequality* atau *perfectly inequal*, dimana seluruh penduduk

menempati satu lokasi di suatu negara dan tidak ada penduduk di lokasi lainnya. Nilai 0 menunjukkan *perfectly equal*, yaitu penduduk terdistribusikan sempurna di seluruh wilayah suatu negara. Jadi, semakin besar nilai rasio konsentrasi Gini, semakin besar ketidakmerataan antara distribusi penduduk dan jumlah lokasi.

**Gambar 2.4**  
**Rasio Gini Kabupaten Kepulauan Mentawai 2012-2016**



Sumber: BPS Kepulauan Mentawai

Pemerataan distribusi pendapatan Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2012-2016 berada dikisaran angka 0,28-0,34. Perkembangan indeks Gini Kepulauan Mentawai selama kurun waktu tersebut menunjukkan tren penurunan dan perbaikan. Hal ini berarti adanya potensi perbaikan distribusi pendapatan masyarakat yang semakin merata di Kepulauan Mentawai.

#### e. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas diartikan sebagai rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya rata-rata tindak kriminal yang terjadi untuk pelbagai kategori kejahatan seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, narkoba dan pelbagai jenis kejahatan lainnya. Indikator ini dapat menggambarkan kondisi dan tingkat keamanan daerah, semakin rendah angka kriminalitas di suatu daerah menunjukkan semakin tinggi tingkat keamanan di suatu daerah.

**Tabel 2.12**  
**Angka Kriminalitas Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016**

No	Jenis Kriminal	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah kasus Narkoba	-	1	2	-	2
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	1	-	-	1	-
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	1	5	7	5	5
5.	Jumlah kasus Pencurian	7	15	9	28	21
6.	Jumlah kasus Penipuan	1	4	6	2	3
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	-
8.	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	10	25	24	36	31
9.	Jumlah Penduduk	76.173	78.215	79.976	81.840	88.846
10.	Angka Kriminalitas (8)/(9)	3,28	3,06	4,5	3,66	3,76

Sumber: Polres Kabupaten Kepulauan Mentawai

### 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan pendapatan per kapita merupakan suatu kemajuan, Seyogyanya keberhasilan ini mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat ke tempat yang lebih baik dan manusiawi secara keseluruhan. Pembangunan yang dinilai dari peningkatan pertumbuhan ekonomi ternyata belum membangun manusianya. Ini berarti pembangunan harus difokuskan pada manusia sebagai titik sentralnya, sehingga akan tercipta kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Analisa kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator-indikator pembangunan manusia seperti: angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah, angka pendidikan yang ditamatkan, angka kelangsungan hidup bayi, angka harapan hidup, rasio guru dan murid dan pelbagai indikator lainnya.

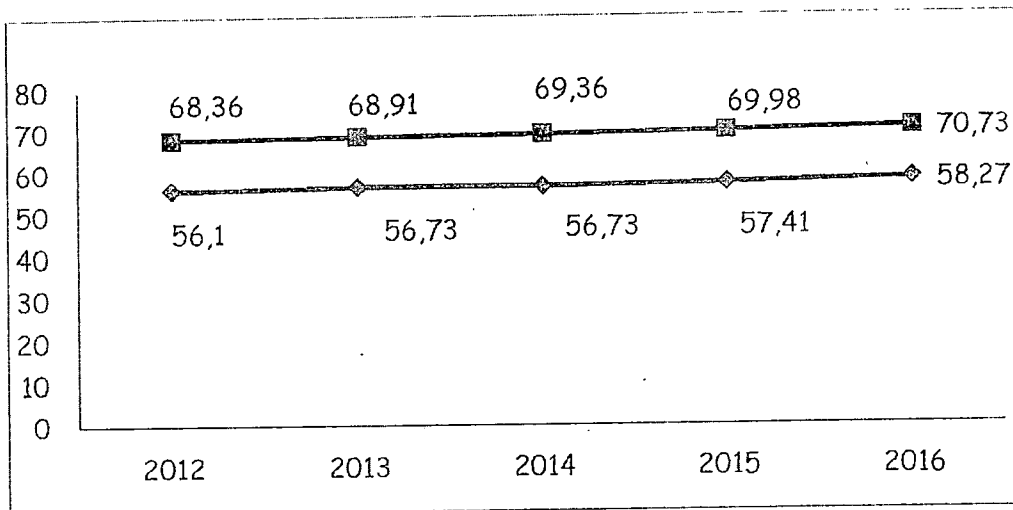
#### a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan yang dilaksanakan di suatu daerah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata tapi lebih konkret lagi adalah membangun manusianya. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi masyarakat, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan. Pembangunan juga memperhatikan upaya memanfaatkan dan meningkatkan kemampuan masyarakat secara optimal.

Untuk mengukur kualitas manusia di suatu daerah, indeks yang digunakan adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan pelbagai manfaat pembangunan lainnya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar antara lain harapan hidup, angka harapan lama sekolah dan standar hidup.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2012-2016 masih berada jauh di bawah IPM Provinsi Sumatera Barat dan IPM nasional dalam kurun waktu yang sama. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) agar kualitas hidup masyarakat Mentawai jauh lebih baik. Namun, jika dilihat tren perkembangannya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan dan perbaikan. Pada tahun 2015 IPM Kepulauan Mentawai berada pada posisi 57.41 meningkat di tahun 2016 menjadi 58.27

**Gambar 2.5**  
**IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai dan**  
**Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, 2012-2016**



Sumber: BPS Kepulauan Mentawai

Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten Kepulauan Mentawai

**b. Indikator Pendidikan**

Tingkat pencapaian program pembangunan pendidikan masyarakat secara umum dapat diukur melalui perubahan dan perkembangan tingkat pendidikan yang berhasil dicapai masyarakat dalam periode waktu tertentu. Hasil pembangunan pendidikan masyarakat dapat dilihat melalui beberapa indikator, antara lain yang akan dibahas adalah angka melek huruf, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, angka pendidikan yang ditamatkan, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM).

Secara umum keadaan kondisi pendidikan di Kepulauan Mentawai dapat dilihat dari perkembangan indikator makro pendidikan. Angka melek huruf menunjukkan perkembangan pembangunan pendidikan. Semakin besar angka melek huruf, berarti semakin banyak penduduk yang mengerti baca tulis.

**Tabel 2.13**  
**Indikator Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016**

No	Indikator Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Angka Melek Huruf (persen)	93,69	93,88	94,57	97,59	97,59
2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,09	11,22	11,35	11,45	11,74
3	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	6,16	6,17	6,19	6,27	6,52
4	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	SD/MI	109,20	114,1	122,02	125,16	120,25
	SMP/MTs	69,80	48,72	79,53	99,76	96,47
	SMA/SMK/MA	56,60	57,45	67,93	50,36	56,64
5	Angka Partisipasi Murni (APM)					
	SD/MI	92,1	93,81	96,62	98,35	98,30
	SMP/MTs	52,3	36,44	63,91	70,98	59,19
	SMA/SMK/MA	41,7	51,85	53,55	46,18	39,41

Sumber: BPS Kepulauan Mentawai

Selama kurun waktu tahun 2012-2016 keadaan angka melek huruf Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan, pada tahun 2012 angka melek huruf Kepulauan Mentawai sebesar 93,69 meningkat menjadi 97,59 pada tahun 2016.

Angka harapan lama sekolah juga Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 2012-2016 mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa

meningkatnya ekspektasi bersekolah di Kepulauan Mentawai, tahun 2012 angka harapan lama sekolah sebesar 11,09 tahun dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 11,74 tahun.

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai juga mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2012-2016. Sampai tahun 2016 rata-rata lama sekolah adalah 6,52 tahun, artinya rata-rata penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai bersekolah sampai 6 tahun atau setingkat pendidikan SD. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) kurun waktu 2012-2016 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016 terjadi penurunan APM dan APK baik SD, SMP dan SMA. Untuk tingkat SD APK pada tahun 2015 APK turun sebesar 125,16 turun menjadi 120,25 pada tahun 2016, APK SMP tahun 99,76 turun menjadi 96,47 pada tahun 2016, APK SMA tahun 2015 sebesar 50,36 naik menjadi 56,64 pada tahun 2016.

Sementara APM SD pada tahun 2015 sebesar 98,35 turun menjadi 98,30 pada tahun 2016, APM SMP sebesar 70,98 pada tahun 2015 turun menjadi 59,19 pada tahun 2016, APM SMA sebesar 46,18 turun menjadi 39,41 pada tahun 2016.

Secara keseluruhan APK dan APM Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2012-2016 masih rendah terkhususnya untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA, hal ini menjadi acuan dalam perbaikan pendidikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

### c. Indikator Kesehatan

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat salah satunya ditandai dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH), yang berarti tingkat kepedulian masyarakat terhadap hidup sehat mengalami perubahan peningkatan perilaku. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Perkembangan indikator kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2012-2016 mengalami perbaikan pencapaian di beberapa indikator kesehatan. Angka Harapan Hidup (AHH) Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan dari 64,36 tahun (tahun 2015) meningkat menjadi 64,36 tahun (tahun 2016), begitu juga dengan indikator angka kesakitan (morbiditas) juga mengalami penurunan dari 13,21 persen (tahun 2015) menjadi 12,14 persen (tahun 2016).



**Tabel 2.14**  
**Indikator Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016**

Indikator Kesehatan	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Harapan Hidup (tahun)	63,53	63,53	63,55	64,05	64,36
Angka Kematian Bayi (kematian/1.000 kelahiran hidup)	30	23	26	17	30
Angka Kematian Balita (1.000 balita)	6	5	8	5	5,3
Angka Kematian Ibu (kematian/100.000 kelahiran hidup)	317	276	444	484	442
Prevalensi Gizi Buruk	4,3	4,4	3,3	3,3	3,5
Prevalensi Gizi Kurang	17,7	15	13,3	7,8	9,4
Pemberian ASI	-	55	58	65	75,1
Angka Kesakitan/Morbiditas (persen)	16,7	16,12	14,96	13,21	12,14
Angka Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan (persen)	71,61	75,39	61	78	56,82

Sumber: BPS Kepulauan Mentawai

#### d. Ketenagakerjaan

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan rata-rata 2 persen/tahun menjadi poin positif dalam ketersediaan sumber daya manusia kedepan untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Namun disisi lain, pertumbuhan penduduk ini akan menjadi bumerang bagi keberlangsungan pembangunan akibat tidak tersedianya lapangan usaha dan tidak berkembangnya kreativitas masyarakat (tidak berjiwa wirausaha/enterprenuer). Pandangan masyarakat bahwa pekerjaan itu adalah menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) menjadikan banyak lulusan-lulusan di akademi/perguruan tinggi tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi akademiknya untuk dikembangkan di sektor non pemerintah atau berwirausaha. Upaya peningkatan kesempatan kerja dan perbaikan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing mutlak dilakukan, hal tersebut sangat perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha melalui pendidikan formal maupun informal.

Secara umum, orientasi pekerjaan di Kepulauan Mentawai di dominasi pada



pertanian. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian lebih dari 50 persen terhadap PDRB Kepulauan Mentawai. Tenaga kerja di Kepulauan Mentawai berdasarkan status pekerjaannya dikelompokkan pada pekerja keluarga atau buruh tidak dibayar. Namun, pada tahun 2016 untuk status pekerjaan tenaga kerja berusaha sendiri (wirausaha) mengalami penurunan dari 27,33 persen tahun 2014 menjadi 17,04 persen tahun 2016.

**Tabel 2.15**  
**Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama (persen) 2012-2016**

Status Pekerjaan Utama	2012	2013	2014	2015	2016
Berusaha Sendiri	13,08	10,64	27,33	17,04	17,04
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	30,31	33,76	27,24	26,41	26,41
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh tidak dibayar	0,93	0,82	1,08	0,86	0,86
Buruh/karyawan/Pegawai	17,22	12,78	13,36	16,28	16,28
Pekerja Bebas	1,43	3,65	6,12	2,61	2,61
Pekerja Keluarga/Pekerja Tidak Dibayar	37,03	38,35	24,87	36,8	36,8

Sumber: Inkesra Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016

Tingkat pengangguran terbuka di Kepulauan Mentawai yang mencari pekerjaan tahun 2016 sebesar 1,25 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, satu atau dua diantaranya adalah penganggur. Rendahnya tingkat pengangguran terbuka ini dikarenakan oleh hampir semua rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengusahakan pertanian tanaman pangan.

### Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah isu yang kompleks dan multidimensional, karena banyak pendekatan yang dilakukan terhadap kondisi yang disebut miskin. Mengacu pada konsep Strategi Penanggulangan Kemiskinan menyatakan bahwa kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Secara umum Bank Dunia (2000) menyatakan bahwa kemiskinan adalah masalah kekurangan dalam kesejahteraan.

Badan Pusat Statistik (BPS) secara lebih spesifik mendefinisikan kemiskinan

sebagai suatu kondisi yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran per kapita selama sebulan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar minimum. Kebutuhan standar minimum digambarkan dengan Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan (GK) adalah batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Kondisi kemiskinan di Kepulauan Mentawai dapat dilihat melalui Tabel 2.9 menunjukkan perkembangan jumlah penduduk miskin di Kepulauan Mentawai kurun waktu 2012-2016 mengalami penurunan dari 13.160 (15,52 %) jiwa di tahun 2015 menjadi 13.090 (15,52) jiwa di tahun 2016.

**Tabel 2.16**  
**Indikator Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016**

Indikator Kemiskinan	2012	2013	2014	2015	2016
Penduduk Miskin (jiwa)	13.100	13.265	12.580	13.160	13.090
Persentase Penduduk Miskin (persen)	16,7	16,12	14,96	15,52	15,12
Garis Kemiskinan (Rp)	208.045	217.773	223.814	235.897	263.793
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	3,21	2,04	2,21	2,83	2,56
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	1,37	0,46	0,55	0,71	0,6

Sumber: BPS Kepulauan Mentawai

Indeks kedalaman kemiskinan di Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan, artinya bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kepulauan Mentawai sudah mendekati garis kemiskinan dan akan berpeluang besar menuju garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir belum menunjukkan penurunan yang cukup berarti, artinya masih besarnya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kepulauan Mentawai.

## 2.2.4 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analogi dengan pembangunan ekonomi yang bermakna sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, maka pembangunan kesenian dan kebudayaan akan bermakna sebagai upaya meningkatkan nilai tambah sosial kultural, yaitu nilai tambah kemartabatan, nilai tambah kebanggaan, nilai tambah jati diri dan nilai tambah akal budi serta budi pekerti. Kekuatan budaya yang senantiasa ada pada setiap kegiatan sehari-hari ini membentuk karakter masyarakat, melalui budaya, yang tentunya didalamnya pasti ada kesenian, karakter masyarakat dibangun.

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan nasional yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

**Tabel 2.17**  
**Perkembangan Seni, Budaya, Kepemudaan, dan Olah Raga**  
**Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016**

No	Capaian Pembangunan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah grup kesenian	7	9	12	0	11
2	Jumlah gedung kesenian	0	0	0	0	0
3	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	0	2	0	1	2
4	Jumlah Organisasi Kepemudaan	0	21	22	7	10
5	Jumlah klub olahraga	0	17	15	0	1
6	Jumlah gedung olahraga	0	7	7	7	5

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

## 2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pelayanan publik dapat dipahami sebagai segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap

warga atas suatu barang jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, maka diperlukan bentuk pelayanan prima.

Pelayanan prima merupakan suatu pelayanan terbaik, melebihi, melampaui, mengungguli pelayanan yang diberikan pihak lain atau dari pada pelayanan waktu yang lalu. Secara sederhana, pelayanan prima (*excellent service*) adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan/masyarakat.

Pelayanan umum ini pada dasarnya terbagi 2 (dua) urusan yaitu layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan.

### **2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib**

Analisa kinerja layanan urusan wajib yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah, yaitu : (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; (5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; (6) sosial; (7) tenaga kerja; (8) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan anak; (9) Pangan; (10) Pertanahan; (11) Lingkungan Hidup; (12) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (13) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; (14) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; (15) Perhubungan; (16) Komunikasi dan Informatika; (17) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; (18) Penanaman Modal; (19) Kepemudaan dan Olah Raga; (20) Persandian; (21) Kebudayaan; (22) Perpustakaan; (23) Kearsipan.

#### **I. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar**

##### **1. Pendidikan**

Salah satu upaya pemerintah baik pusat maupun di daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya adalah melalui pendidikan, karena tujuan dasar pembangunan adalah membangun manusianya.

Program wajib belajar 9 (sembilan) tahun sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dirasakan belum tercapai secara maksimal, ini



dapat dilihat dari pelbagai indikator-indikator dalam pendidikan, seperti angka partisipasi masyarakat, rasio guru dan murid, rasio sekolah dengan murid dan beberapa indikator lainnya.

a) APS (Angka Partisipasi Sekolah)

Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat partisipasi anak usia sekolah dapat diketahui melalui Tabel 2.16. Perkembangan Tingkat Partisipasi Sekolah dari tahun 2012-2016 menunjukkan adanya peningkatan pencapaian. Pada tahun 2014 Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang SD, SMP maupun SMA mengalami peningkatan. Untuk SD/MI dari 95,95 persen pada tahun 2015 menurun menjadi 91,30 persen pada tahun 2016, pada jenjang SMP/MTs nilai APS 60,12 persen tahun 2015 menurun menjadi 52,40 persen. Begitu juga untuk jenjang SMA/MA juga mengalami penurunan dari 48,67 tahun 2017 menjadi 42,90 tahun 2016.

**Tabel 2.18**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)**  
**Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016**

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					
1.1	Jumlah murid usia 7-12 tahun	12.575	12.563	12.924	13.741	12.037
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	13.575	13.562	13.204	13.184	13.184
1.3	<b>APS SD/MI</b>	<b>92,63</b>	<b>92,63</b>	<b>97,87</b>	<b>95,95</b>	<b>91,30</b>
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah murid usia 13-15 tahun	3.943	3.939	6.160	3814	3.324
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	5.084	5.079	6.368	6.344	6.344
2.3	<b>APS SMP/MTs</b>	<b>77,56</b>	<b>77,56</b>	<b>96,72</b>	<b>60,12</b>	<b>52,40</b>
3	SMA/SMK/MA					
3.1	Jumlah murid usia 16-18 tahun	2.239	2.237	3.490	2.826	2.491
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	3.450	3.447	4.001	5.807	5.807
3.3	<b>APS SMP/MTs</b>	<b>64,9</b>	<b>64,9</b>	<b>87,23</b>	<b>48,67</b>	<b>42,90</b>

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai (diolah)

b) Rasio Ketersediaan Sekolah dengan Penduduk Usia Sekolah

Ketersediaan sarana pendidikan berupa gedung sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai memang menjadi persoalan tersendiri, hal ini disebabkan selain karena letak geografis Kepulauan Mentawai juga belum terbukanya akses jalan penghubung antar dusun dan desa.

Rasio ketersediaan unit sekolah terhadap penduduk usia sekolah dapat dilihat melalui Tabel 2.17. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI sudah mencukupi. Untuk tahun 2016 nilai rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah sebesar 112,65 persen, artinya untuk setiap 1 unit sekolah yang tersedia secara rata-rata menampung 112 orang peserta didik.

**Tabel 2.19**  
**Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah**  
**Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016**

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					
1.1	Jumlah gedung sekolah	108	108	108	117	117
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	13.575	13.562	13.204	13120	13180
1.3	Rasio	125,69	125,57	122,26	112,14	112,65
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah gedung sekolah	19	21	21	27	27
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	5084	5079	6368	6468	6232
2.3	Rasio	267,56	241,85	303,25	239,56	230,81
3	SMA/SMK/MA					
3.1	Jumlah gedung sekolah	6	9	9	14	14
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	3.450	3.447	4.001	5807	5933
3.3	Rasio	575,02	382,98	444,54	414,79	423,79

Sumber: Mentawai Dalam Angka 2012-2016 (diolah)

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah untuk jenjang pendidikan SMP/MTs untuk tahun 2015 sebesar 239,56, artinya untuk setiap 1 unit



sekolah dapat menampung 240 orang peserta didik. Tahun 2016 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah sebesar 230,81 artinya untuk setiap 1 unit sekolah dapat menampung 231 orang peserta didik.

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA untuk tahun 2015 sebesar 414,79, artinya untuk setiap 1 unit sekolah menampung 414 orang peserta didik. Kondisi ini meningkat di tahun 2016 dengan angka rasio sebesar 423,79.

c. Rasio Guru dengan Murid

Rasio guru dengan murid didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. Tujuannya adalah untuk mengetahui rata-rata jumlah guru yang dapat melayani murid di suatu jenjang pendidikan sekolah atau daerah tertentu. Angka rasio guru dengan murid juga dapat menunjukkan keefektifan seorang guru terhadap jumlah siswa yang dilayani. UNESCO (2014) menetapkan rasio guru dan murid antara lain dengan perbandingan 1:26 untuk negara-negara Asia, dan 1:24 untuk negara-negara yang berpenghasilan menengah.

**Tabel 2.20**  
**Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah**  
**Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016**

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru	646	990	990	1287	1301
1.2	Jumlah Murid	13.425	14.730	14.730	15334	14961
1.3	Rasio	20,78	14,88	14,8788	11,91	11,5
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru	268	309	329	399	405
2.2	Jumlah Murid	4.242	4.130	4.143	4962	5058
2.3	Rasio	10,69	13,37	12,59	12,44	12,49
3	SMA/SMK/MA					
3.1	Jumlah Guru	226	227	228	372	282
3.2	Jumlah Murid	2.865	2.929	2.918	3512	3727
3.2	Rasio	12,68	12,9	12,8	9,44	9,76

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka 2012-2016 (diolah)





Tabel 2.20 menunjukkan rasio antara jumlah guru dengan jumlah murid untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu, juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Tabel 2.20 tersebut menunjukkan bahwa rasio antara guru dan murid di Kepulauan Mentawai di setiap jenjang sudah baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel bahwa di setiap jenjang pendidikan sekolah rasio antara guru dan murid di Kabupaten Kepulauan Mentawai di bawah 1:26.

c) Kelulusan Siswa Peserta UN (Ujian Nasional)

Hasil akhir yang menentukan keberhasilan ketercapaian proses pembelajaran di sekolah diketahui melalui serangkaian ujian, mulai dari ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan diakhir masing-masing jenjang pendidikan akan dilalui ujian nasional (UN).

Tabel 2.21 menunjukkan persentase kelulusan peserta didik pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA dalam ujian nasional (UN). Persentase kelulusan di masing-masing jenjang pendidikan berada pada kisaran 97 persen di tahun 2014-2016.

**Tabel 2.21**  
**Jumlah Peserta UN dan yang Lulus UN Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016**

Jenjang Pendidikan		2012	2013	2014	2015	2016
SD	Jumlah Peserta UN	1.766	1.845	1.845	1981	2017
	Jumlah Peserta Lulus UN	1.764	1.845	1.845	1981	2017
	Persentase	99,89	100	100	100,00%	100,00%
SMP	Jumlah Peserta UN	910	1.094	1.094	1387	1577
	Jumlah Peserta Lulus UN	910	1.089	1.089	1365	1435
	Persentase	100	99,54	99,54	98%	91%
SMA	Jumlah Peserta UN	635	737	737	954	934
	Jumlah Peserta Lulus UN	596	710	710	924	924
	Persentase	93,86	96,34	96,34	97%	99%

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka 2012-2016 (diolah)



d) Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Salah satu syarat menjadi guru yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah memiliki kualifikasi akademik S1/D-IV. Baik buruknya kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh standar kualitas guru. Pada tabel 2.22 terlihat bahwa guru-guru pada jenjang SD sekitar 48-61% yang berkualifikasi S1 / D IV

**Tabel 2.22**  
**Jumlah Guru dengan Kualifikasi Akademik S1/D-IV**  
**Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016**

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru	987	1280	1280	1287	1301
1.2	Jumlah Guru (Kualifikasi S1/D-IV)	548	622	622	796	801
	Persentase	55,52%	48,59%	48,59%	61,85%	61,57%
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru	268	364	364	399	405
2.2	Jumlah Guru (Kualifikasi S1/D-IV)	268	314	314	370	376
	Persentase	100,00%	86,26%	86,26%	92,73%	92,84%
3	SMA/SMK/MA					
3.1	Jumlah Guru	207	288	300	372	382
3.2	Jumlah Guru (Kualifikasi S1/D-IV)	207	240	240	362	372
3.3	Persentase	100%	83%	80%	97%	97%

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka 2012-2016 (diolah)

## 2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Tingkat kesehatan masyarakat berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraannya, masyarakat yang sakit, akan terkendala untuk melakukan kegiatan yang produktif, penurunan penghasilan dan pendapatan, sehingga akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh kondisi fisik dan non



fisik. Secara langsung kondisi fisik seseorang akan ditentukan oleh tingkat kesehatannya, sedangkan kondisi non fisik seperti tingkat intelektual, pengendalian emosional juga sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan seseorang.

a) Jumlah Tenaga Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sangat ditentukan oleh akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Ketersediaan tenaga kesehatan merupakan hal yang sangat mendasar dibutuhkan oleh masyarakat dalam menangani permasalahan kesehatan masyarakat.

**Tabel 2.23**  
**Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016**

Tenaga Kesehatan	2012	2013	2014	2015	2016
Dokter	15	5	5	15	25
Perawat	137	152	239	257	329
Bidan	41	83	153	181	239
Dukun Bermitra	-	62	129	188	181

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka 2016

Tabel 2.23 menunjukkan secara umum adanya peningkatan jumlah tenaga kesehatan yang tersedia di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyediakan tenaga kesehatan melalui beberapa saluran, antara lain penerimaan CPNS, tenaga medis kontrak, tenaga penyuluh, kemitraan dengan perdesaan/dusun, tenaga kesehatan PTT dan melalui saluran lainnya.

b) Jumlah Sarana Kesehatan

Upaya kesehatan hanya dapat diwujudkan dalam suatu wadah pelayanan kesehatan (*health services*). Pelayanan kesehatan adalah tempat atau sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Pemerintah wajib menyediakan sarana kesehatan untuk mempermudah dalam mengatasi permasalahan kesehatannya. Penyediaan sarana kesehatan sebagai sarana usaha preventif, kuratif dan promotif kesehatan bagi masyarakat.

**Tabel 2.24**  
**Jumlah Layanan Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016**

No	Sarana Layanan Kesehatan	2012	2013	2014	2015	2016
1	RSUD	1	1	1	1	1
2	Puskesmas	10	10	10	10	12



No	Sarana Layanan Kesehatan	2012	2013	2014	2015	2016
3	Puskesmas Pembantu (Pustu)	14	14	21	22	22
4	Poskesdes	47	34	68	67	71
5	Posyandu	193	243	255	255	255
6	Polindes	16	19	11	32	52

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka 2016

Ketersediaan layanan kesehatan berupa sarana dan prasarana kesehatan adalah kebutuhan mendasar dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat. Hal terpenting dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat adalah akses pelayanan kesehatan. Pusat layanan kesehatan masyarakat harus menjangkau daerah-daerah terpencil, sehingga masyarakat tidak bersusah payah pergi ke daerah lain untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Tabel 2.24 menunjukkan perkembangan sarana kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu tahun 2012-2016 mengalami perkembangan dalam hal jumlah sarana. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan promosi pola hidup bersih dan sehat bagi masyarakat menjadi perhatian khusus dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan kesehatan.

#### c) Rasio Tenaga Kesehatan dengan Jumlah Penduduk

Rasio tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Tabel 2.25 menunjukkan masih kurangnya ketersediaan tenaga kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Angka rasio tenaga medis dengan jumlah penduduk tahun 2012-2016 masih sangat besar, ini berarti masih perlu upaya yang keras dalam menyeimbangkan ketersediaan tenaga medis dengan kebutuhan masyarakat.

**Tabel 2.25**  
**Rasio Jumlah Tenaga Medis dan Jumlah Penduduk**  
**Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Tenaga Medis	18	8	12	20	35
2	Jumlah Penduduk	79.976	81.840	83.803	85.295	86.981
3	Rasio	0,023%	0,010%	0,014%	0,023%	0,040%

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka 2016



d) Jumlah bayi yang diberi imunisasi

Imunisasi merupakan upaya pencegahan yang amat bermanfaat untuk mencegah penyakit-penyakit infeksi. Tujuan dari imunisasi adalah untuk melindungi anak dari penyakit tertentu, yang pada akhirnya mengeradikasi suatu penyakit. Kesadaran masyarakat akan kesehatan sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, pemberian imunisasi adalah salah satunya.

**Tabel 2.26**

**Jumlah Bayi yang Diberi Imunisasi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016**

Jenis Imunisasi	2012	2013	2014	2015	2016
BCG	1.074	1.290	1.455	1547	1428
Polio 4	905	1.362	1.540	1439	1487
Campak	1.013	1.211	1.569	1427	1311
DPT 1	1.431	1.916	1.448	1480	1537

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2016 (diolah)

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;

Sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik. Sarana dan prasarana umum mutlak disediakan oleh pemerintah dalam rangka menstimulus roda perekonomian masyarakat, seperti penyediaan saluran irigasi, jalan, jembatan, air bersih.

a). Kondisi Jaringan Jalan

Jalan memegang peranan penting dalam kegiatan transportasi dan mobilitas penduduk. Dua hal utama yang berkaitan erat dengan kinerja jalan, baik untuk individual segmen maupun untuk sepanjang ruas dan sistem jaringan adalah aspek kondisi dan aspek pemanfaatannya. Sebagai prasarana publik, jalan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perkembangan sektor lain, terutama dalam peningkatan sektor ekonomi riil masyarakat.

**Tabel 2.27**

**Kondisi Jalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016**

Tahun	Kondisi Jalan (km)			Panjang Jalan (km)
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
2012	57,84	143,1	620,76	821,7
2013	66,03	143,1	612,57	821,7

Tahun	Kondisi Jalan (km)			Panjang Jalan (km)
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
2014	83,38	143,1	602,23	828,7
2015	97,42	164,23	590,14	851,55
2016	92,31	65,35	972,8	1130,2

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2016 (diolah)

Tabel 2.27 menunjukkan kondisi jalan yang masih memperhatikan, namun upaya peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik terus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur publik bagi masyarakat terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b). Kondisi jaringan jembatan

Jembatan merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang sangat vital dalam aliran perjalanan (*traffic flows*).

**Tabel 2.28**  
**Kondisi Jembatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016**

Tahun	Kondisi Jembatan (m)			Panjang Jembatan (m)
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
2013	157	652	1.743	2.552
2014	229	652	1.671	2.552
2015	239	652	1661	2.552
2016	259	652	1641	2.552

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2016

Jembatan sebagai sarana transportasi memegang peranan penting dalam menghubungkan dua tempat yang terpisah. Tabel 2.28 menunjukkan di tahun 2016 terjadi peningkatan volume jembatan yang berarti baik dari sisi panjang jembatan maupun kondisi jembatan dalam keadaan baik. Sebagai penghubung dua tempat terpisah, jembatan sangat diperlukan oleh masyarakat terutama dalam hal akses mobilitas barang dan orang agar lebih efisien dan efektif. Tabel 2.28 menunjukkan perkembangan kondisi jembatan dalam keadaan baik mengalami peningkatan. Tahun 2015 panjang total jembatan dalam kondisi baik dengan total panjang jembatan 239 m meningkat di tahun 2016 menjadi 259 km.

### c. Penataan Ruang

Amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang seperti tertuang pada pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Penyelenggaraan penataan ruang tersebut meliputi aspek-aspek pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan, dimana untuk masing-masing aspek tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten, kota atau kawasan lainnya.

Penataan ruang dan wilayah mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2015-2035 menjadi acuan hukum dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat. Rencana kawasan tata ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam jangka waktu 20 tahun di bagi dalam 2 kawasan antar lain kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri:

1) Kawasan hutan lindung.

Kawasan hutan lindung terdiri atas kawasan hutan lindung darat dan kawasan hutan lindung mangrove dengan luas 13.533,86 ha.

2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya antara lain adalah kawasan resapan air. Kawasan ini tersebar di setiap kecamatan di Kepulauan Mentawai.

3) Kawasan perlindungan setempat.

Kawasan ini meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, kawasan sekitar danau, kawasan hutan mangrove dengan ketentuan daratan sepanjang tepian dengan jarak minimal 100 meter dari titik ke arah daratan, sedangkan kawasan hutan mangrove dengan luas 13.353 ha.

4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya.

Kawasan ini terdiri atas kawasan suaka alam, kawasan suaka alam perairan,



kawasan taman nasional, kawasan taman wisata alam laut, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Kawasan suaka terdiri atas kawasan suaka alam dengan luas 6.019,99 ha. Kawasan suaka alam perairan terdiri atas kawasan suaka alam perairan atau dpl dengan luas 160 ha. Kawasan Taman Nasional yaitu Taman Nasional Siberut seluas 190.500 hektar. Kawasan wisata alam laut yaitu Taman Wisata Laut Teluk Sarabua Saibi terdapat di Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah seluas 21.200 hektar. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan yaitu kawasan komunitas adat/budaya Mentawai terdapat di Dusun Terekan Hulu Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara, Dusun Sirisurak Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah, Desa Madobag, Dusun Ongah dan Kinikdog Desa Matotonan Kecamatan Siberut Selatan, Dusun Bolotok dan Boboakenen Desa Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya, dan benteng Peninggalan Jepang di Sioban Kecamatan Sipora Selatan.

5) Kawasan rawan bencana alam.

Kawasan rawan bencana alam terdiri atas kawasan rawan tanah longsor di wilayah perbukitan Pulau Siberut, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan. Kawasan rawan gelombang pasang tersebar di wilayah pesisir seluruh wilayah daerah. Kawasan rawan gempa dan tsunami tersebar di wilayah pesisir seluruh wilayah daerah. Kawasan rawan banjir tersebar di sekitar aliran dan muara Sungai Talopulai dan Sungai Makalo di Kecamatan Pagai Selatan, Sungai Silabu dan Sungai Saumanganya di Kecamatan Pagai Utara, Sungai Taikako dan Sungai Matobe di Kecamatan Sikakap, Sungai Saureinu di Kecamatan Sipora Selatan, Sungai Pogari, Sungai Berimanua dan Sungai Betumonga di Kecamatan Sipora Utara, Sungai Sagulubbek dan Sungai Taileleu di Kecamatan Siberut Barat Daya, Sungai Saibi di Kecamatan siberut tengah, Sungai Siberut di Kecamatan Siberut Selatan, Sungai Sikabalu, Sungai Monganpoula, Sungai Sotboyak, Sungai Bojakan, Sungai Sirilanggai di Kecamatan Siberut Utara, Sungai Simalegi, Sungai Simatalu, Sungai Berisigep, dan Sungai Policoman di Kecamatan Siberut Barat.

Kawasan rawan abrasi terdapat di Pantai Muara Sikabalu (Kecamatan Siberut Utara), Pantai Muara Siberut (Kecamatan Siberut Selatan), Pantai Mapaddegat dan Pantai Tuapejat (Kecamatan Sipora Utara), Pantai Sioban, Pantai Beriulou, Pantai Desa Bosua, Pantai Bandara Rokot Matobe (Kecamatan Sipora Selatan),





dan di Pantai Sikakap (Kecamatan Sikakap).

6) Kawasan lindung geologi.

Kawasan lindung geologi yang merupakan kawasan rawan bencana alam geologi terdiri atas kawasan rawan gempa bumi terdapat di wilayah pesisir seluruh wilayah daerah. Kawasan rawan tsunami terdapat di seluruh wilayah pesisir seluruh wilayah daerah.

7) Kawasan konservasi perairan.

Kawasan konservasi perairan di Kepulauan Mentawai terdapat pada Kawasan Konservasi Perairan Selat Bunga Laut dengan luas total 123.746,94 hektar.

8) Kawasan lindung lainnya.

Kawasan lindung lainnya terdiri atas kawasan terumbu karang di Pulau Siberut seluas kurang lebih 5.410,7 hektar, kawasan terumbu karang di Pulau Sipora seluas kurang lebih 5.988 hektar, kawasan terumbu karang di Pulau Pagai Utara seluas kurang lebih 733 hektar dan kawasan terumbu karang di Pulau Pagai Selatan seluas kurang lebih 1.099 hektar.

Kawasan budidaya di Kepulauan Mentawai terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi dengan luas 246.011,41 ha, kawasan peruntukan pertanian dengan luas 119.492,20 ha. Kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan lainnya yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi bandar udara (bandara), pertahanan dan keamanan.

4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Dengan memperhatikan data perkembangan layanan urusan wajib perumahan rakyat dan kawasan permukiman, telah mengalami peningkatan seperti pada tabel 2.29 :

Tabel 2.29  
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Rasio rumah layak huni (%)	20	37	45	51	60

Sumber : Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman

5. Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat Pelaksanaan dari pembangunan daerah dalam layanan urusan wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, selama periode waktu 2012-2016, berdasarkan data yang ada pada Tabel 2.30 sesuai dengan indikator yang tersedia, menunjukkan terjadi peningkatan, sesuai dengan tabel dibawah ini ;

Tabel 2.30

Perkembangan Indikator Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	60	60	60	65	60
2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	0.0013	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012
3	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	70	70	80	80	80
4	Persentase Penegakan PERDA	100	100	100	100	90

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

#### 6. Urusan Wajib Sosial

Pelaksanaan dari pembangunan daerah dalam layanan urusan wajib sosial, selama periode waktu 2012-2016, berdasarkan data yang ada pada Tabel 2.31 sesuai dengan indikator yang tersedia, menunjukkan terjadi peningkatan pada sarana sosial yang direhabilitasi serta indikator lain, sesuai dengan tabel 2.31 dibawah ini

Tabel 2.31

Perkembangan Indikator Urusan Sosial Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016

No	Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
20.9	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	3	4	4	5	5
20.11	PMKS yang memperoleh bantuan	-	17,711	1,976	18,915	18,915



No	Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
20.12	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial/ Penanganan PMKS	-	18	10	10	10
20.13	Jumlah PMKS	20,228	24,413	24,413	24,413	24,413

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

#### 1. Urusan Wajib Tenaga Kerja

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai Tingkat Pengangguran terbuka terendah di provinsi Sumatera barat adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Indikator tenaga kerja lainnya dapat dilihat pada tabel 2.32 dibawah ini

Tabel 2.32  
Perkembangan Indikator Urusan Sosial  
Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016

No	Bidang Urusan / Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Angka partisipasi angkatan kerja	-	66.56	67.84	67.84	67.84
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	77.44	76.78	75.47	75.47	75.47
3	Pencari kerja yang ditempatkan	19	20	15	17	15
4	Tingkat pengangguran terbuka	4.27	3.9	1.66	1.66	1.25

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

#### 2. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Partisipasi angkatan kerja perempuan pada periode tahun yang sama menunjukkan pesentase yang semakin bertambah, hal ini dapat menggambarkan bahwa pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah cukup memadai, namun yang perlu ditingkatkan adalah Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah.

Tabel 2.33  
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan Dan  
Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016

No	Bidang Urusan / Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	11.01	11.44	11.22	11.22	11.22
2	Partisipasi angkatan kerja perempuan	68.98	68.22	65.12	65.12	65.12
3	Jumlah PNS perempuan dibanding total PNS	47.63	47.71	48.24	48.61	48.81

Sumber : BKPSDM

### 3. Urusan Wajib Pangan

Pada urusan wajib pangan berbagai indikator yang terlihat pada Tabel 2.34 menggambarkan perkembangan yang cukup baik, disertai dengan pengawasan dan pembinaan pangan

Tabel 2.34  
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pangan  
Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Ketersediaan pangan utama	60	62	65	66	67
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	47.63	47.71	48.24	48.61	48.81

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

### 4. Urusan Wajib Pertanahan

Berdasarkan data yang tersedia pada indikator urusan wajib pertanahan bahwa Penyelesaian kasus tanah Negara selama kurun waktu lima tahun, menunjukkan angka yang terus berkurang, dari 5 kasus tahun 2012 menjadi 0 kasus pada 2016, hal ini mengindikasikan bahwa telah berkurangnya sengketa terhadap tanah-tanah Negara di daerah, seperti Tabel 2.35



Tabel 2.35  
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016

No	Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase luas lahan bersertifikat	30	35	39	39	41
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	5	2	2	2	0
3	Penyelesaian izin lokasi	0	-	-	-	0

Sumber : BPN

#### 5. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Perkembangan penyelenggaraan urusan wajib lingkungan hidup selama tahun 2012-2016 ditunjukkan pada Tabel 2.36

Tabel 2.36  
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6	Penetapan hak MHA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
7	Persentase penanganan sampah	-	-	25	7.08	5.9
8	Persentase penduduk berakses air minum	-	-	15	29	30
	Pencemaran status mutu air	-	-	26.3	36.8	36.8



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
9	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal		20	25	0	0
10	- Jumlah TPS	-	1	1	1	1
11	Penegakan hukum lingkungan	-	1	1	1	1

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

#### 6. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan angka yang terlihat pada Tabel 2.37 menunjukkan berbagai indikator dalam urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, selalu mengalami kenaikan selama kurun waktu 2012-2016. Hal ini dapat dilihat dari rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk mencapai 45,63% pada tahun 2016 dari sebelumnya 5,83% pada tahun 2012. Indikator lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini ;

Tabel 2.37

Perkembangan Indikator Urusan Wajib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	5.83	45.99	44.96	45.51	45.63
2	Rasio bayi berakte kelahiran	60.05	67.26	70.16	63.36	53.73
3	Rasio pasangan berakte nikah	19.62	19.69	19.76	20.23	24.42
4	Kepemilikan KTP	7.97	69.76	945.89	97.03	94.31
5	Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	15.85	16.32	13.06	18.33	25.22
6	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten	ada	ada	ada	ada	ada
7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah
9	Pengeluaran surat pindah antar Kab/Kota	ada	ada	ada	ada	ada



No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
10	Rasio kepemilikan KK	58.72	57.98	68.25	74.38	73.68

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

#### 7. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Perkembangan urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dapat dikatakan, bahwa belum mengalami kemajuan yang cukup berarti hal ini terlihat dari indikator-indikator Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, seperti terlihat dari Tabel 2.38

Tabel 2.38  
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa  
Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat	34	34	34	34	34
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	395	395	116	345	-
3	Jumlah LSM	-	8	16	17	20
4	LPM Berprestasi	-	-	-	-	-
5	PKK aktif	289	289	116	147	147
6	Posyandu aktif	148	236	127	277	-
7	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	34	34	15	11	13
9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	-	0	15	11	13

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### 8. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Perkembangan urusan keluarga berencana mengalami peningkatan walau tidak signifikan, seperti terlihat dari Tabel 2.39



Tabel 2.39

Perkembangan Indikator Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016

No	Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga		2.01	2.06	2.07	2.06
2	Rasio akseptor KB	35.02	28.05	23.98	67.69	53.23
3	Cakupan peserta KB aktif	35.02	28.05	23.98	67.69	53.23
4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I					
5	a. Pra Sejahtera	10,943	11,105	11,402	11,402	13,004
6	b. Keluarga Sejahtera	4,793	5,165	5,368	5,368	5,360

Sumber : Dinas PMD, dan Pengendalian Penduduk dan KB

#### 9. Urusan Wajib Perhubungan

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung transportasi umum merupakan hal mendasar bagi masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian. Sebagai wilayah kepulauan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mewujudkannya pada pembangunan pelabuhan/dermaga, penyediaan kapal laut, pelabuhan udara. Untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah belakang (*interland*) dan untuk menunjang kelancaran perdagangan antar pulau serta perkembangan daerah sekitarnya.

Tabel 2.40

Jumlah Pelabuhan/Dermaga dan Bandara, Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016

Tahun	Pelabuhan/ Dermaga	Bandara
2012	8	1
2013	8	1
2014	15	1
2015	21	1
2016	21	1

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2016

Ketersediaan infrastruktur perhubungan yang memadai akan memacu pergerakan barang dan orang. Kondisi ini dapat dilihat dari Tabel 2.30 yang menunjukkan





perkembangan indikator kinerja perhubungan. Untuk kunjungan kapal kurun waktu 2012-2016 untuk kunjungan mengalami kenaikan. Untuk jumlah penumpang naik dan turun beserta jumlah bongkar muat kurun waktu 2012-2016 juga mengalami peningkatan. Nilai bongkar muat tahun 2016 senilai 87.456 ton mengalami peningkatan dari tahun 2015.

Tabel 2.41  
Kondisi Indikator Kinerja Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016

No	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kunjungan Kapal (kali)	2.454	2.385	2.097	4.867	4950
2	Penumpang Naik-Turun (kali)	100.706	109.797	115.823	93.313	101235
3	Bongkar-Muat (ton)	48.165	110.729	83.931	85.329	87456

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2016

#### 10. Urusan Wajib Komunikasi Dan Informatika

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah didukung oleh sistem teknologi informasi. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sudah mempunyai website untuk publikasi dan komunikasi proses dan hasil-hasil pembangunan. Untuk mendukung pengelolaan website telah menggunakan jaringan komunikasi ASTINet (Access Service To Internet). Perkembangan sistem komunikasi dan informasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada Tabel

Tabel 2.42  
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Komunikasi Dan Informatika  
Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah jaringan komunikasi	1	1	1	1	1
2	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01
3	Jumlah surat kabar nasional/lokal	12	12	12	14	14
4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	2	2	2	3	4
5	Web site milik pemerintah daerah	1	1	1	1	1
6	Pameran/expo	5	5	4	0	0

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika



11. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Perkembangan indikator urusan wajib koperasi, usaha kecil dan menengah, untuk persentase koperasi aktif meningkat dari 18,55% tahun 2012 menjadi 35,88% tahun 201, indikator pelayanan koperasi, usaha kecil dan menengah di daerah, seperti terlihat pada Tabel 2.43.

Tabel 2.43  
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah  
Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase koperasi aktif	18.55	18.55	19.2	23.66	35.88
2	Jumlah BPR/BPRS	-	3	3	3	3
3	Usaha Mikro dan Kecil					
	- Usaha Mikro	-	148	148	1022	1022
	- Usaha Kecil	705	705	705	28	28
	- Usaha Menengah dan Besar	9	9	9	7	7

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

12. Urusan Wajib Penanaman Modal

Indikator urusan penanaman modal belum mengalami realisasi yang signifikan dan ini harus menjadi perhatian pemerintah dalam meningkatkan realisasi investasi

Tabel 2.44  
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Penanaman Modal  
Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016

No	Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Nilai Realisasi Investasi					
	- PMDN ( Rp. Juta )	-	5.410.456	-	39.930	39.930
	- PMA ( US \$ Ribu )	626.73	727,62	-	25.173	26.231
2	Rasio Penyerapan Tenaga Kerja					



No	Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
3	- PMDN ( Orang )	-	1.520	-	-	-
4	- PMA ( Orang )	1200	1.520	-	39.930	39.930

Sumber : Bappeda

### 13. Urusan Wajib Kepemudaan Dan Olah Raga

Untuk urusan wajib kepemudaan dan olahraga dari data pada Tabel 2.45, secara umum dapat memberikan gambaran bahwa indikator menunjukkan keberhasilan yang cukup baik dan terus meningkat selama periode 2012-2016. Hal ini terlihat dari tabel 2.45 dibawah ini.

Tabel 2.45  
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kepemudaan Dan Olah Raga  
Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016

No	Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah organisasi pemuda	13	15	17	16	16
2	Jumlah organisasi olahraga	17	17	15	20	23
3	Jumlah kegiatan kepemudaan	3	4	6	5	5
4	Jumlah kegiatan olahraga	12	13	2	12	12
5	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	5	5	5	5	5
6	Lapangan olahraga	11	-	209	209	209

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

### 14. Urusan Wajib Statistik

Urusan wajib statistik berkenaan dengan penyediaan data yang diperlukan untuk memperlihatkan perkembangan pembangunan dan kemajuan daerah setiap tahunnya. Selama periode 2010-2015 telah diterbitkan buku Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai seperti dilihat pada Tabel 2.46. Selain dari menerbitkan juga telah dilakukan pendistribusian buku-buku yang diterbitkan kepada instansi terkait dan relevan.

Tabel 2.46  
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Statistik  
Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "PDRB kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappeda

#### 15. Urusan Wajib Kebudayaan

Dengan melihat dari perkembangan periode waktu 2012-2016, penyelenggaraan festival seni dan budaya, benda situs budaya yang dilestarikan sama dari tahun 2012, seperti terlihat pada Tabel 2.47.

Tabel 2.47  
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kebudayaan Kabupaten Kepulauan  
Mentawai tahun 2012-2016

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	5	2	1	2	2
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	5	3	0	0	5
3	Benda, Situs nda Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	55	55	55	55	55

Sumber :Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

#### 16. Urusan Wajib Perpustakaan

Kinerja urusan wajib perpustakaan selama periode 2012-2016 diperlihatkan pada Tabel 2.48. Perkembangan indikator jumlah pengunjung memberi bukti bahwa minat masyarakat untuk memanfaatkan pustaka daerah semakin menurun.

Tabel 2.48  
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Perpustakaan  
Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah perpustakaan	1	1	1	1	1
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	2603	2582	2389	2042	1450
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	771	1034	440	440	440

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

### 17. Urusan Wajib Kearsipan

Kinerja urusan wajib kearsipan dapat diukur dari pembinaan tata kelola arsip secara baku, jumlah sumberdaya manusia yang dibina dan jumlah khasanah arsip statis yang bisa diselamatkan, seperti yang diperlihatkan pada Tabel 2.49.

Tabel 2.49  
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kearsipan  
Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pengelolaan arsip secara baku	-	1	1	1	1
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	-	2	2	2	2

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

### 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Selain urusan wajib, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga menyelenggarakan layanan urusan pilihan yang merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan. Layanan urusan pilihan meliputi beberapa bidang, yaitu (1) Kelautan dan Perikanan (2) Pariwisata (3) Pertanian (4) Energi dan Sumber Daya Mineral (6) Perdagangan. Adapun pencapaian indikator kinerja masing-masing bidang tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pertanian dan peternakan

Arah pembangunan pertanian sangat erat dengan isu ketahanan pangan. Pertumbuhan penduduk dan gejala penurunan produksi tanaman pangan (beras) karena alih fungsi lahan ditengarai akan mengganggu tingkat ketersediaan pangan secara kewilayahan. Untuk itu, pembangunan sub sektor pertanian tanaman pangan tidak terlepas atas kebijakan pemenuhan pangan masyarakat yang bermuara pada isu kedaulatan pangan sebagai salah satu strategi pembaharuan pangan yang berintegrasi dengan strategi pembaharuan ekonomi. Berpijak pada hal itu, pasokan pangan suatu wilayah sangat bergantung pada ketersediaan dari aspek produksi dan tingkat konsumsi masyarakat dalam wilayah itu, termasuk komoditas yang dibudidayakan untuk mendukung konsumsi pangan setempat.

a). Cetak sawah

Kekuatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai ada di sektor pertanian, jika dilihat dari struktur PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai, sektor pertanian memberikan kontribusi lebih dari 50 persen. Salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah cetak sawah.

Tabel 2.50  
Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Padi Sawah, 2012-2016

Tahun	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
2012	307	439	1.843,80
2013	743	389	1.634,40
2014	1.162	863	3.625,00
2015	1024	1146	2.878,00
2016	1.311	1184	4.973,00

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2016

Tabel 2.50 menunjukkan program prioritas pemerintah dalam menjawab ketahanan pangan melalui program cetak sawah secara statistik menunjukkan peningkatan, baik secara luas tanam maupun produksi. Tahun 2016 produksi padi sawah sudah mencapai 4.973 ton dengan luas panen 1184 ha. Namun, pencapaian ini secara rasio produksi tanaman padi sawah belum maksimal dan perlu *treatment* khusus dalam upaya peningkatan hasil panen.



## b). Keladi

Sebagai makanan pokok masyarakat Mentawai, tanaman keladi sudah merupakan tanaman keluarga. Seiring dengan program pemerintah dalam menggalakkan ketahanan pangan melalui program cetak sawah, tanaman keladi menjadi pilihan kedua bagi masyarakat Mentawai. Menanam keladi menjadi kesibukan selingan bagi para petani sehari-hari.

Tabel 2.51 menunjukkan penurunan pencapaian komoditi keladi baik dari luas tanam, luas panen maupun hasil produksi. Tahun 2015 luas tanam mencapai 274 ha dengan produksi 1.778 ton, pada tahun 2016 menurun dengan luas tanam 166 ha dan hasil produksi hanya 1.079 ton.

Tabel 2.51  
Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Keladi, 2012-2016

Tahun	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
2012	563	471	3.768
2013	487	330	3.430
2014	286	330	2.069
2015	274	274	1.778
2016	166	166	1.079

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2016

## c). Perkebunan

Luasan lahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berkontur bergelombang menunjukkan konsentrasi komoditas perkebunan yang cukup beragam dari sisi luasan, diantaranya: kelapa, kakao, cengkeh, pala, dan komoditas perkebunan lainnya.

Hasil perkebunan yang cukup melimpah (bahan baku) dengan didukung prospek pasar yang potensial, memiliki nilai strategis dalam pertumbuhan ekonomi wilayah, dan berperan dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan.

Untuk itu, desain agribisnis perkebunan yang berdaya saing dengan nilai tambah yang berkelanjutan akan dapat diwujudkan apabila tercapai peningkatan produksi, perbaikan produktivitas dan penanganan mutu produk yang dihasilkan, fokus pada pengolahan produk yang memiliki nilai tambah, serta tingkat efisiensi usaha tani dapat tercapai.



Pengembangan ekonomi pertanian dan perkebunan berbasis kawasan menjadi pilihan tepat yang dapat diciptakan apabila kegiatan yang dilaksanakan oleh petani dapat memenuhi tingkat intensifikasi usaha tani yang lebih produktif, memanfaatkan teknologi tepat guna dan penguatan tingkat kemampuan petani serta kelembagaan petani dalam mengakses pemenuhan kebutuhan agribisnis.

Tabel 2.52  
Perkembangan Hasil Komoditi Pertanian  
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016

Komoditi Perkebunan	2012	2013	2014	2015	2016
Durian (kwintal)	7.930	6.057	32.261	20088	726
Mangga (kwintal)	32.320	785	1.002	219	39
Jeruk (kwintal)	1.806	1.506	1.968	15	15
Pisang (kwintal)	15.262	46.224	55.309	25639	25693
Nangka (kwintal)	13.130	11.689	12.997	4336	4336
Kelapa (ton)	6.876	7.460	7.634	6564,6	6494,585
Cengkeh (ton)	-	457	62	555,41	97,78
Pala (ton)	423	422	245	119,45	111,1
Nilam (ton)	24,1	23,3	7,49	3,36	3,81
Kakao (ton)	1.437	1.738	1.466	575,8	487,9

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2016

#### b). Populasi Ternak

Populasi hewan ternak yang dikembangkan oleh masyarakat di Kepulauan Mentawai didominasi oleh sapi, kerbau, kambing, babi dan unggas.

Tabel 2.53  
Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing, Babi dan Unggas (ekor), 2012-2016

Tahun	Sapi	Kerbau	Kambing	Babi	Unggas
2012	916	94	714	47.248	85.070
2013	1.097	103	674	45.518	98.160
2014	1.194	131	722	47.389	126.747
2015	987	91	818	31.168	115.767
2016	837	82	682	32.274	65.654

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2016 (diolah)



**b. Kelautan dan Perikanan**

Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan panjang garis pantai 1.402,66 km memiliki kekayaan laut yang luar biasa. Kawasan laut Mentawai masih ditutupi oleh hutan mangrove dan hamparan terumbu karang, sehingga biota laut yang ada di dalamnya dengan suburnya berkembang biak. Tabel 2.54 menunjukkan jumlah produksi ikan tangkap di perairan Mentawai.

Tabel 2.54  
Jumlah Nelayan dan Produksi Ikan Laut Kabupaten kepulauan Mentawai, 2012-2016

Tahun	Jumlah	
	Nelayan (orang)	Produksi Ikan Laut (ton)
2012	2.206	4.148
2013	2.149	5.278
2014	2.979	4.701
2015	3.130	5.252
2016	3.243	6.920

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2016 (diolah)

Potensi laut Kepulauan Mentawai senilai 7 triliun rupiah memang belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Mentawai terkhususnya masyarakat nelayan dan di wilayah pesisir. Penerapan teknologi tepat guna, kemampuan dan kemauan sumber daya masyarakat yang masih terbatas merupakan kendala utama dalam pengembangan sektor kelautan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

**c. Energi dan sumber daya mineral**

Energi merupakan hal mendasar yang sangat dibutuhkan oleh setiap masyarakat. Salah satu energi yang sangat dibutuhkan adalah listrik. Pasokan energi listrik di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih didominasi, disediakan dan didistribusikan oleh PLN. Tabel 2.55 menunjukkan jumlah masyarakat yang sudah menikmati/teraliri aliran listrik.

Tabel 2.55  
Jumlah Pelanggan Listrik dan Daya Tersambung, 2012-2016

Tahun	Pelanggan	Daya Tersambung (VA)
2012	4.537	4.316.198
2013	5.525	5.848.850
2014	5.525	5.848.850
2015	6.572	7.260.400
2016	6.572	7.260.400

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2016 (diolah)

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan akan energi listrik, begitu juga dengan keterbatasan daya tampung/beban aliran listrik, maka perlu adanya energi terbaru dan terbarukan untuk mengatasi ketergantungan pada energi listrik konvensional. Potensi pengembangan energi baru dan terbarukan sangat potensial dikembangkan di Kepulauan Mentawai. Potensi pengembangan energi biomassa baik berbahan bambu ataupun sampah (biogas), PLTS, PLMTH, bahkan pembangkit listrik tenaga gelombang laut sangat rasional dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pengembangan energi baru dan terbarukan tentunya dengan memperhitungkan *cost benefit* bagi masyarakat.

#### d. Pariwisata

Sektor pariwisata dapat dijadikan sebagai *core sector* dan menjadi salah satu pilar utama pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sektor pariwisata memberikan *multiplier effect* terhadap sektor lainnya seperti perdagangan, akomodasi, jasa-jasa bahkan sektor pertanian dan industri. Selain itu, diharapkan secara langsung sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi pada perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berwirausaha, dan pengentasan kemiskinan.

##### a). Kawasan Objek Wisata

Kabupaten Kepulauan Mentawai dikenal akan potensi pariwisatanya, kabupaten ini memiliki berbagai kawasan objek wisata yang sudah dikenal hingga penjuru dunia. Banyaknya jenis objek wisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dalam tabel berikut.

**Tabel 2.56**  
**Banyaknya dan jenis Objek Wisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016**

Tahun	Resort	Wisma	Penginapan	Jumlah
2012	13	12	32	57
2013	24	9	24	57
2014	24	9	24	57
2015	25	12	32	69
2016	25	12	32	69

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2016

##### b). Jumlah hotel/penginapan

Jenis kawasan objek wisata yang tersebar di pelbagai tempat/pulau di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah memunculkan beberapa industri pariwisata,



salah satunya berdirinya pelbagai resort, penginapan, dan wisma. Tabel 2.57 menunjukkan banyaknya resort, penginapan dan wisma yang telah berdiri sejak tahun 2012 hingga 2016.

**Tabel 2.57**  
**Banyaknya Resort, Wisma, dan Penginapan**  
**Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012-2016**

Tahun	Resort	Wisma	Penginapan	Jumlah
2012	13	12	32	57
2013	24	9	24	57
2014	24	9	24	57
2015	25	12	32	69
2016	25	12	32	69

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2016

#### d. Perdagangan

Kinerja pelayanan urusan perdagangan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Sektor perdagangan menyumbang 13 persen terhadap perkembangan PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2014 berada pada posisi kedua setelah sektor pertanian. Selama tahun 2014, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM telah menerbitkan 205 SIUP dari pelbagai bidang usaha. SIUP terbanyak diterbitkan untuk pedagang kecil yaitu sebanyak 179 SIUP (87,31 persen), sisanya 26 SIUP (12,69 persen) diterbitkan untuk pedagang menengah.

### 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah didefinisikan oleh Centre for Regional and Urban Studies (CURDS), Inggris sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya. Daya saing daerah menilai kemampuan suatu daerah untuk bersaing dengan daerah lain dalam memproduksi dan memasarkan barang dan jasanya.

Daya saing daerah menjadi salah satu aspek tujuan penyelenggaraan

otonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi, kekhasan, dan keunggulan dari daerah itu sendiri. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

## 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

### a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Analisis fokus kemampuan ekonomi daerah dilihat dari indikator kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Kepulauan Mentawai selama tahun 2010-2014 mengalami kenaikan sebesar 4,5 % per tahun. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita pada tahun 2013 sebesar 65,34%, meningkat pada tahun 2014 menjadi sebesar 86,43%. Peningkatan konsumsi rumah tangga per kapita tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya konsumsi barang dan jasa. Selain itu, membaiknya kondisi ekonomi masyarakat serta perkembangan ilmu dan teknologi mempengaruhi perubahan selera dan perilaku konsumsi masyarakat. Meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita lebih banyak ditopang oleh pengeluaran konsumsi pangan per kapita. Sedangkan pengeluaran konsumsi non pangan perkapita mengalami penurunan. Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga tahun 2011- 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.58  
Penggunaan Konsumsi Rumah Tangga dan Non Pangan per Kapita  
Tahun 2012–2015 Kabupaten Kepulauan Mentawai

Indikator	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	68.91	68.2	65.34	86.43
Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	31.09	65.3	34.66	13.57
Produktivitas total daerah	-	-	58.77	59.07

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai

### b. Nilai Tukar Petani

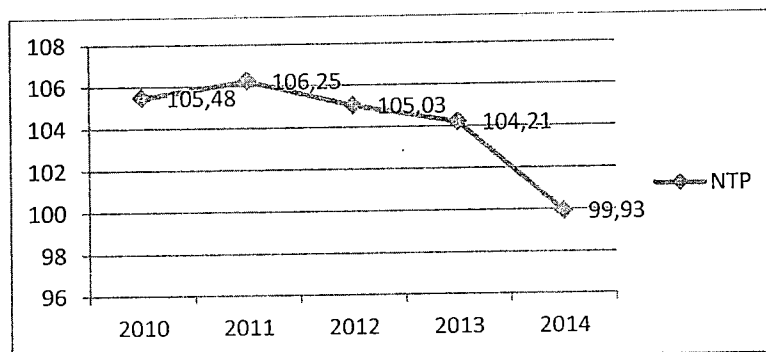
Nilai Tukar Petani merupakan nilai tukar (*term of trade*) antarbarang/produk pertanian dengan barang-barang konsumsi dan faktor produksi yang dibutuhkan

petani yang dinyatakan dalam persen. NTP berfluktuasi dari waktu ke waktu tergantung dari perkembangan harga barang yang dijual petani (It) dan barang dan jasa yang dikonsumsi petani (Ib). Apabila harga produk pertanian yang dihasilkan petani naik dengan persentase lebih besar dari persentase kenaikan barang dan jasa yang dibayar petani, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka NTP naik dan dengan sendirinya pendapatan petani naik relatif lebih besar dari kenaikan pengeluaran atau terjadi surplus. Dengan demikian secara konseptual, hubungan antara NTP dan pertambahan pendapatan petani sangat erat. Karena pendapatan petani sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan, maka NTP merupakan indikator yang relevan untuk menunjukkan perkembangan tingkat kesejahteraan petani. Secara umum ada tiga macam pengertian NTP yaitu:

- $NTP > 100$ , berarti petani mengalami **surplus**. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya; dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya.
- $NTP = 100$ , berarti petani mengalami **impas/breakeven**. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan.
- $NTP < 100$ , berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga barang produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya.

Perkembangan Rata-rata NTP subsektor tanaman pangan Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat dalam gambar berikut :

**Gambar 2.6**  
**Nilai Tukar Petani Kabupaten Kepulauan Mentawai**



**c. Produktifitas Total Daerah**

Produktifitas Total Daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktifitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (17 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. PDRB dihitung berdasarkan 17 (tujuh belas) sektor. Adapun produktivitas per sektor di Kabupaten Kepulauan Mentawai dari tahun 2012 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.59  
Produktifitas per Sektor di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2012-2016

No	Lapangan Usaha	Tahun (Juta Rupiah)									
		2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
1	Pertanian	1.074.513,7	50,82	1.128.611,2	50,47	1.167.404,01	49,39	1.218.327,1	49,05	1.272.047,2	48,78
2	Pertambangan dan Penggalian	36.719,0	1,74	39.246,6	1,75	40.856,74	1,73	42.454,65	1,71	44.676,02	1,71
3	Industri Pengolahan	75.526,4	3,57	80.571,1	3,60	84.938,64	3,60	87.690,38	3,53	92.801,64	3,56
4	Pengadaan Listrik dan Gas	434,6	0,02	465,1	0,02	546,88	0,02	572,38	0,02	630,78	0,02
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	70,1	0,003	76,2	0,003	83,05	0,004	87,51	0,004	93,63	0,004
6	Konstruksi	222.543,2	10,53	244.278,3	10,92	267.362,63	11,34	291.960,00	11,74	311.704,93	11,95
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	253.729,7	12,00	272.145,1	12,17	295.931,46	12,54	309.335,10	12,46	328.012,24	12,58
8	Transportasi dan Pergudangan	201.239,2	9,52	211.100,8	9,44	231.792,40	9,83	243.348,68	9,83	249.959,04	9,59
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12.612,2	0,60	13.152,8	0,59	14.293,76	0,61	15.332,44	0,62	17.264,61	0,66
10	Informasi dan Komunikasi	19.152,3	0,91	20.923,3	0,94	22.565,00	0,96	24.543,10	0,99	26.788,34	1,03
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.597,9	0,12	2.793,3	0,12	2.994,49	0,13	3.121,23	0,13	3.334,55	0,13
12	Real Estate	19.670,2	0,93	20.529,4	0,92	22.156,50	0,94	23.354,15	0,94	24.527,77	0,94
13	Jasa Perusahaan	918,3	0,04	1.009,0	0,05	1.111,24	0,05	1.194,62	0,05	1.258,90	0,05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	148.868,5	7,04	152.415,1	6,82	156.792,89	6,64	165.892,84	6,67	173.731,21	6,66
15	Jasa Pendidikan	18.877,4	0,89	20.639,8	0,92	21.845,65	0,93	23.531,56	0,95	25.478,39	0,98
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11.732,6	0,55	12.674,7	0,57	13.757,08	0,58	14.632,60	0,59	15.302,69	0,59



No	Lapangan Usaha	Tahun (Juta Rupiah)									
		2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
17	Jasa Lainnya	15.114,0	0,71	15.641,8	0,70	16.813.39	0,71	17.775.73	0,72	19.962.86	0,77
	JUMLAH	2.114.319,3		2.236.273,6		2.361.245.81		2.483.154.10		2.607.574.80	

Sumber : PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai 2012-2016

### 2.4.1 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

#### a. Jumlah Orang/Barang Pengguna Terminal/dermaga/bandara

Pertumbuhan jumlah orang/barang yang melalui terminal dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya kepemilikan kendaraan pribadi. Rasio panjang jalan dan jumlah orang yang melalui terminal tahun 2011-2015 dapat dilihat tabel berikut:

**Tabel 2.60**  
**Jumlah Orang/Barang Pengguna Terminal**  
**Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2012-2016**

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah orang/ barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	10,814,429	11,143,226	24,839,635	24,750,250	26,150,129

#### b. Sarana Perekonomian

Jumlah restoran di Kabupaten Kepulauan Mentawai lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah rumah makan. Pada tahun 2014 jumlah restoran sebesar 57 unit, bertambah menjadi 58 pada tahun 2016.

**Tabel 2.61**  
**Persentase Jumlah Penginapan/ Hotel Kabupaten Kepulauan Mentawai**  
**Tahun 2012-2016**

Indikator		2012	2013	2014	2015	2016
Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	unit	57	57	57	58	58

#### c. Jaringan Listrik

Energi listrik sudah menjadi kebutuhan setiap orang dan pemenuhan kebutuhan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Data rasio elektrifikasi per Desember 2016 sebesar 25 %

## 2.4.3 Potensi Unggulan Daerah

### 1. Pariwisata

Kepulauan Mentawai memiliki potensi sumber daya alam yang jika dikelola akan mampu memberi dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor pariwisata merupakan salah satu potensi yang dapat menggerakkan perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat, begitu juga pariwisata dapat dijadikan *core industry* pengembangan ekonomi masyarakat. Potensi ini merupakan daya tarik bagi wisatawan untuk datang ke Kabupaten Kepulauan Mentawai. Wisata yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri atas wisata bahari, alam dan budaya. Potensi objek wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari 21 objek wisata panorama, 29 objek wisata bahari, 25 objek wisata sumber air, dan 10 objek wisata budaya. Dalam tata ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai telah diidentifikasi beberapa kawasan pariwisata yang sangat potensial untuk dikembangkan secara terintegrasi, kawasan tersebut antara lain:

- a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya dan sejarah terdapat di Pulau Siberut yang meliputi kawasan Madobag dan Matotonan (Siberut Selatan), Simalegi dan Simatalu (Siberut Barat), Bojakan (Siberut Utara), Sagulubbek (Siberut Barat Daya), Benteng Peninggalan Jepang di Sioban (Sipora Selatan).
- b. Kawasan peruntukan pariwisata alam terdapat di pulau Siberut yang meliputi kawasan Sigapokna, Simalegi dan Simatalu (Siberut Barat), Bojakan (Siberut Utara), Sibudda Oinan (Siberut Tengah), Matotonan dan Madobag (Siberut Selatan), Katurei dan Sagulubbek (Siberut Barat Daya).
- c. Kawasan peruntukan pariwisata bahari terdapat di Silabu (Pagai Utara), Sikakap, Malakopa dan Sinakak (Pagai Selatan), Katiet, Bosua, Gobi dan Pulau Siruamata (Sipora Selatan), Mapaddegat, Teluk Pukarajat, Taraet dan Matuptuman (Sipora Utara), Teluk Katurei dan Taileleu (Siberut Barat Daya), Saibi Samukop dan Saliguma (Siberut Tengah), Sirilogui (Siberut Utara), dan Pulau-pulau kecil lainnya.
- d. Kawasan peruntukan ekonomi khusus pariwisata terdapat di Mapaddegat seluas 300 ha, Katiet, Gobi dan Bosua 100 ha, teluk Katurei 300 ha, Taraet 50 ha, Matuptuman Buggei Siata 50 ha.
- e. Kawasan peruntukan konservasi budaya terdapat di desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan dan Sakuddei Kecamatan Siberut Barat Daya, Simatalu



## 2. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan panjang garis pantai 1.402,66 km memiliki kekayaan laut yang luar biasa. Kawasan laut Mentawai masih ditutupi oleh hutan mangrove dan hamparan terumbu karang, sehingga biota laut yang ada di dalamnya dengan suburnya berkembang biak. Topografi wilayah Kepulauan Mentawai yang dikelilingi oleh laut, maka daerah ini memiliki potensi yang menjanjikan dari sektor perikanan. Sebanyak 3.843 orang masyarakat Kepulauan Mentawai berprofesi sebagai nelayan, dengan rincian 1.777 merupakan nelayan penuh (*full time*) sedangkan sisanya sebanyak 1.100 orang merupakan nelayan sambilan utama (paruh waktu) dan 966 merupakan nelayan sambilan tambahan. Pada tahun 2016 produksi ikan Kepulauan Mentawai sebanyak 6.920 ton atau meningkat 31,81% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 5.252 ton. Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki potensi lestari perikanan laut sebesar 269.682 ton/tahun.

## 3. Pertanian

Kekuatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai ada di sektor pertanian, jika dilihat dari struktur PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai, sektor pertanian memberikan kontribusi lebih dari 50 persen. Program cetak sawah menjadi program prioritas pembangunan dalam rangka ketahanan pangan daerah telah mengalami peningkatan baik dalam luas panen maupun total produksi yang telah dihasilkan. Produksi padi sawah untuk tahun 2016 sebesar 4.964,40 ton menurun 11 persen dibandingkan dengan produksi tahun 2015 sebesar 5.581,80 ton. Penurunan ini terjadi karena menurunnya luas panen sebesar 11,06% pada tahun 2016 dimana pada tahun 2015 seluas 1.329 Ha menjadi 1.182 Ha pada tahun 2016. Namun luas tanam meningkat dari 1.102 Ha pada tahun 2015 menjadi 1.312 Ha pada tahun 2016 atau meningkat 19,06% karena terjadinya peningkatan luas tambah tanam pada bulan Oktober, November dan Desember 2016. Sebagai daerah dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, Kepulauan Mentawai kedepan dengan penggunaan teknologi tepat guna tentunya akan mampu memberikan nilai tambah di setiap komoditi/produk hasil pertanian dan akan meningkatkan perekonomian petani Mentawai

### BAB III

## GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Gambaran pengelolaan keuangan daerah mencakup gambaran kinerja daerah tahun - tahun sebelumnya serta kerangka pendanaan. Gambaran pengelolaan keuangan daerah memberikan gambaran mengenai kemampuan anggaran daerah, Analisis keuangan Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan Laporan keuangan sekurang - kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya. kemampuan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung akan menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran pada masing - masing program yang dilaksanakan pada 5 (lima) tahun mendatang (tahun 2017 - 2022).

### 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan di masa lalu. Dari analisis kinerja masa lalu atau beberapa tahun kebelakang, maka akan diketahui rata - rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai analisis proyeksi keuangan kedepan. Kinerja keuangan masa lalu terdiri atas kinerja pelaksanaan APBD terdiri atas target dan realisasi pendapatan, target dan realisasi belanja, serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, sedangkan neraca keuangan daerah berupa perkembangan analisis keuangan daerah.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam pengelolaan keuangan daerah selalu diterapkan prinsip dan pendekatan serta norma yang berlaku secara universal, yaitu dilaksanakan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, keadilan, kepatutan dan nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu dianalisis kondisi kinerja

keuangannya (2011-2016), baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan dimasa yang akan datang.

Keuangan adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Daerah;
4. Pengeluaran Daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak - hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; serta
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan /atau kepentingan umum.

Kinerja keuangan Kabupaten Kepulauan Mentawai periode tahun 2012 – 2016 berdasarkan data kinerja 2012 sampai dengan tahun 2016 yang diperoleh dari beberapa laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

### **3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD**

Pada sub ini diuraikan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah.



## **A. Pendapatan**

Komponen Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
- 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Kapasitas Keuangan Daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dan pembiayaan. Realisasi pembiayaan pendapatan lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.1



**Tabel 3. 1**  
**Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012-2016**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata - rata pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1.	<b>Pendapatan</b>	<b>499.327.842.376,00</b>	<b>611.402.873.298,97</b>	<b>695.651.439.435,24</b>	<b>828.970.064.135,40</b>	<b>910.036.777.554,73</b>	14,96
1.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>34.639.147.838,00</b>	<b>34.107.433.404,97</b>	<b>36.444.071.105,24</b>	<b>42.784.854.485,40</b>	<b>41.948.183.104,73</b>	2,52
1.1.1	Pajak Daerah	-	550.210.341,00	1.218.827.095,00	1.914.098.926,00	2.528.057.529,00	19,64
1.1.2	Retribusi Daerah	-	1.695.579.490,00	1.141.016.350,00	3.221.894.589,00	4.476.774.736,00	12,42
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	18.947.340.275,00	18.810.197.957,00	18.320.739.909,00	16.053.664.399,00	16.458.524.634,00	-2,29
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	15.691.807.563,00	13.051.445.616,97	15.763.487.751,24	21.595.196.571,40	18.484.826.205,73	4,96
1.2.	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>426.328.473.272,00</b>	<b>548.935.197.115,00</b>	<b>633.613.063.838,00</b>	<b>692.519.176.491,00</b>	<b>820.329.757.364,00</b>	16,73
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	28.465.492.272,00	24.954.102.115,00	24.687.359.838,00	24.750.522.491,00	27.452.345.511,00	4,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	371.174.681.000,00	465.535.454.000,00	531.389.939.000,00	546.798.618.000,00	597.919.262.000,00	13,36
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	26.688.300.000,00	58.445.641.000,00	77.535.765.000,00	106.007.765.000,00	161.683.838.053,00	43,26
1.2.4	Alokasi Dana Desa dari APBN	0	0	0	14.962.271.000,00	33274311800	122,39
1.3	<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>38.360.221.266,00</b>	<b>28.360.242.779,00</b>	<b>25.594.304.492,00</b>	<b>93.666.033.159,00</b>	<b>47.758.837.086,00</b>	37,37
1.3.1	Hibah	0	0	0	57.131.101.159,00	20.000.000.000,00	-64,99
1.3.2	Dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah Daerah lainnya	15.959.704.266,00	16.753.052.779,00	21.738.230.492,00	24.349.161.000,00	27.038.837.086,00	11,46
	Dana Penyesuaian dan otonomi khusus	22.400.517.000,00	11.607.190.000,00	3.856.074.000,00	12.185.771.000,00	0	2,34
1.3.3	Bosnas	0	0	0	0	0	0
1.3.4	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah lainnya	0	0	0	0	720.000.000,00	0
1.3.5	Dana Tunjangan Pendidikan	0	0	0	0	0	0
1.3.6	DPIP	0	0	0	0	0	0
1.3.7	Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0

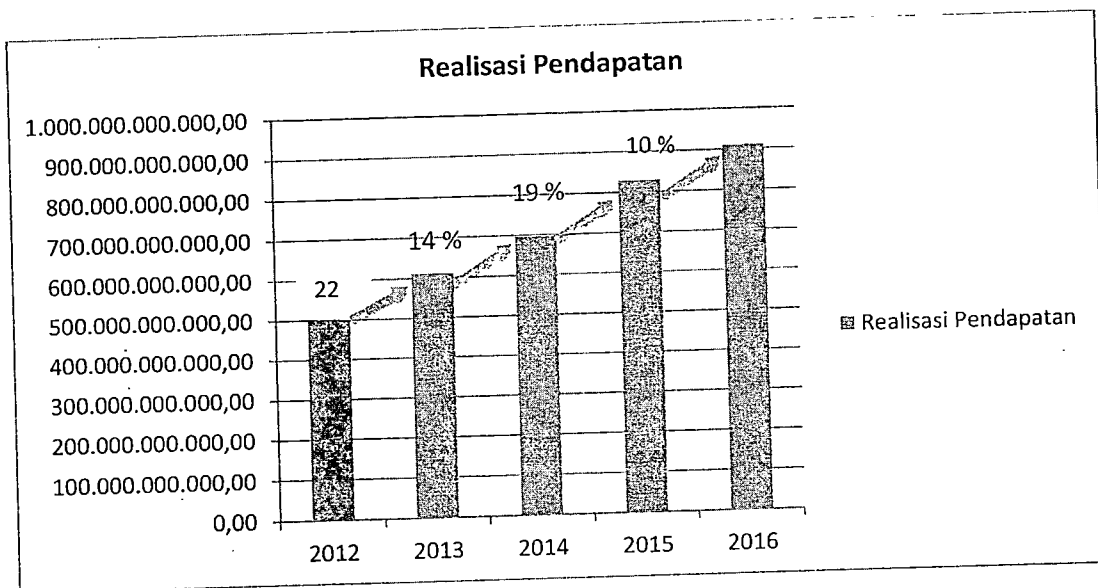
Sumber : BKD Kabupaten Kepulauan Mentawai

Realisasi Pendapatan Kabupaten Kepulauan Mentawai secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.1. Prosentase rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan diasumsikan dihasilkan berdasarkan perhitungan total dari selisih anggaran setiap tahun di bagi tahun dasar dikalikan 100%.

Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaen Kepulauan Mentawai selama kurun waktu 2011-2016 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pendapatan daerah tersebut dihasilkan dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Di tahun 2012 realisasi pendapatan mencapai Rp. Rp.499.327.842.376,00 atau sebesar 98,60%. Di tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 611.402.873.298,97 atau 97,66%. Di tahun 2014 pendapatan meningkat menjadi Rp. 695.651.438.435,24 atau sebesar 96,76%. Di tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 828.970.064.135,40, atau sebesar 96,82%, dan pendapatan meningkat terus di tahun 2016 menjadi Rp. 910.936.777.554,73, atau sebesar 96,06%. Berikut Gambar 3.1 yang merupakan grafik Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan tingkat pertumbuhannya :

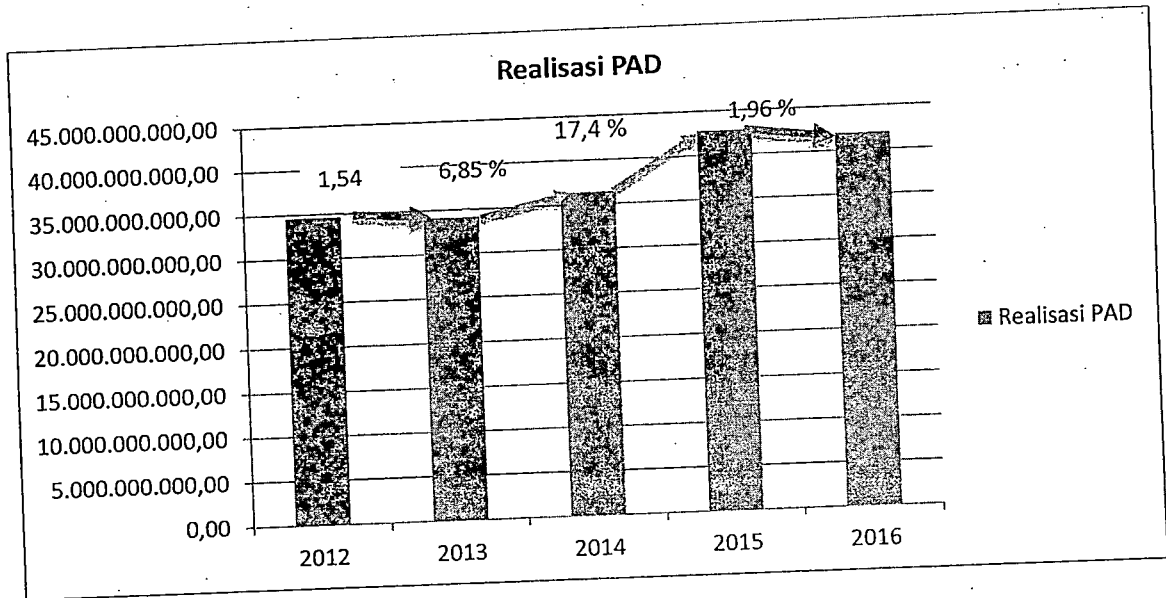
**Gambar 3. 1**  
**Realisasi Pendapatan dan Pertumbuhannya**



Untuk Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2012 -2016 mengalami penurunan dan kenaikan namun tidak signifikan. Pada tahun 2012 PAD sebesar Rp. 34.639.147.838,00, tahun 2013 menurun menjadi Rp.34.107.433.404,97, tahun 2014

meningkat menjadi Rp. 36.444.071.105,24, tahun 2015 meningkat menjadi Rp.42.784.854.485,40 dan tahun 2016 menurun menjadi Rp. 41.948.183.104,73. Kenaikan dan Pertumbuhan PAD Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut ini :

**Gambar 3. 2**  
**Realisasi PAD dan Pertumbuhannya**



## B. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Terdapat tiga elemen penting yang saling bersentuhan untuk diperhatikan dalam menentukan belanja daerah yaitu: masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan, pemerintah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan pembangunan serta DPRD sebagai mitra pemerintah daerah dibidang penyusunan peraturan daerah, penyusunan anggaran dan pengawasan. Hakekat anggaran belanja daerah adalah sebagai perwujudan dari amanah rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan untuk kesejahteraan rakyat. Namun demikian anggaran belanja daerah hingga saat ini masih dirasakan sangat terbatas, sehingga diperlukan skala prioritas dalam penggunaannya. Secara garis besar kendala utama dalam menyusun belanja daerah adalah tajamnya perbedaan antara kebutuhan pembiayaan program dan kegiatan pembangunan yang harus ditangani dengan kemampuan keuangan



daerah. Untuk itu diperlukan strategi dalam penyusunan Anggaran Belanja Daerah yaitu:

1. Penajaman skala prioritas pada kebutuhan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap capaian tingkat kesejahteraan;
2. Prioritas pada urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan arahan perencanaan baik RPJMD maupun RKPD; dan
3. Memperhatikan aspek politik dan sosial kemasyarakatan baik berskala daerah, regional maupun nasional.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja langsung, belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, seperti misalnya belanja barang dan jasa serta belanja modal. Adapun yang dimaksud dengan belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, seperti misalnya belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, .

Realisasi komponen belanja daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2012 mencapai Rp. 515.944.475.919,52, pada tahun 2013 meningkat sebesar Rp 596.536.434.912,72, pada tahun 2014 meningkat sebesar Rp 689.716.977.220,43, pada tahun 2015 Rp. 840.151.497.974,33 dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 990.803.893.245,45. Rincian Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai beserta pertumbuhannya disajikan sebagaimana pada Tabel 3.2 berikut:



**Tabel 3.2**  
**Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Beserta Pertumbuhannya**

No	Uraian	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>171.096.445.323,66</b>	<b>166.182.951.294,52</b>	<b>222.862.467.735,72</b>	<b>240.547.692.746,18</b>	<b>303.483.697.270,33</b>	<b>375.660.038.931,4</b>
1.1	Belanja Pegawai	146.316.517.273,66	146.727.599.744,52	187.338.843.105,72	197.223.784.107,18	224.247.845.837,33	247.261.933.451,4
1.2	Belanja Bunga	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0	0	0,00	567.400.000,00	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah	12.692.859.250,00	8.434.523.250,00	5.308.979.050,00	6.865.959.228,00	4.633.626.069,00	30.089.995.180,0
1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.494.301.000,00	418.225.000,00	232.370.000,00	2.558.940.000,00	307.300.000,00	291.600.000,00
1.6	Belanja Bagi Hasil	0	0	0,00	0,00	838.880.580,00	1.365.530.000,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan	4.300.000.000,00	6.594.518.800,00	29.483.275.580,00	31.630.384.411,00	73.456.044.784,00	96.650.980.300,0
1.8	Belanja Tak Terduga	1.292.767.800,00	4.008.084.500,00	499.000.000,00	1.701.225.000,00	0,00	0,00
2	<b>Belanja Langsung</b>	<b>275.648.117.121,68</b>	<b>349.761.524.625,00</b>	<b>373.673.967.177,00</b>	<b>449.169.284.474,25</b>	<b>536.667.800.704,00</b>	<b>615.143.854.314,0</b>
2.1	Belanja Pegawai	29.458.769.000,00	44.014.095.725,00	53.473.285.088,00	58.774.064.531,00	86.860.669.395,00	102.668.290.549,0
2.2	Belanja Barang dan Jasa	124.689.348.372,00	151.055.232.615,00	148.950.194.462,00	192.860.180.422,25	198.324.861.788,00	234.628.790.149,0
2.3	Belanja Modal	121.499.999.749,68	154.692.196.285,00	171.250.487.627,00	197.535.039.521,00	251.482.269.521,00	277.846.773.616,0
	<b>Total Belanja</b>	<b>446.744.562.445,34</b>	<b>515.944.475.919,52</b>	<b>596.536.434.912,72</b>	<b>689.716.977.220,43</b>	<b>840.151.497.974,33</b>	<b>990.803.893.245,4</b>

Sumber : BKD Kabupaten Kepulauan Mentawai

### 3.1.2 Neraca Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat pada masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai selama kurun waktu 2011-2016 seperti terlihat pada Tabel 3.3 dan dapat dijelaskan secara rinci, sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Perkembangan Neraca Daerah  
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2011-2016

URAIAN	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan/ Perlambatan
	2012	2013	2014	2015	2016	
<b>Asset</b>						
Asset Lancar	206.688,00	219.641,00	211.632,00	202.161,00	121.231,00	-10,67%
Investasi Jangka Panjang	66.268,00	68.792,00	81.503,00	82.972,00	83.219,00	10,27%
Aset Tetap	983.070,00	1.162.392,00	1.361.415,00	60.123.707,00	1.449.082,00	854,65%
Aset Lainnya	1.043,00	1.568,00	13.274,00	296.767,00	449.667,00	638%
Jumlah Asset	1.257.069,00	1.452.393,00	1.667.824,00	60.705.607,00	2.103.199,00	697%
<b>Kewajiban Dan Ekuitas</b>						
Kewajiban						



URAIAN	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan/ Perlambatan
	2012	2013	2014	2015	2016	
Kewajiban Jangka Pendek	0,00	590,00	0,00	373,00	380,00	-39,60%
Kewajiban Jangka Panjang	-					0,00%
Jumlah Kewajiban	-	590,00	-	373,00	380,00	-39,60%
Ekuitas Dana						
1. Ekuitas Dana Lancar	206.898,00	217.731,00	210.837,00	-	-	-22%
2. Ekuitas Dana Investasi	1.050.382,00	1.232.753,00	1.454.410,00	-	-	-9%
2. Ekuitas Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Jumlah Ekuitas Dana	1.257.280,00	1.450.484,00	1.665.247,00	-	-	-31%
Jumlah Ekuitas Dan Kewajiban Dana	1.257.280,00	1.451.074,00	1.665.247,00	373,00	380,00	-11,02%

Sumber : BKD Kabupaten Kepulauan Mentawai

Selama kurun waktu 2012-2016 jumlah aset mengalami perkembangan, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 697%. Aset tersebut terdiri atas: Aset lancar (kas, piutang dan persediaan), investasi jangka panjang (investasi non permanen dan investasi permanen); Aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan); Dana cadangan; Aset lainnya (tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, , aset tak berwujud). Semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

Kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak dimasa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang. Kewajiban Kabupaten Kepulauan Mentawai selama periode 2011-2016 rata-rata sebesar 39,50% pertahun.

Selanjutnya, tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Jenis rasio yang umum diterapkan pada sektor publik yaitu rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar (*current ratio*) merupakan rasio standar yang dipakai untuk menilai



likuiditas keuangan organisasi. Fungsi rasio lancar dalam hal berfungsi untuk menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Rasio kas (**cash ratio**) bermanfaat untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang yang harus dipenuhi dengan kas dan efek yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Adapun rasio lancar sama halnya dengan rasio kas tetapi memperhitungkan persediaan sebagai pengurang. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu. Rasio solvabilitas terdiri atas perhitungan rasio total hutang terhadap total aset, rasio utang terhadap ekuitas dan rasio utang terhadap aset modal. Rasio solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam rangka memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio utang terhadap ekuitas digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Sedangkan, rasio utang terhadap aset modal untuk mengetahui berapa bagian modal yang dapat digunakan untuk menjamin utang. Rata-rata pertumbuhan rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2011-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.4

Tabel 3.4  
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011 – 2016

No	Uraian	Tahun					2016
		2011	2012	2013	2014	2015	
<b>1.</b>	<b>Rasio Likuiditas</b>						
1.1	Rasio Lancar (Current Ratio)	615,5231487	0	372,17	0	541,57	318,45
1.2	Rasio Quick (Quick Ratio)	609,3732561	0	364,88	0	523,05	304,49
<b>2.</b>	<b>Rasio Solvabilitas</b>						
2.2	Rasio Total Hutang terhadap total Asset	0,000341408	0	0,000406334	0	6,14913	0,000181002
2.3	Rasio Hutang Terhadap Modal	0,000340369	0	0,000406869	0	0	0

Sumber : BKD Kabupaten Kepulauan Mentawai

Tabel 3.4 memperlihatkan bahwa Rasio Hutang terhadap Total Aset selama periode Tahun 2011-2016 sangat rendah demikian halnya juga rasio hutang terhadap modal. Ini berarti pengaruh hutang terhadap aktiva sangat amat kecil dan untuk melunasi hutang tidak perlu tergantung pembiayaan dari pihak lain.

### 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2011-2016.

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisa mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat

Pendapatan daerah merupakan salah satu unsur penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena besaran pendapatan pada suatu daerah menentukan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi penerimaan pendapatan daerah melalui intensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, peningkatan pelayanan dan kepatuhan wajib pajak melalui perbaikan regulasi, administrasi serta akuntabilitas dan dukungan fiskal dari provinsi dan pusat serta swasta. Sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan porsi pendapatan yang diperoleh melalui pelbagai upaya baik dalam bentuk pengenaan pajak dan retribusi daerah maupun usaha-usaha lain yang sah. Dengan kebijakan kreatif dan inovatif, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat ditingkatkan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dengan tetap mengurangi beban masyarakat.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, pengalokasian belanja pembangunan tidak lagi mengikuti asas money follow function tapi money follow program priority, artinya alokasi belanja terkonsentrasi untuk program prioritas yang secara nyata berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Kebijakan

belanja daerah diarahkan pada :

1. Efisiensi dan efektivitas anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Program/kegiatan prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program infrastruktur daerah, bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan SDM guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

3. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan skema pendanaan APBD kabupaten, provinsi dan pusat.

5. Transparansi dan akuntabel

Setiap belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

### 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Selama periode tahun 2014-2016, terjadi penurunan belanja aparatur dari Rp 330,433 juta pada tahun 2014 menjadi Rp. 375.228 juta lebih pada tahun 2016



dengan per tahun seperti yang diperlihatkan pada Tabel dibawah ini :

Tabel. 3.5  
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Kepulauan Mentawai  
Tahun 2012– 2016

No	Uraian	2014 (RP)	2015(Rp)	2016(Rp)
A	Belanja Tidak Langsung	206,205,298,463.00	224,247,845,837.00	247,261,933,431.00
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	132,465,141,662.00	130,268,258,184.33	143,807,940,979.45
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	72,432,156,801.00	92,587,587,653.00	101,674,492,472.00
3	Belanja Penerimaan Anggota dan pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	1,308,000,000.00	1,392,000,000.00	1,779,500,000.00
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah**)			
B	Belanja Langsung	124,228,469,151.00	94,501,543,318.00	127,966,740,598.00
1	Belanja Honorarium PNS**	20,532,756,509.00	20,973,647,600.00	22,620,632,600.00
2	Belanja Uang Lembur**)	27,223,000.00		37,392,000.00
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	9,718,442,250.00	1,868,492,000.00	1,035,789,000.00
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	3,593,400,995.00	3,050,517,400.00	4,023,943,388.00
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	111,778,500.00	6,557,985,030.00	5,959,635,430.00
6	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai ***)	9,042,285,905.00	12,103,099,286.00	13,790,625,358.00
7	Belanja Pakaian Dinas dan atributnya**)	400,997,600.00	762,129,250.00	784,332,055.00
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu *)	2,078,308,640.00	2,355,520,700.00	2,764,156,804.00
9	Belanja Perjalanan Dinas**)	78,532,393,137.00	45,890,363,322.00	75,957,649,977.00
10	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	-	-
11	Belanja Pemulangan Pegawai	-	-	-
12	Belanja Modal ( Kantor, Mobil Dinas, Meabelair, Peralatan dan Perlengkapan dll)	190,882,615.00	939.788.730,00	992.583.986,00
	TOTAL	330,433,767,614.00	318.749.389.155,00	375.228.674.029,00

Sumber : BKD Kabupaten Kepulauan Mentawai

Kebijakan penggunaan anggaran Kabupaten kepulauan Mentawai sudah semakin baik, hal ini terlihat dari, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dengan total belanja daerah. Tabel 3.6 memperlihatkan bahwa proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami penurunan dari 47,91 % pada tahun 2014 menjadi 37,87% pada tahun 2016, ni berarti semakin baik dan meningkatnya belanja kepeluan publik.

Tabel 3.6  
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran Belanja+ pembiayaan pengeluaran	Prosentase
1	Tahun anggaran 2014	330,433,767,614.00	689,716,977,220	47.91%
2	Tahun anggaran 2015	318,749,389,155.00	840,151,497,974	37.94%
3	Tahun anggaran 2016	375,228,674,029.00	990,803,893,245	37.87%

Sumber : BKD Kabupaten Kepulauan Mentawai

### 3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.

Pembiayaan daerah, digunakan untuk menutup adanya defisit anggaran. Perkembangan defisit anggaran Pemerintah Kabupaten Malang dalam kurun tahun 2012-2016 dapat digambarkan pada Tabel berikut :





Tabel 3.7  
Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2012– 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	499.327.842.376	611.402.873.299	695.651.439.435	828.970.064.135	910.036.777.555
	Dikurangi realisasi :					
2.	Belanja Daerah	515.944.475.920	596.536.434.913	689.716.977.220	840.151.497.974	990.803.893.245
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	12.743.000.000	2.523.920.000	18.000.000.000	2.000.000.000	0
A	<b>Surplus (Defisit) Riil</b>	<b>(29.359.633.544)</b>	<b>12.342.518.386</b>	<b>(12.065.537.785)</b>	<b>(13.181.433.839)</b>	<b>(80.767.115.691)</b>
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	232.325.620.488	203.120.986.945	213.677.010.584	201.611.472.800	188.430.038.961
2.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
B	<b>Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>232.325.620.488</b>	<b>203.120.986.945</b>	<b>213.677.010.584</b>	<b>201.611.472.800</b>	<b>188.430.038.961</b>
A-B	<b>Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan</b>	<b>202.965.986.945</b>	<b>215.463.505.331</b>	<b>201.611.472.799</b>	<b>188.430.038.961</b>	<b>107.662.923.270</b>

Sumber : BKD Kabupaten Kepulauan Mentawai

Selama periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang cenderung menurun, hal ini menandakan bahwa penyerapan pelaksanaan anggaran setiap tahunnya terdapat peningkatan. Adapun untuk Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kepulauan Mentawai seperti pada tabel berikut :



Tabel 3.8  
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	202.965.986.945	215.463.505.331	201.611.472.799	188.430.038.961	107.662.923.270
2.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0

Sumber : BKD Kabupaten Kepulauan Mentawai

Hasil analisis sisa lebih Pembiayaan Anggaran Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2012-2016, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran. Selanjutnya tidak terdapat kewajiban yang belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan dari tahun 2012 s/d 2016, sehingga saldo kas daerah pada Kabupaten Kepulauan Mentawai sama dengan sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran tahun berkenaan. Sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran berfluktuasi namun cenderung menurun.

Tabel 3.9  
Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan  
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Saldo kas neraca daerah	232.325.620.488	203.120.986.945	213.677.010.584	201.611.472.800	188.430.038.961
	Dikurangi	0	0	0	0	0
2.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	0	0	0	0
3.	Kegiatan Lanjutan	0	0	0	0	0
	Sisa Lebih (riil) pembiayaan anggaran	232.325.620.488	203.120.986.945	213.677.010.584	201.611.472.800	188.430.038.961

Sumber : Sumber : BKD Kabupaten Kepulauan Mentawai

### 3.3 Kerangka Pendanaan

Kebijakan penetapan besaran pagu belanja daerah dirumuskan dan disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari setiap program yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program. Oleh karena itu, mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang tersedia setiap tahun, diharapkan program-program yang dibiayai akan memberi dampak positif dan daya ungkit yang signifikan dalam memecahkan berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam 5 (lima) tahun kedepan. Terkait dengan hal tersebut diatas, maka untuk mendukung analisis terhadap proyeksi pendapatan, proyeksi belanja dan proyeksi pembiayaan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan perlu dilakukan analisis terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam 5 (lima) tahun yang lalu. Analisis ini sangat penting dalam upaya untuk mendapatkan gambaran tentang besaran anggaran belanja dan pembiayaan yang telah disediakan untuk periode dimaksud serta langkah-langkah kebijakan yang telah dirumuskan untuk mencapainya, termasuk dukungan terhadap pencapaian target sasaran prioritas nasional dan program prioritas provinsi.

#### **Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama**

Belanja yang wajib dibayarkan dan tidak dapat ditunda pembayarannya dan harus dibayarkan dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak boleh menjadi hutang untuk tahun berikutnya merupakan pengeluaran periodik dan mengikat. Dengan demikian peningkatan pengeluaran periodik wajib selama ini masih dalam batas yang dapat dikendalikan :

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, atau belanja sejenis lainnya



Tabel 3.10  
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama  
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2014 – 2016

No	Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
A	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>206,205,298,463.00</b>	<b>224,247,845,837.00</b>	<b>247,261,933,431.00</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	132,465,141,662.00	130,268,258,184.33	143,807,940,979.45
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	72,432,156,801.00	92,587,587,653.00	101,674,492,472.00
3	Belanja Penerimaan Anggota dan pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	1,308,000,000.00	1,392,000,000.00	1,779,500,000.00
B	<b>Belanja Langsung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C	<b>Pembiayaan Pengeluaran</b>	<b>18,000,000,000</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>18,000,000,000</b>
	Penyertaan Modal	18,000,000,000	2,000,000,000	18,000,000,000
	<b>TOTAL</b>	<b>224,205,298,463.00</b>	<b>226,247,845,837.00</b>	<b>265,261,933,431.00</b>

Sumber : BKD Kabupaten Kepulauan Mentawai

### 3.3.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2017-2022

Asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi pendapatan selama 5 (lima) tahun ke depan di atas adalah:

- Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi wajib pajak dan retribusi;
- Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari pemerintah pusat, terjadi kecenderungan kenaikan dana perimbangan setiap tahun, dengan uraian sebagai berikut:
  - DAU cenderung meningkat setiap tahun seiring kebijakan kenaikan gaji pegawai;
  - Pemerataan dana bagi hasil pajak / bukan pajak mengalami kenaikan setiap tahun.
- Sesuai peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat menganggarkan defisit.
- Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan setiap tahun. Berdasarkan hasil forecasting menurut data eksisting dan asumsi, didapat proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2017-2022 sebagai berikut:

**Tabel 3.11**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	<b>Pendapatan</b>	<b>921,694,764,051</b>	<b>914,531,060,088</b>	<b>970,486,461,617</b>	<b>993,441,863,146</b>	<b>1,014,397,264,675</b>	1,035,352,666,204
1.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	52,842,958,051	41,948,183,305	52,842,958,051	63,737,732,797	74,632,507,543	85,527,282,289
1.1.1	Pajak Daerah	3,920,000,000	2,528,057,529	3,920,000,000	5,311,942,471	6,703,884,942	8,095,827,413
1.1.2	Retribusi Daerah	7,525,976,224	4,476,774,936	7,525,976,224	10,575,177,512	13,624,378,800	16,673,580,088
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	19,215,000,000	16,458,524,634	19,215,000,000	21,971,475,366	24,727,950,732	27,484,426,098
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	22,181,981,827	18,484,826,206	22,181,981,827	25,879,137,448	29,576,293,069	33,273,448,690
1.2.	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>753,360,204,000</b>	<b>798,151,492,000</b>	<b>840,459,384,000</b>	<b>849,767,276,000</b>	<b>858,075,168,000</b>	866,383,060,000
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	21,246,752,000	16,488,450,000	21,246,752,000	26,005,054,000	29,763,356,000	33,521,658,000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	597,919,262,000	610,939,918,000	611,960,574,000	612,981,230,000	613,001,886,000	613,022,542,000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	134,194,190,000	134,260,000,000	134,325,810,000	134,391,620,000	134,457,430,000	134,523,240,000
	Dana Alokasi Fisik	-	36,463,124,000	72,926,248,000	76,389,372,000	80,852,496,000	85,315,620,000
1.2.4	Alokasi Dana Desa dari APBN		-	-	-	-	-
1.3	<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>115,491,602,000</b>	<b>74,431,384,783</b>	<b>77,184,119,566</b>	<b>79,936,854,349</b>	<b>81,689,589,132</b>	83,442,323,915
1.3.1	Hibah	-		-	-	-	-



## RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.3.2	Dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah Daerah lainnya **)	27,059,251,000	29,164,488,783	30,269,726,566	31,374,964,349	32,480,202,132	33,585,439,915
	Dana Penyesuaian dan otonomi khusus	46,812,952,000		-	-	-	-
1.3.3	BOSNAS	0	0	-	-	-	-
1.3.4	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah lainnya	0	0	-	-	-	-
1.3.5	Dana Tunjangan Pendidikan	0	0	-	-	-	-
1.3.6	DPIP	0	0	-	-	-	-
1.3.7	Dana Desa	41,619,399,000	45,266,896,000	46,914,393,000	48,561,890,000	49,209,387,000	49,856,884,000

Sumber : BKD Kabupaten Kepulauan Mentawai



## **b. Proyeksi Belanja**

Rumusan kebijakan belanja daerah, ditetapkan melalui pendekatan belanja proporsional, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan dilaksanakan dengan berpedoman pada anggaran berbasis kinerja serta berdasarkan kepada agenda-agenda pembangunan yang secara umum dapat dirincikan melalui:

1. Mendanai program-program yang bersifat strategis dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
2. Pencapaian rencana pembangunan yang tercantum dalam RPJMD 2017-2022.
3. Mendanai kegiatan program prioritas untuk mendukung capaian target visi dan misi pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan program prioritas dalam rangka pencapaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.

Cara memproyeksi untuk belanja daerah sama dengan cara seperti yang digunakan untuk proyeksi pendapatan. Sementara itu, dari total proyeksi pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun anggaran sebagaimana telah disajikan pada tabel diatas, selanjutnya akan dipergunakan untuk membiayai belanja selama 5 (lima) tahun kedepan baik untuk belanja tidak langsung, maupun belanja langsung. Proyeksi belanja daerah tersebut memperhatikan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- a. Kebutuhan belanja pegawai selalu meningkat setiap tahun sebagai akibat dari kenaikan gaji, tunjangan sertifikasi, dan tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai.
- b. Kebutuhan belanja publik yang semakin meningkat sebagai upaya pencapaian visi misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2017-2022
- a. Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja.

Berdasarkan agenda pembangunan dan asumsi tersebut di atas, maka proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung dimaksud, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.12

## Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022

Uraian	Tahun					2022
	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>375,847,868,951</b>	<b>376,035,792,885</b>	<b>376,223,810,782</b>	<b>376,411,922,687</b>	<b>376,600,128,649</b>	<b>376,788,428,713</b>
Belanja Pegawai	247,385,564,418.18	247,509,257,200.39	247,633,011,828.99	247,756,828,334.90	247,880,706,749.07	248,004,647,102.44
Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Hibah	30,105,040,177.59	30,120,092,697.68	30,135,152,744.03	30,150,220,320.40	30,165,295,430.56	30,180,378,078.28
Belanja Bantuan Sosial	291,745,800.00	291,891,672.90	292,037,618.74	292,183,637.55	292,329,729.36	292,475,894.23
Belanja Bagi Hasil	1,366,212,765.00	1,366,895,871.38	1,367,579,319.32	1,368,263,108.98	1,368,947,240.53	1,369,631,714.15
Belanja Bantuan Keuangan	96,699,305,790.15	96,747,655,443.05	96,796,029,270.77	96,844,427,285.40	96,892,849,499.04	96,941,295,923.79
Belanja Tak Terduga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Belanja Langsung</b>	<b>615,451,426,241.16</b>	<b>615,759,151,954.28</b>	<b>616,067,031,530.26</b>	<b>616,375,065,046.02</b>	<b>616,683,252,578.54</b>	<b>616,991,594,204.83</b>
Belanja Pegawai	102,719,624,694.28	102,770,984,506.62	102,822,369,998.88	102,873,781,183.87	102,925,218,074.47	102,976,680,683.50
Belanja Barang dan Jasa	234,746,104,544.07	234,863,477,596.35	234,980,909,335.15	235,098,399,789.81	235,215,948,989.71	235,333,556,964.20
Belanja Modal	277,985,697,002.81	278,124,689,851.31	278,263,752,196.24	278,402,884,072.33	278,542,085,514.37	278,681,356,557.13
<b>Total Belanja</b>	<b>991,299,295,192.07</b>	<b>991,794,944,839.67</b>	<b>992,290,842,312.09</b>	<b>992,786,987,733.25</b>	<b>993,283,381,227.11</b>	<b>993,780,022,917.73</b>

Sumber : BKD Kabupaten Kepulauan Mentawai





Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan serta surplus / defisit diproyeksi. Pada tabel 3.13 menggambarkan bahwa mengalami defisit setiap tahun karena belanja lebih besar dari pendapatan, namun dapat ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Tabel 3. 13  
Proyeksi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2017-2022

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Pendapatan</b>	<b>921,694,764,051</b>	<b>914,531,060,088</b>	<b>970,486,461,617</b>	<b>993,441,863,146</b>	<b>1,014,397,264,675</b>	<b>1,035,352,666,204</b>
Pendapatan Asli Daerah	52,842,958,051	41,948,183,305	52,842,958,051	63,737,732,797	74,632,507,543	85,527,282,289
Dana Perimbangan	753,360,204,000	798,151,492,000	840,459,384,000	849,767,276,000	858,075,168,000	866,383,060,000
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	115,491,602,000	74,431,384,783	77,184,119,566	79,936,854,349	81,689,589,132	83,442,323,915
<b>Belanja</b>	<b>991,299,295,192</b>	<b>983,594,944,840</b>	<b>992,290,842,312</b>	<b>992,786,987,733</b>	<b>993,283,381,227</b>	<b>993,780,022,918</b>
Belanja Tidak Langsung	375,847,868,951	372,035,792,885	376,223,810,782	376,411,922,687	376,600,128,649	376,788,428,713
Belanja Langsung	615,451,426,241	611,559,151,954	616,067,031,530	616,375,065,046	616,683,252,579	616,991,594,205
Surplus/ (Defisit)	(69,604,531,141)	(69,063,884,752)	(21,804,380,695)	654,875,413	21,113,883,448	41,572,643,286
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>						
SILPA	107,662,923,270	87,662,923,270	77,662,923,270	67,662,923,270	57,662,923,270	47,662,923,270
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>						
Penyertaan Modal	18,000,000,000	18,000,000,000	18,000,000,000	18,000,000,000	18,000,000,000	18,000,000,000

Sumber : BKD Kabupaten Kepulauan Mentawai

Proyeksi terhadap pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Belanja wajib dan mengikat ini merupakan belanja yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya, seperti gaji dan tunjangan pegawai, bunga, belanja kantor, dan belanja sejenisnya. Sedangkan belanja prioritas utama merupakan belanja yang digunakan dalam rangka keberlangsungan layanan dasar pemerintah daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan.



Tabel. 3.14  
Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama  
Kabupaten Kepulauan Mentawai, tahun 2017 – 2022

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	247,385,564,398	247,509,257,180	247,633,011,809	247,756,828,314	247,880,706,729	248,004,647,082
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	143,879,844,950	143,951,784,872	144,023,760,765	144,095,772,645	144,167,820,532	144,239,904,442
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	101,725,329,718	101,776,192,383	101,827,080,479	101,877,994,020	101,928,933,017	101,979,897,483
3	Belanja Penerimaan Anggota dan pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	1,780,389,750	1,781,279,945	1,782,170,585	1,783,061,670	1,783,953,201	1,784,845,178
B	<b>Belanja Langsung</b>	-	-	-	-	-	-
C	<b>Pembiayaan Pengeluaran</b>	18,009,000,000	18,018,004,500	18,027,013,502	18,036,027,009	18,045,045,023	18,054,067,545
	Penyertaan Modal	18,009,000,000	18,018,004,500	18,027,013,502	18,036,027,009	18,045,045,023	18,054,067,545
	<b>TOTAL</b>	265,394,564,398	265,527,261,680	265,660,025,311	265,792,855,323	265,925,751,751	266,058,714,627

### 3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan maka dilakukan analisa perhitungan kerangka pendanaan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan (2017-2022) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berikut ini disajikan Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022.

Tabel. 3.15  
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai  
Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Pendapatan</b>	921,694,764,051	914,531,060,088	970,486,461,617	993,441,863,146	1,014,397,264,675	1,035,352,666,204
Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-	0



Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	107,662,923,270	87,662,923,270	77,662,923,270	67,662,923,270	57,662,923,270	47,662,923,270
Total Penerimaan	1,029,357,687,321	1,002,193,983,358	1,048,149,384,887	1,061,104,786,416	1,072,060,187,945	1,083,015,589,474
Dikurangi						
Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	265,394,564,398	265,527,261,680	265,660,025,311	265,792,855,323	265,925,751,751	266,058,714,627
<b>Kapasitas riil kemampuan keuangan</b>	<b>763,963,122,923</b>	<b>736,666,721,678</b>	<b>782,489,359,576</b>	<b>795,311,931,093</b>	<b>806,134,436,194</b>	<b>816,956,874,847</b>

Berdasarkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah agar dalam mengalokasikan anggaran benar-benar sesuai dengan prioritas daerah. Selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam 3 Kelompok Prioritas, yaitu Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III. Rencana alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 menurut kelompok prioritas disajikan melalui Tabel berikut :

Tabel. 3.16  
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2017– 2022

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kapasitas Keuangan Daerah</b>	<b>1,029,357,687,321</b>	<b>1,002,193,983,358</b>	<b>1,048,149,384,887</b>	<b>1,061,104,786,416</b>	<b>1,072,060,187,945</b>	<b>1,083,015,589,474</b>
<b>Prioritas I (wajib dan mengikat)</b>	<b>265,394,564,398</b>	<b>265,527,261,680</b>	<b>265,660,025,311</b>	<b>265,792,855,323</b>	<b>265,925,751,751</b>	<b>266,058,714,627</b>
Belanja Tidak Langsung	247,385,564,398	247,509,257,180	247,633,011,809	247,756,828,314	247,880,706,729	248,004,647,082
Belanja Langsung	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	18,009,000,000	18,018,004,500	18,027,013,502	18,036,027,009	18,045,045,023	18,054,067,545
<b>Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan</b>	<b>763,963,122,923</b>	<b>736,666,721,678</b>	<b>782,489,359,576</b>	<b>795,311,931,093</b>	<b>806,134,436,194</b>	<b>816,956,874,847</b>
<b>Rencana Alokasi Prioritas II</b>	<b>599,600,000,000</b>	<b>599,899,800,000</b>	<b>600,199,749,900</b>	<b>600,499,849,775</b>	<b>600,800,099,700</b>	<b>601,100,499,750</b>
Belanja Program Prioritas dalam rangka pencapaian visi misi KDH	403,400,000,000	403,601,700,000	403,803,500,850	404,005,402,600	404,207,405,302	404,409,509,004
Belanja Program Prioritas Pembangunan Daerah	196,200,000,000	196,298,100,000	196,396,249,050	196,494,447,175	196,592,694,398	196,690,990,745



Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rencana Alokasi Prioritas III	128,462,304,533	128,526,535,685	128,590,798,953	128,655,094,352	128,719,421,900	128,783,781,610
Belanja Hibah	30,105,040,178	30,120,092,698	30,135,152,744	30,150,220,320	30,165,295,431	30,180,378,078
Belanja Bantuan Sosial	291,745,800	291,891,673	292,037,619-	292,183,638	292,329,729	292,475,894
Belanja Bagi Hasil	1,366,212,765	1,366,895,871.38	1,367,579,319.32	1,368,263,108.98	1,368,947,240.53	1,369,631,714
belanja Desa	96,699,305,790	96,747,655,443	96,796,029,271	96,844,427,285	96,892,849,499	96,941,295,924

## BAB IV

### ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

#### 4.1 Permasalahan Pembangunan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa yang lalu sebagai upaya untuk mengetahui alternatif strategi yang harus dilakukan di masa yang akan datang untuk mengantisipasi atau mengatasi potensi masalah yang ada.

Identifikasi permasalahan pembangunan ini diuraikan berdasarkan urusan dan yang dianggap memiliki pengaruh yang kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya.

Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Mentawai saat ini dan ke depan, terdapat dua masalah (dan sekaligus potensi) pembangunan yang harus menjadi titik perhatian. Pertama adalah masalah kemiskinan dan ketertinggalan, dimana dari data BPS 2016 di Kabupaten Kepulauan Mentawai angka kemiskinan masih tercatat sejumlah 15,12%. Sehingga hal ini harus mendapatkan penanganan yang serius mengingat jumlahnya merupakan kemiskinan tertinggi dan termasuk daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat. Kedua adalah dari sisi geografis dan historis, dimana Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah kepulauan yang memiliki potensi pariwisata yang luar biasa besar. Sehingga, optimalisasi potensi ini menjadi sangat diperlukan, utamanya untuk mengangkat popularitas dari lokasi-lokasi wisata tersebut baik ke tingkat nasional maupun internasional, serta memberikan dampak ekonomi secara langsung kepada masyarakat sekitar lokasi wisata.



Penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam lima tahun terakhir telah menunjukkan capaian yang positif. Walaupun demikian, sasaran pembangunan daerah yang kompleks dan hasil pembangunan belum mampu memenuhi seluruh kehendak publik. Hal ini menimbulkan beberapa masalah pembangunan yang harus diatasi dan menjadi refleksi bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan.

Adapun permasalahan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai menurut urusan pemerintah daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### 1. Pendidikan;

Dalam rangka pembangunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah bidang pendidikan. Permasalahan bidang pendidikan dapat dilihat dari indikator bidang pendidikan, seperti angka melek huruf yaitu 97,59 %, yang artinya masih ada 2,41% masyarakat Kabupaten kepulauan Mentawai yang buta huruf. Rata-rata lama sekolah masih sebesar 6,27 dari target yang ingin dicapai 8,25. Indikator lainnya yang perlu diperhatikan antara lain angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, rasio guru, cakupan layanan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan dan sebagainya. Kualitas sumber daya manusia merupakan variabel strategi utama yang berpengaruh signifikan terhadap upaya percepatan proses pembangunan. Kondisi ini juga merupakan dampak dari tidak meratanya tingkat penyebaran sekolah di seluruh kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Beberapa permasalahan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Akses dan kualitas serta relevansi pendidikan yang masih rendah
2. Profesionalisme guru masih rendah dan distribusinya belum merata
3. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas masih terbatas
4. Sarana prasarana pendidikan belum memenuhi SPM (laboratorium, ruang kelas, perpustakaan dan ruang guru/kepala sekolah)
5. Manajemen dan tata kelola pendidikan belum efektif

#### 2. Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum sepenuhnya meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat. Hal ini tercermin dari masih tingginya kurang gizi atau gizi buruk pada balita mencapai lebih dari 15 persen. Di samping itu, juga masih minimnya tenaga kesehatan, sehingga dapat mempengaruhi terhadap layanan kesehatan masyarakat. Ketersediaan prasarana dan tenaga kesehatan yang terbatas pasca gempa ikut berpengaruh terhadap rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Angka harapan hidup sebesar 64,05 masih belum memenuhi angka yang ditargetkan sebesar 68,80. Hal ini berdampak pada upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak akan tercapai. Selanjutnya permasalahan kesehatan juga terjadi karena belum meratanya tingkat penyebaran pelayanan kesehatan di seluruh kecamatan dan masih kurangnya ketersediaan air bersih di masyarakat.

Beberapa permasalahan di bidang kesehatan adalah :

1. Status kesehatan ibu dan anak masih rendah
2. Status gizi masyarakat masih rendah
3. Angka kesakitan dan kematian akibat penyakit masih tinggi
4. Ketersediaan tenaga kesehatan masih terbatas
5. Keterseidaan abat dan pengawasan obat – makanan masih terbatas
6. Pemberian Jaminan perlindungan kesehatan masyarakat masih terbatas
7. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum optimal
8. Manajemen Pembangunan kesehatan belum efektif
9. Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan masih rendah

### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Keberadaan prasarana jalan dan jembatan yang menghubungkan antar pusat kegiatan belum dapat melayani kebutuhan masyarakat, karena jaringan jalan yang ada hanya terdapat di pulau-pulau besar saja atau belum terhubungnya antar pusat kegiatan kecamatan yang berada dalam satu pulau dengan jaringan jalan. Beberapa pulau masih ada yang belum mempunyai jaringan jalan, sehingga penduduk maupun pengunjung yang akan mengunjungi daerah-daerah tersebut harus menempuh berjam-jam dengan berjalan kaki atau menggunakan transportasi laut.

Beberapa permasalahan di bidang Pekerjaan Umum adalah :

1. Belum memadai jaringan jalan yang tersedia di Kabupaten Kepulauan Mentawai



2. Rendahnya kualitas jalan yang tersedia di Kabupaten Kepulauan Mentawai
3. Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan irigasi / rawa
4. Belum optimalnya layanan air baku
5. Tingginya intensitas bencana banjir, kekeringan dan abrasi pantai
6. Masih rendahnya pengendalian abrasi pantai

Implementasi perda RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai yang masih belum maksimal menjadi permasalahan dalam rencana tata ruang wilayah sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga pembangunan ruang saat ini belum dipahami dengan baik dan menyeluruh. Perencanaan tata ruang sebagai proses untuk menentukan struktur dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, susunan pusat-pusat pemukiman penduduk dan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah guna peruntukan bagi fungsi lindung dan fungsi budidaya belum sepenuhnya memperhatikan kawasan strategis nasional, provinsi dan kabupaten. Konflik yang sering muncul dalam penyusunan dan pelaksanaan tata ruang adalah dalam penentuan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dalam hal ini, antar sektor dan instansi sering tidak terdapat kesepakatan. Pengertian dan batasan kawasan lindung antara Departemen Kehutanan, Badan Pertanahan dan Pemerintah Daerah sering terdapat perbedaan. Demikian juga halnya dengan masyarakat (adat). Akibatnya sering terjadi benturan dalam penentuan kawasan lindung dan budidaya. Kondisi ini menyebabkan rumitnya penyusunan dokumen perencanaan tata ruang dan implementasinya di lapangan. Ketidakkonsistenan terhadap rencana tata ruang menyebabkan rencana tersebut tidak berjalan yang berujung pada tidak tertibnya pemanfaatan ruang dalam pembangunan. Kondisi ini juga ditemui di lapangan, termasuk pelanggaran peruntukan lahan yang dilaksanakan oleh aparaturnya sendiri, sehingga perlu dilakukan upaya untuk senantiasa mengacu pada rencana tata ruang yang ada. Karakteristik Kepulauan Mentawai yang merupakan daerah gugusan pulau merupakan karakteristik tersendiri yang membutuhkan perencanaan tata ruang berbasis spesifikasi gugusan kepulauan dengan pulau kecil. Perencanaan dengan karakteristik ini harus menjadi pertimbangan utama dalam RTRW yang sedang disusun. RTRW Kepulauan Mentawai juga harus memasukkan kawasan rawan bencana serta kawasan wilayah pesisir dan laut dalam satu kesatuan rencana tata





ruang. Beberapa permasalahan di bidang tata ruang adalah :

1. Belum selesainya penyusunan penataan ruang daerah
2. Belum optimalnya pembinaan penataan ruang
3. Belum adanya sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan antar wilayah untuk pemanfaatan ruang
4. Belum tersedianya instrument pengendalian ruang untuk penataan ruang
5. Belum terbentuknya pengawasan penataan ruang

#### 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kebutuhan akan perumahan dan permukiman akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, kemajuan pembangunan daerah dan peningkatan teknologi. Masih banyaknya rumah tidak layak huni yang tersebar di seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi salah satu masalah di bidang perumahan. Permasalahan untuk pusat kegiatan wilayah/lokal seperti Tuapeijat adalah ketersediaan air bersih. Air bersih merupakan kebutuhan bagi masyarakat, terutama di wilayah pusat kegiatan. Dalam era otonomi daerah ini, pembangunan sarana dan prasarana air bersih dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Kondisi objektif di lapangan, tidak semua kecamatan memiliki sumber air bersih yang bisa diolah untuk mencukupi kebutuhan penduduknya. Peningkatan pembangunan jumlah rumah tinggal baru dikawasan yang baru tumbuh dan berubah fungsi di kawasan pusat kegiatan, jelas memerlukan pasokan air bersih untuk minum, mandi dan cuci yang relatif besar. Pemerintah ataupun swasta perlu bergerak dalam pengadaan air bersih. Selain itu untuk bidang prasarana adalah permasalahan drainase dan limbah di setiap pusat kegiatan yang ada di kecamatan, walaupun saat ini belum menjadi permasalahan besar, namun perlu direncanakan dengan baik dan sesuai dengan tata ruang wilayah. Semestinya sarana dan prasarana minimum yang harus dimiliki daerah seperti Tuapeijat adalah pelabuhan laut regional/lokal, pasar lokal, rumah sakit umum tipe C, serta prasarana perumahan dan permukiman yang meliputi jaringan air minum, tempat pembuangan akhir sampah, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT).

Beberapa permasalahan di bidang perumahan dan kawasan pemukiman sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penataan kawasan pemukiman di Kabupaten Kepulauan Mentawai



2. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kawasan pemukiman
3. Banyaknya masyarakat yang belum memiliki perumahan yang layak huni
4. Belum terpenuhinya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang aman
5. Semakin luasnya pemukiman kumuh
6. Akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan terbatas
7. Kelembagaan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan pemukiman belum tersedia

#### 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Ketidakadaan SOP maupun SPM perlindungan masyarakat membuat pemerintah tidak dapat bekerja maksimal dalam menciptakan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Adapun beberapa permasalahan yang di Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :

1. Belum optimalnya perlindungan kepada masyarakat, masyarakat hukum adat dan tenaga kerja
2. Belum optimalnya pola pembinaan dan koordinasi/kerjasama dengan lembaga keamanan
3. Masih rendahnya sistem pengawasan dan pengendalian daerah
4. Masih rendahnya fungsi koordinasi pemerintah daerah

#### 6. Sosial

Adanya pemberdayaan komunitas adat terpencil merupakan salah satu cara untuk memberdayakan masyarakat yang berada jauh dari kehidupan modern. Serta Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk membantu dan memberdayakan masyarakat yang memiliki masalah kesejahteraan sosial.

Beberapa permasalahan sosial di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Kurang akuratnya data masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial
2. Belum maksimalnya program pemberdayaan komunitas adat.

#### 7. Tenaga Kerja;

Sebagian besar masalah ketenagakerjaan berkaitan dengan kurangnya lapangan pekerjaan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (terkait pendidikan) juga menjadi alasan masyarakat kabupaten kepulauan Mentawai kurang mampu bersaing dengan masyarakat yang berasal dari luar untuk memperoleh pekerjaan.

Beberapa masalah yang terkait ketenaga kerjaan adalah :

1. Kurangnya lapangan kerja
2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia

#### 8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Pemberdayaan perempuan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan. Perlindungan anak diarahkan untuk mewujudkan suatu kondisi yang menjamin hak dan tumbuh kembang anak. Beberapa permasalahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain :

1. Kapasitas kelembagaan PUG masih terbatas
2. Pemberdayaan perempuan belum optimal
3. Kapasitas kelembagaan perlindungan anak masih terbatas

#### 9. Ketahanan Pangan;

Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang wajib diperhatikan oleh pemerintah daerah. Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki sumber pangan lokal yang masih belum mampu dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun menambah pendapatan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan pada bidang ketahanan pangan antara lain :

1. Belum adanya regulasi ketahanan pangan
2. Masih banyaknya daerah yang rawan pangan
3. Belum tersedianya sumber-sumber pangan lokal
4. Masih tingginya ketergantungan terhadap pangan luar
5. Belum optimalnya pengelolaan pangan
6. Belum optimalnya pendistribusian pangan
7. Masih rendahnya keanekaragaman pangan

#### 10. Pertanahan;

Identifikasi masalah pada bidang pertanahan bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi lahan sebagai kepastian dan kepemilikan lahan. Semakin besar persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah. Kabupaten Kepulauan Mentawai belum memiliki data tentang pertanahan, berupa data administrasi kepemilikan lahan di wilayahnya.

Beberapa permasalahan di bidang pertanahan adalah :

1. Belum kuatnya jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah
2. Tingginya konflik tenurial

#### 11. Lingkungan Hidup;

Salah satu tujuan dilaksanakannya penataan ruang adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam aspek lingkungan hidup adalah pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup antara lain karena pengelolaan lingkungan tidak dilakukan dengan baik dan benar. Adapun beberapa permasalahan di bidang lingkungan hidup adalah :

1. Masih rendahnya penataan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup
2. Meningkatnya degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
3. Masih rendahnya pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup
4. Belum optimalnya pengelolaan kawasan lindung

#### 12. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Dalam menilai tertib administrasi kependudukan indikator yang digunakan adalah jumlah penduduk yang memiliki KTP, KK, akte kelahiran dan akta nikah. Beberapa permasalahan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di adalah :

1. Masih banyaknya jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang belum memiliki kartu administrasi
2. Masih belum optimalnya capaian penerbitan dokumen kependudukan terutama dalam perekaman biometrik KTP elektronik, penerbitan akta kematian dan



penerbitan aktakelahiran;

3. Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam rangka meningkatkan pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, karena cakupan jangkauan wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terdiri dari pulau-pulau.

#### 13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) berfungsi sebagai sarana berorganisasi, berbagi informasi, penyaluran aspirasi serta peningkatan pengetahuan /kemampuan untuk masyarakat setempat dalam mendukung pembangunan lingkungannya (Desa dan Dusun). Sedangkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah (masyarakat) serta pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat.

Beberapa permasalahan pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa adalah :

1. Lemahnya data profil desa sebagai data dasar untuk perencanaan pembangunan desa;
2. Belum optimalnya peran kelembagaan desa
3. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan masyarakat pedesaan
4. Kurangnya pemahaman aparat pemerintah desa dalam memahami regulasi.
5. Terbatasnya alternatif lapangan pekerjaan
6. Rendahnya akses terhadap permodalan
7. Rendahnya akses terhadap ketersediaan sarana dan prasarana
8. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
9. Belum optimalnya penataan desa
10. Belum optimalnya penggalan dan pengelolaan potensi ekonomi desa

#### 14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program keluarga berencana perlu digalakkan untuk meningkatkan angka keluarga sejahtera. Kurangnya sosialisasi tentang keluarga berencana juga menjadi pemicu belum terlaksananya program setiap keluarga memiliki anak dua. Permasalahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disebabkan antara lain :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
2. Masih Pasangan Usia Subur yang belum terlayani KB

### 3. Rendahnya akurasi data base keluarga dan KB

#### 15. Perhubungan

Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berada di bagian Barat Pulau Sumatera merupakan gugusan pulau yang memanjang arah Barat Daya-Tenggara berada di Samudera Indonesia. Keberadaan Kepulauan Mentawai sebagai gugusan kepulauan menjadi permasalahan tersendiri dalam transportasi orang dan barang. Keterbatasan sarana dan prasarana transportasi dalam pulau, antar pulau dan keluar kabupaten menjadi tantangan bagi perkembangan kemajuan perekonomian di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat mengandalkan jalur transportasi laut dalam menghubungkan Kepulauan Mentawai dengan daratan Sumatera dan antar pulau di Kepulauan Mentawai sendiri. Namun kondisi angkutan laut yang relatif masih terbatas, dimana permasalahan adalah masih rendahnya frekuensi layanan angkutan laut reguler antar pulau. Hal ini menjadi permasalahan dalam percepatan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Hubungan Kepulauan Mentawai dengan ibukota provinsi dapat dilayani dengan dua jenis moda yaitu angkutan laut dan udara. Untuk angkutan udara, Pelabuhan udara hanya terdapat di Rokot (Kecamatan Sipora Utara), dapat didarati pesawat-pesawat kecil (Twin Otter, dan sejenisnya), dan hingga saat ini hanya ada satu pesawat yang digunakan dengan jadwal penerbangan yang terbatas. Bandar Udara Rokot di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang hanya melayani penerbangan lokal dari/ke padang, yakni dilayani oleh penerbangan perintis. Kondisi sarana dan prasarana transportasi udara yang terbatas menyebabkan terbatas pula maskapai penerbangan yang memanfaatkannya. Bandara Rokot dan beberapa pelabuhan laut di Kepulauan Mentawai belum berfungsi penuh, sehingga alokasi dana untuk pembangunan selama ini belum optimal pemanfaatannya. Pembangunan juga belum diserasikan dengan prasarana pendukung lainnya (jalan dan jembatan). Karena terbatasnya sarana dan prasarana transportasi yang ada di Kepulauan Mentawai baik internal ataupun dari dan ke Kepulauan Mentawai, mengakibatkan rendahnya aksesibilitas masyarakat dalam pergerakan internal dan eksternal di Kepulauan Mentawai. Aksesibilitas yang rendah mengakibatkan terbatasnya pergerakan orang dan barang di dan ke Kepulauan Mentawai. Hasil sumber daya alam ataupun produksi



dari masyarakat kurang dapat dipasarkan keluar Mentawai, aksesibilitas yang rendah disebabkan juga oleh tingginya biaya transportasi dalam dan keluar Kepulauan Mentawai. Tingginya biaya transportasi mengakibatkan rendahnya mobilitas masyarakat dalam melakukan perjalanan, baik untuk perjalanan dalam rangka tujuan perekonomian (pergerakan barang dan jasa) ataupun pergerakan untuk tujuan lainnya. Kondisi ini diperburuk oleh tingginya harga bahan bakar kendaraan dan kapal. Selain itu harga bahan bakar yang berfluktuasi, yang disebabkan oleh pasokan atau ketersediaan jumlah bahan bakar yang tidak tetap. Dapat disimpulkan permasalahan di bidang perhubungan adalah :

1. Belum memadainya sarana dan prasarana transportasi darat laut dan udara
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung transportasi darat laut dan udara

16. Komunikasi dan Informatika;

Keberadaan sarana informasi dan komunikasi pada setiap SKPD yang memadai sangat diperlukan untuk mengetahui informasi secara up to date terutama berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah serta sebagai sarana koordinasi internal dan eksternal antar SKPD di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Keberadaan sarana ini juga diperlukan masyarakat untuk meningkatkan akses informasi dan pengetahuan. Masih banyaknya daerah yang belum terjangkau jaringan komunikasi merupakan salah satu masalah yang harus ditindaklanjuti. Dari 10 kecamatan yang ada baru 7 kecamatan yang mempunyai jaringan komunikasi dan itupun hanya menjangkau daerah kecamatan saja dan tidak menjangkau sampai ke pelosok desa dan dusun.

Permasalahan di bidang Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Belum merata ketersediaan sarana dan prasarana layanan komunikasi dan informatika
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana broadband
3. Belum optimalnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio

17. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

Koperasi sebagai salah satu lembaga perekonomian diharapkan sebagai penggerak roda ekonomi di suatu wilayah dan meningkatkan kesejahteraan anggota.

Peran koperasi sangat penting untuk peningkatan potensi usaha kecil yang dimiliki oleh masyarakat lokal, penyedia informasi serta sebagai lembaga distribusi dan pemasaran. Di Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya sedikit jumlah koperasi aktif, dan merupakan koperasi simpan pinjam. Keberadaan koperasi ini perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah, karena dapat meningkatkan jumlah UMKM yang berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Beberapa permasalahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah antara lain :

1. Masih sedikit jumlah koperasi aktif, dan merupakan koperasi simpan pinjam.
2. Rendah kualitas SDM pengelola koperasi

#### 18. Penanaman Modal;

Investasi (penanaman modal) memberikan dampak positif bagi pertumbuhan suatu wilayah dan kesejahteraan penduduk. Untuk meningkatkan daya Tarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai, pemerintah daerah perlu melakukan promosi tentang daerahnya serta kemudahan-kemudahan yang akan diberikan kepada investor. Peningkatan jumlah investor dan nilai investasi berarti peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang dapat berdampak pada peningkatan daya serap lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Kepulauan Metawai.

Adapun permasalahan di bidang penanaman modal antara lain :

1. Rendahnya penanaman modal baik oleh PMA maupun PMDN
2. Belum optimalnya regulasi dan pelayanan perizinan satu pintu

#### 19. Kepemudaan dan Olah Raga;

Jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam menyalurkan aspirasi dan kemampuannya dalam penyelenggaraan pembangunan. Organisasi pemuda yang dimaksud adalah binaan pemerintah dan bertujuan untuk mendukung pemerintah daerah. Tidak adanya organisasi pemuda yang dibina oleh pemerintah daerah merupakan salah satu permasalahan pada bidang pemuda. Pada bidang olahraga,

Adapun permasalahan kepemudaan dan olah raga antara lain :





1. Partisipasi dan peran aktif pemuda masih rendah
2. Rendahnya jiwa kewirausahaan
3. Rendahnya semangat juang generasi muda
4. Meningkatnya penyalahgunaan NAPZA di kalangan generasi muda
5. Rendahnya prestasi di bidang olahraga
6. Rendahnya sarana dan prasarana keolahragaan
7. Rendahnya even-even kepemudaan dan olahraga
8. Belum optimalnya fungsi-fungsi organisasi kepemudaan dan keolahragaan

## 20. Statistik;

Dokumen statistik suatu daerah diperlukan oleh Pemerintah Daerah dalam mendapatkan data kondisi dan perkembangan daerah tersebut secara umum sebagai bahan untuk menyusun rencana pembangunan serta rencana tata ruang, bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Permasalahan di bidang Statistik di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Tidak adanya kesepakatan terkait penggunaan sumber data yang tunggal;
2. Penyediaan berbagai jenis dan keragaman data dan informasi statistik yang dibutuhkan di daerah masih belum dapat dipenuhi
3. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya manusia yang memahami pengetahuan yang berkaitan dengan metode, teknik atau cara mengumpulkan, mengolah, menganalisa serta menginterpretasikan data untuk disajikan secara lengkap dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pengguna;
4. Data yang tersaji bukan tahun berjalan, tapi tahun lalu; hal ini karena sistem pengumpulan data di Badan Pusat Statistik (BPS) adalah tahun yang lalu;
5. Rendahnya kesadaran responden dalam memberikan informasi yang benar

## 21. Persandian;

Persandian merupakan urusan wajib non pelayan dasar, berfungsi untuk pengamanan informasi. Ini merupakan tantangan yang berat karena masih belum diterapkan secara maksimal. Beberapa masalah terkait persandian adalah :

1. SDM yang belum berkompentensi untuk mengamankan informasi penting dan



rahasia

2. Masih kurang optimalnya dukungan layanan operasional persandian untuk keamanan informasi

## 22. Kebudayaan;

Masalah pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah semakin terkikisnya sistem sosial budaya masyarakatnya. Seiring dengan perkembangan Kepulauan Mentawai menyebabkan semakin ramai pendatang untuk menetap dan mencari pekerjaan di daerah ini. Implikasinya jelas, yaitu terjadinya pembauran nilai sosial budaya dalam masyarakat di Mentawai. Namun, dalam proses pembauran tersebut, justru sistem sosial budaya masyarakat Mentawai semakin terpinggirkan. Masyarakat lokal terpengaruh dengan nilai luar yang dominan dan dianggap modern.

Padahal nilai luar tersebut belum tentu sesuai, terutama dalam aktivitas mereka sehari-hari. Dalam banyak hal, masyarakat justru belum dapat memanfaatkan kearifan lokal sebagai dasar interaksi diantara mereka sehingga peran masyarakat Mentawai menjadi marjinal hampir di segala bidang. Apalagi dalam konteks tertentu, pemerintah daerah juga belum dapat mengoptimalkan pemanfaatan sistem sosial budaya lokal sebagai basis dalam penyelenggaraan Fungsi pemerintahan. Padahal dengan memanfaatkan sistem sosial budaya ini membawa dampak pada peningkatan partisipasi masyarakat setempat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Masalah lain yang juga menjadi masalah dalam upaya melestarikan adat tradisi masyarakat Mentawai ini adalah rendahnya perhatian generasi muda setempat untuk mengamalkan nilai budaya ini. Padahal pewarisan nilai sosial budaya kepada generasi muda ini adalah salah satu cara untuk melestarikan adat tradisi ini secara turun temurun. Ini jelas implikasi dari kuatnya penetrasi nilai luar baik yang sengaja dibawa oleh pendatang maupun akibat pembauran yang dilakukan secara kontinyu antar komunitas masyarakat. Lebih jauh yang juga harus menjadi perhatian untuk melestarikan sistem sosial budaya masyarakat Mentawai ini adalah lemahnya negosiasi yang dilakukan dengan pihak penanam modal yang cenderung mengabaikan keberadaan sistem sosiobudaya masyarakat Mentawai ini. Oleh karena itu, sebagai bagian strategi untuk melestarikan sistem sosial budaya ini, maka pemerintah Kabupaten Kepulauan



Mentawai harus dapat menguatkan nilai sosial budaya tersebut. Misalnya, Pemerintah Kabupaten dapat menjadikan sistem sosial budaya ini sebagai dasar pertimbangan dalam pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan investasi yang tidak hanya menguntungkan pengusaha tapi juga masyarakat setempat. Kebudayaan Mentawai sebenarnya karena mempunyai tipe budaya yang memiliki keunikan yang memperkuat keserasian tinggi antara ekologi dan manusia. Keberadaan masyarakat Mentawai asli ditengah perkembangan modernisasi yang masuk ke dalam sendi-sendi perilaku dan norma budaya lokal, membuat banyak orang Mentawai terpengaruh untuk mengubah gaya hidup mereka. Padahal, pola kehidupan tradisional yang dipraktekkan masih menjadi kekuatan dari eksistensi Mentawai dalam berhadapan dengan masyarakat lain. Perkembangan interaksi sosial melalui pembauran dalam perkawinan (amalgamasi) adalah salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat Mentawai untuk memilih mempertahankan atau meleburkan identitas budaya mereka ke dalam budaya masyarakat lain yang berbeda.

Beberapa permasalahan di bidang Kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah:

1. Belum adanya regulasi tentang masyarakat hukum adat
2. Menurunnya nilai-nilai sosial budaya di generasi muda
3. Menurunnya pemahaman kebangsaan
4. Rendahnya pembinaan dan pengembangan seni dan budaya

### 23. Perpustakaan

Jumlah perpustakaan milik daerah dapat menunjukkan tingkat pelayanan pada masyarakat umum dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat umum serta kelangsungan pelayanan pendidikan. Kabupaten Kepulauan Mentawai belum memiliki gedung perpustakaan, sehingga pelayanan diberikan pada kantor kepastakaan dan tidak memadai. Jumlah kunjungan juga sangat rendah. Selain itu masyarakat juga perlu didorong untuk memanfaatkan pelayanan pada kantor kepastakaan untuk meningkatkan pengetahuan serta kualitas hidup.

Permasalahan di bidang perpustakaan antara lain :

1. Rendahnya minat baca masyarakat
2. Rendahnya sarana dan prasarana kepastakaan

#### 24. Kearsipan

Permasalahan di bidang kearsipan antara lain :

1. Rendahnya pengetahuan tentang tata kearsipan pada aparaturn pemerintah sehingga penataan berkas/arsip belum tertib baik arsip aktif, in aktif maupun statis;
2. Masih belum tertatanya semua arsip daerah sesuai dengan peraturan yang ada.

#### 25. Kelautan dan Perikanan

Masih kurangnya keterampilan pemanfaatan teknologi eksplorasi hasil laut, menyebabkan nilai tambah hasil perikanan belum memberikan hasil yang maksimal baik terhadap daerah maupun mereka yang terlibat langsung dalam mengelola hasil laut seperti nelayan. Di samping itu, kelembagaan yang ada juga tidak mampu mendorong nelayan dan masyarakat pesisir untuk berkembang lebih baik, selanjutnya belum berkembangnya teknologi pengolahan ikan dan rumput laut juga menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi sektor kelautan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa Permasalahan di bidang kelautan dan perikanan adalah :

1. Rendahnya produksi dan produktivitas perikanan
2. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya kelautan (perikanan dan kelautan);
3. Semakin rusaknya habitat ekosistem pesisir dan laut
4. Rendahnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan
5. Rendahnya pengawasan ilegal fishing dan pengrusakan ekosistem laut
6. Rendahnya pengelolaan hasil-hasil perikanan dan kelautan
7. Rendahnya sarana dan prasarana produksi perikanan
8. Rendahnya jaringan pemasaran perikanan
9. Belum optimalnya pengelolaan pulau-pulau kecil

#### 26. Pariwisata

Pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum banyak mengalami perkembangan, walaupun secara potensial pengembangan ekowisata (budaya dan kenakeragaman hayati) cukup besar. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya, antara lain disebabkan oleh faktor ekonomi dan

politik secara nasional yang masih belum pulih dari krisis, networking yang belum terfasilitasi dan terkelola dengan baik, sumber daya pengelola pariwisata yang masih rendah, sehingga daya tarik terhadap pariwisata masih rendah. Selain itu, pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum melibatkan masyarakat secara luas, sehingga dampak ekonomi pengembangan wisata belum dirasakan secara luas oleh masyarakat setempat.

Kabupaten Kepulauan Mentawai telah ditetapkan sebagai tujuan wisata utama di antara 52 daerah di Indonesia dan merupakan 5 (lima) daerah teraman sebagai lokasi/tujuan wisata di Indonesia. Untuk itu, kebijakan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah membangun dan mengembangkan sektor kepariwisataan secara terpadu dengan memaksimalkan berbagai potensi pariwisata baik yang ada di darat, sungai, pantai, laut maupun pulau-pulau kecil untuk ditata, dikembangkan dan dikelola secara lebih profesional.

Beberapa Permasalahan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Rendahnya pengembangan destinasi pariwisata
2. Rendahnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sadar wisata
3. Rendahnya kapasitas pelaku pariwisata
4. Rendahnya sarana dan prasarana pariwisata
5. Rendahnya promosi pariwisata
6. Pengembangan sektor pariwisata belum berpadu sehingga pengembangannya cenderung berjalan ditempat/stagnan, utamanya sarana dan fasilitas yang mendukung.

## 27. Pertanian

Sektor pertanian masih mendominasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai. Namun belum meratanya sarana dan prasarana produksi dan pemasaran sektor pertanian menyebabkan sektor ini masih belum memberikan dampak yang optimal terhadap kesejahteraan masyarakat. Revitalisasi terhadap sektor pertanian dan sub sektor perikanan dan peternakan dengan membangun integrasi sektor hulu dengan sektor industri pengolahan sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih besar perlu dilaksanakan. Pendekatan agribisnis maupun agroindustri bisa dijadikan prioritas utama pembangunan sehingga menimbulkan dampak langsung terhadap penguatan basis ekonomi kerakyatan. Upaya diversifikasi



produksi pertanian, peningkatan. Nilai tambah komoditas pertanian dan perluasan pemasaran terutama terhadap komoditas yang dibudidayakan akan menjadi prioritas pembangunan pertanian secara khusus dan pembangunan ekonomi secara umum. Transformasi ini sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian dan lingkungan.

Adapun permasalahan pertanian adalah :

1. Rendahnya Produksi dan produktivitas pertanian
2. Belum terarahnya komoditas pertanian lokal
3. Rendahnya produksi pertanian
4. Belum berkembangnya industri pertanian (off farm)
5. Belum berkembangnya agribisnis yang berorientasi pasar
6. Pola pertanian masyarakat yang masih subsistem
7. Rendahnya pembinaan dan pemberdayaan kelompok tani

## 28. Kehutanan

Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki cagar biosfir nasional yang terletak di Pulau Siberut. Namun, masih terdapat permasalahan dalam pengembangannya, seperti rendahnya apresiasi pemerintah terhadap pengelolaan hutan lestari.

Beberapa permasalahan kehutanan di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Belum terselesaikannya tata batas kawasan hutan sehingga memberikan ancaman bagi pengelolaan kawasan hutan terutama di kawasan konservasi (Taman Nasional Siberut)
2. Pembangunan kehutanan berkelanjutan belum terwujud;
3. Belum adanya kebijakan yang mendukung pengembangan cagar biosfir.
4. Rendahnya akses masyarakat terhadap pemanfaatan nilai ekonomi hutan

## 29. Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan infrastruktur lainnya yang ada di Kepulauan Mentawai adalah masalah kekurangan suplai tenaga listrik yang membuat daya saing investasi daerah menjadi sangat rendah. Listrik merupakan elemen sangat penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan pertanian. Permasalahan kurangnya pasokan energi listrik membuat terhambatnya perkembangan dunia usaha, industri dan rumahtangga pada pusat kegiatan yang



ada di Kepulauan Mentawai. Peningkatan kapasitas produksi listrik di Kepulauan Mentawai perlu dilakukan secepatnya mengingat kebutuhan akan sumber energi listrik semakin tinggi dikalangan dunia usaha dan industri. Salah satu penyebab kurangnya pasokan suplai tenaga listrik adalah masih kurangnya pemanfaatan sumber daya energi baru terbarukan seperti energi biomassa dan air.

Beberapa permasalahan energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Rendahnya elektrifikasi masyarakat
2. Belum berkembangnya energi baru terbarukan

### 30. Perdagangan

Jumlah pasar di Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat kurang, dan pasar yang ada juga belum dapat difungsikan secara optimal. Hal ini menyebabkan produk-produk yang dihasilkan tidak dapat di promosikan secara optimal.

Adapun permasalahan di bidang perdagangan adalah :

1. Masih rendahnya jumlah pusat / sentra perdagangan
2. Belum optimalnya kegiatan promosi terhadap produk-produk unggulan
3. Tingginya indeks kemahalan barang-barang
4. Rendahnya distribusi perdagangan dalam pulau dan antar pulau
5. Rendahnya pengawasan terhadap aktifitas perdagangan

### 31. Perindustrian

Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2016 masih didominasi bidang pertanian (lebih dari 53 persen sumbangan PDRB nya dari sektor pertanian). Namun demikian, masih ditemukan banyaknya petani yang belum melakukan pengolahan terhadap hasil produk pertanian dan kehutanan yang diperoleh. Hal ini disebabkan oleh karena belum dikembangkannya teknologi pengolahan hasil pertanian kepada keluarga/rumah tangga. Di samping itu, juga diamati kondisi lemahnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan berskala kecil menengah, dan skema permodalan belum mendukung pengolahan hasil pertanian.

Beberapa permasalahan perindustrian di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Belum berkembangnya industri kecil menengah pengolahan hasil-hasil

- pertanian, perkebunan, kehutanan;
2. Belum berkembangnya pembinaan kelompok pengrajin
3. Rendahnya daya saing hasil-hasil produksi

### 32. Transmigrasi

Beberapa permasalahan transmigrasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Ekonomi masyarakat di daerah transmigrasi yang belum berkembang
2. Masih kurangnya rasa gotong royong dengan penduduk asli setempat yang berpotensi menimbulkan konflik

## 4.2 Isu-Isu Strategis Kabupaten Kepulauan Mentawai

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas pemerintahan daerah dan masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian penting adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan maka menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan /keorganisasian dan menentukan tujuan organisasi/institusi dimasa yang akan datang. Secara teknokratis, penentuan sesuatu atau kondisi menjadi isu strategis dapat didukung dengan menerbitkan pedoman atau kriteria oleh kepala daerah atau Kepala Bappeda. Panduan itulah yang akan digunakan tim perencana dalam mengkompilasi berbagai bahan untuk merumuskan isu-isu strategis bagi daerah. Suatu isu strategis dapat berlaku umum untuk sebagian besar daerah. Namun, sebagian lainnya, isu strategis hanya berlaku bagi satu daerah tertentu saja karena kekhasan, tantangan, dan peluang yang berbeda tiap daerah. Isu strategis diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk analisis kebijakan terhadap entitas pemerintahan di atasnya. Hal ini bertujuan agar rumusan isu strategis yang dihasilkan dapat sinkron dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional dan kebijakan pembangunan jangka panjang



provinsi bagi kabupaten/kota. Sinkronisasi langkah dan kebijakan pembangunan daerah terhadap isu-isu strategis tetap berlandaskan bahwa pembangunan daerah tidak saja memanfaatkan peluang dimasa datang, tak kalah penting, perencanaan daerah juga harus menghasilkan ide dan langkah untuk menciptakan peluang itu sendiri.

Isu strategis dalam jangka panjang daerah sekurang-kurangnya memenuhi kriteria, sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;
3. Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan pembangunan daerah; dan
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani.

Penentuan isu strategis didahului dengan *review* terhadap isu internasional dan kebijakan pembangunan nasional yang relevan dalam memberi arah bagi pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hasil *review* akan melengkapi isu strategis yang diperoleh dari kajian terhadap kondisi Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dengan memperhatikan permasalahan pembangunan yang masih dihadapi, maka rumusan isu strategis pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

#### **1. Merupakan daerah tertinggal**

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan satu dari tiga daerah tertinggal di Provinsi Sumatera barat. Dari tiga daerah tertinggal Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki tingkat kemiskinan tertinggi yaitu sebesar 15,12 % pada tahun 2016. Ada 13 indeks dan penyebab ketertinggalan Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu :

- Angka harapan hidup
- Jumlah desa dengan jenis permukaan jalan terluas aspal
- Jumlah desa dengan jenis permukaan jalan terluas diperkeras
- Jumlah Prasarana Kesehatan Per 1000 Penduduk
- Persentase Rumah tangga Pengguna Listrik
- Persentase Rumah tangga Pengguna Air Bersih



- Rata-rata Jarak dari Kantor Desa/Kel. Ke Kantor Kab yang Membawahi
- Akses Ke Pelayanan Pendidikan Dasar (Km)
- % Desa Gempa bumi
- % Desa Banjir
- % Desa Bencana Lainnya
- % Desa di Kawasan Hutan
- Rata-rata desa konflik satu tahun terakhir

Jumlah desa tertinggal juga menjadi indikator penyebab ketertinggalan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dari 43 desa yang ada tidak ada yang merupakan desa mandiri, 4 desa merupakan desa maju, 7 desa merupakan desa berkembang, 20 desa merupakan desa tertinggal, dan 12 desa merupakan desa sangat tertinggal.

## **2. Tingginya kesenjangan wilayah baik di dalam pulau maupun antar daerah juga kesejangan sosial seperti pendapatan serta sarana infrastruktur publik**

Tingginya kesenjangan wilayah dalam pulau dan antar pulau merupakan isu penting bagi Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dari segi pendapatan angka PDRB perkapita sebesar 35,83 juta masuk kategori tinggi namun bukan merupakan pendapatan merata keseluruhan masyarakat. Sementara sarana infrastruktur juga masih terpusat pada daerah-daerah maju. Dengan kata lain pembangunan hanya dinikmati oleh masyarakat pada daerah pusat kabupaten dan desa-desa maju, sementara daerah-daerah terpencil dan desa-desa tertinggal masih belum menikmati hasil pembangunan tersebut.

## **3. Masuk kategori daerah terluar**

Dengan posisi daerah terluar dengan karakteristik daerah kelautan rawan merupakan daerah bencana gempa dan tsunami dan abrasi menjadikan Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi kawasan strategis nasional pertahanan keamanan. Program-program nasional untuk daerah terluar dapat dilaksanakan di daerah kabupaten Kepulauan Mentawai.

## **4. Merupakan daerah rawan bencana**

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah yang rawan terhadap berbagai bencana alam dapat menghambat percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengantisipasi hambatan tersebut, perhatian untuk mengurangi resiko, penanggulangan bencana dan pemulihan daerah yang

terkena bencana harus menjadi lebih besar. Penanganan dan pencegahan bencana secara dini memberikan keyakinan kepada investor dan wisatawan bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan memperhatikan segala aspek kebencanaan sehingga tidak akan menghambat pihak-pihak berkepentingan untuk melakukan kegiatan bisnis, berwisata, berinvestasi serta kegiatan lainnya yang akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

#### **5. Tingkat kemiskinan yang tinggi**

Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebesar 15,12% merupakan salah satu isu yang sangat penting. Untuk mengeluarkan kelompok masyarakat dari kemiskinan diperlukan upaya yang lebih besar lagi dari yang telah dilakukan sebelum ini. Salah satu yang menjadi masalah adalah karena keterbatasan kemampuan APBD, capaian target Program untuk kemiskinan menjadi belum optimal untuk dilaksanakan.

#### **6. Memiliki potensi pengembangan pariwisata yang besar tetapi belum terkelola dengan baik**

Kabupaten kepulauan Memiliki potensi wisata yang sangat besar baik alam dan budaya. Akan tetapi potensi tersebut belum terkelola dengan baik sehingga belum memberikan dampak yang besar bagi kemajuan Mentawai. Potensi wisata yang ada belum mampu menaikkan angka kunjungan wisata yang pada akhirnya berdampak pada kemajuan perekonomian masyarakat. Pengembangan kepariwisataan permasalahan yang ada seperti : promosi yang belum optimal, kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan obyek wisata serta sarana prasarana pendukung wisata yang kurang memadai ditengah berlimpahnya potensi wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai

#### **7. Daya saing yang rendah**

Peningkatan daya saing daerah tidak hanya menyangkut pembenahan infrastruktur, akan tetapi juga pembenahan pada sumberdaya manusia, kelembagaan dan perilaku masyarakat dalam merespon program dan kegiatan pembangunan. Oleh sebab itu peningkatan daya saing daerah perlu dirumuskan sedemikian rupa dengan mengintegrasikan dengan pembangunan bidang-bidang lainnya. Daya saing yang rendah juga dapat dilihat dari Indek gini di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang

masih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa sebaran kapasitas SDM juga belum merata. Jumlah masyarakat produktif dan tidak produktif cukup signifikan mengakibatkan tingginya angka ketergantungan dan berdampak rendahnya daya saing masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

#### **8. Kualitas sumber daya manusia rendah**

Rendahnya kualitas sumber daya manusia erat hubungannya dengan pendidikan yang merupakan salah satu gerbang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai yang cukup luas, kesenjangan layanan pendidikan menjadi persoalan utama. Oleh karena itu, perlu dibangun sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat guna terselenggaranya pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Mentawai. Untuk mewujudkan hal tersebut, strategi yang perlu dilakukan adalah peningkatan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penambahan prasarana dan sarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas dengan mengedepankan penanaman nilai keagamaan yang toleran dan budaya luhur, serta pembiayaan pendidikan yang murah. Menambah jumlah sekolah inklusi, Sekolah Satu Atap dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah upaya strategis lain dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan.

#### **9. Tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah rendah**

Tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah belum optimal. Hal ini terlihat dari koordinasi lintas sektor serta akuntabilitas aparatur pemerintah yang masih lemah. Penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu ditingkatkan, disamping itu keberhasilan program Bupati dan pembangunan daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggara pemerintah tersebut. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan. Pada pembangunan modern ini menuntut penyelenggaraan pemerintah beradaptasi dengan dengan teknologi informasi, dan pelayanan berbasis teknologi tidak dapat ditawar lagi. Hal ini mampu meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah yang rendah. Sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih sangat perlu ditingkatkan.

### **10. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya kelautan**

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi kelautan dan kemaritiman guna meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah dengan peningkatan sumberdaya manusia, menyediakan sarana dan prasarana seperti penyediaan armada dan alat tangkap di bidang perikanan serta sarana prasarana untuk pariwisata bahari dan sarana transportasi untuk pembangunan kemaritiman. Dengan demikian potensi kelautan dan kemaritiman di bidang usaha perikanan, pariwisata serta transportasi dan usaha lainnya akan dapat dimanfaatkan.

### **11. Belum berkembangnya energi baru terbarukan**

Rasio elektrifikasi yang masih rendah yaitu sebesar 25% menjadi salah satu penyebab ketertinggalan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jumlah masyarakat yang terlayani listrik PLN hanya sebanyak 6570 KK. Kondisi geografis daerah kepulauan menyebabkan biaya pembangunan jaringan listrik PLN cukup tinggi. Hal ini juga disebabkan karena belum berkembangnya pemanfaatan energi baru terbarukan seperti PLTS, Biomassa, PLTMH. Penugasan kewenangan urusan energi terbarukan ke kabupaten bisa menjadi satu solusi untuk mengembangkan sumber energi terbarukan.

### **12. Belum berkembangnya industri kecil menengah**

Belum berkembangnya industri kecil menengah menjadi isu pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai karena yang menggerakkan ekonomi adalah usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Industri kecil menengah yang tidak mengalami perkembangan, akan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan kesempatan kerja akan terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Isu Belum berkembangnya industri kecil menengah perlu dikaitkan dengan peningkatan daya saing dan produktivitas, pembenahan manajemen, dan kelembagaan, penguasaan teknologi, inovasi dan diversifikasi produk, peningkatan akses produk dan perluasan pasar, dukungan dan fasilitas dari pemerintah

### **13. Pertanian yang masih berpola subsistem belum terarah (agribisnis)**

Pertanian yang masih merupakan penyumbang PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terbesar masih berpola sub sistem. Bila dikembangkan terarah ke sistem agribisnis maka akan mendongkrak perekonomian masyarakat. Pertanian akan



dikembangkan melalui pengembangan kawasan pertanian terpadu di 6 Kawasan (Desa Saureinuk, Desa Bosua Kec. Sipora Selatan, Desa Sikakap Kec. Sikakap, Desa Maileppet Kec. Siberut Selatan, Desa Monganpoula Kec. Siberut Utara, Desa Malakoppa Kec. Pagai Selatan.

#### **14. Belum optimalnya pemanfaatan ruang**

Belum optimalnya pemanfaatan ruang menjadi salah satu isu strategis Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dari keseluruhan wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai 82% merupakan kawasan hutan. Masih adanya desa yang berada dalam kawasan hutan menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan pembangunan

#### **15. Rendahnya pengembangan jati diri berbasis budaya lokal**

Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki karakteristik budaya yang berbeda dengan kabupaten lain pada provinsi Sumatera Barat. Namun pada kenyataannya pada generasi saat ini jati diri yang berbasis budaya Mentawai mulai memudar. Upaya pelestarian kebudayaan Mentawai yang dilakukan harus disertai dengan pengamalan dan penghayatan di kehidupan sehari-hari.

#### **16. Merupakan daerah kepulauan/maritime**

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah kepulauan/maritime yang memiliki potensi utama sektor pariwisata, perikanan dan pertanian yang apabila dikembangkan dan dikelola dengan maksimal diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar untuk mengurangi angka pengangguran.

### **4.3. KETERKAITAN DENGAN DOKUMEN LAINNYA**

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan lainnya, maka arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 disusun dengan berpedoman dan memperhatikan beberapa dokumen perencanaan sebagai berikut:

- 1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2020**
  - A. Rencana Struktur Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai**
    - a. Rencana Sistem Pengelolaan Perkotaan dan Sistem Pusat Kegiatan



Rencana sistem pusat kegiatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai di dasarkan kepada kebijakan nasional (RTRWN) dan kebijakan Provinsi Sumatera Barat (RTRWP) adalah :

1. Penetapan berdasarkan kebijakan nasional dalam RTRW Nasional, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Kabupaten Kepulauan Mentawai terletak di Pulau Sibarubaru dan Pulau Nyiau. Kedua pulau ini merupakan pulau terluar dari wilayah Indonesia di bagian barat, dan terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan.
2. Penetapan berdasarkan kebijakan nasional dalam RTRW Nasional, Muara Siberut merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Muara Siberut adalah ibukota Kecamatan Siberut Selatan berada di Pulau Siberut,. Letak Muara Siberut yang strategis akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat. Untuk itu pertumbuhan kawasan ini perlu dikendalikan dikarenakan terdapat (Taman Nasional Siberut) dan tetap mengoptimalkan daya layaknya secara regional (lintas kabupaten)
3. Penetapan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Tuapejat berdasarkan arahan kebijakan RTRW Provinsi Sumatera Barat. Tuapejat adalah ibukota Kabupaten Kepulauan Mentawai berada di Pulau Sipora, Kecamatan Sipora Utara. Pertumbuhan Kota Tuapejat diperkirakan akan mengalami lonjakan bila bandara rokot dikembangkan nantinya, dimana keadaan ini didukung dengan adanya lokasi atau titik surving yang diminati oleh peselancar mancanegara dan untuk perkembangannya perlu didukung dengan pembangunan Jaringan Jalan yang menghubungkan simpul PKL dan PPL (Sioban).
4. Penetapan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) Sikakap berdasarkan arahan kebijakan RTRW Propinsi Sumatera Barat. Sikakap adalah Ibukota Kecamatan Sikakap. Dan sebagai **Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)** yang memiliki skala pelayanan kegiatan antar desa dan beberapa kecamatan, fasilitas pelayanan dan penghidupan sosial ekonomi relatif lebih berkembang dibandingkan dengan kecamatan lainnya.
5. Penetapan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), meliputi Sioban, Km 37, Pei-pe.
  - a. Sioban (Kecamatan Sipora Selatan).
  - b. Km 37 (Kecamatan Pagai Selatan)
  - c. Pei-pe (Kecamatan Siberut Barat Daya)



6. Penetapan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), meliputi Saibi Samukop, Saumanganya, Muara Sikabalu, Silabu dan Simalegi Betaet.
  - a. Saibi Samukop (Siberut Tengah)
  - b. Saumanganya (Kecamatan Pagai Utara)
  - c. Muara Sikabalu (Kecamatan Siberut Utara)
  - d. Silabu (Kecamatan Pagai Utara)
  - e. Simalegi Betaet (Kecamatan Siberut Barat)

**b. Rencana Sistem Jaringan Transportasi**

Sistem Jaringan Transportasi adalah mendorong peningkatan keterkaitan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah pedesaan secara sinergis dalam suatu wilayah, meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam pengembangan ekonomi melalui peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana.

Konsep pengembangan system jaringan transportasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah menghubungkan atau menjangkau seluruh wilayah dalam satuan kesatuan sistem transportasi yang berkesinambungan antara darat, laut dan udara, yang selanjutnya dapat meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dan antar pulau.

**c. Rencana Sistem Jaringan Energi (Listrik)**

Sistem jaringan energi dalam rencana ini adalah rencana jaringan energi listrik sebagai kebutuhan untuk penerangan dan industri. Saat ini kebutuhan listrik dipenuhi oleh PLN yang telah membangun pembangkit listrik tenaga diesel. Berdasarkan data yang dihimpun dari PLN Ranting Kabupaten Kepulauan Mentawai menginformasikan bahwa jumlah pelanggan yang terdaftar di Kabupaten Kepulauan Mentawai sampai bulan Desember 2009 sebanyak 3.497 pelanggan, dimana sipora utara pelanggan terbesar dari 10 kecamatan

**d. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi**

Kendala bagi wilayah-wilayah kepulauan dalam usaha untuk pengembangan sistem prasarana telekomunikasi adalah tidak bisa menggunakan jaringan sistem kabel, apalagi jarak jangkauan wilayah tersebut dipisahkan oleh laut yang jaraknya cukup jauh.

Hal ini dialami juga oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang sebelumnya cukup sulit untuk komunikasi jarak jauh, salah satu prasarana atau jaringan yang bisa digunakan adalah telepon dengan sistem satelit, tetapi kurang efektif karena terpengaruh dengan cuaca.



Sebagai terobosan baru di sektor perhubungan (telekomunikasi) di Kabupaten Kepulauan Mentawai kini dipasang BTS, adalah sarana untuk mengakses jaringan telekomunikasi jarak jauh dengan menggunakan telepon seluler (ponsel). Adapun pengembangan sistem yang digunakan sekarang ini adalah berkat kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Perusahaan Telekomunikasi. Sejak dipasangnya BTS di Tuapejat, Muara Siberut, Muara Sikabalan, Sikakap kini sebagian penduduk dapat berkomunikasi dengan daerah luar dengan menggunakan fasilitas HP (Handphone). Untuk rencana jaringan telepon seluler pengembangan 10 – 20 tahun mendatang adalah pembangunan BTS di seluruh ibukota kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

#### **e. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu diimbangi dengan adanya fasilitas-fasilitas penunjang yang cukup baik. Salah satunya adalah penyediaan air bersih yang cukup, baik untuk perumahan maupun Kebutuhan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan lingkungan masyarakat dalam melayani Kebutuhan air bersih di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih dikelola dalam bentuk badan pengelola (BPDAM) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai

#### **f. Rencana Sistem Pengelolaan Lingkungan**

Rencana sistem pengelolaan lingkungan di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah rencana sistem jaringan air bersih/air minum, rencana sistem jaringan persampahan, rencana sistem jaringan drainase, rencana prasarana perikanan dan rencana jalur evakuasi bencana.

#### **g. Rencana Sistem Prasarana Persampahan dan Air Limbah**

Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai saat ini belum terkoordinasi dengan baik oleh kelompok masyarakat maupun pemerintah. Memang saat ini persoalan sampah belum menjadi sebuah persoalan karena pola kehidupan masyarakat yang relatif belum banyak memproduksi sampah. Akan tetapi jika dari sekarang tidak direncanakan, maka persoalan sampah akan membesar seiring dengan penambahan penduduk dan perkembangan perkotaan.

Produksi sampah dapat diperkirakan dari jumlah penduduk yang ada dan produksi sampah perhari perorang. Saat ini diproyeksikan produksi sampah setiap orang adalah 2,5 liter/hari. Jika saat ini jumlah penduduk adalah 76.174. Pada tahun 2015 dengan proyeksi jumlah penduduk mencapai sekitar 82.290 jiwa, maka



produksi sampah diperkirakan mencapai 205.724 liter perhari atau sekitar 205,724 M<sup>3</sup>/hari.

#### **h. Rencana Prasarana Drainase**

Perencanaan jaringan drainase di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada masa mendatang masih tetap diarahkan pada pemanfaatan fungsi sungai-sungai sebagai saluran utama. Pada daerah yang padat penduduknya, seperti ibukota kabupaten dan kecamatan jaringan drainase direncanakan melalui pembuatan saluran drainase dengan memanfaatkan jaringan jalan. Di samping itu sistem drainase yang akan dikembangkan diarahkan pula sesuai dengan arah aliran dengan memanfaatkan topografi (kemiringan alamiah) wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sistem jaringan drainase juga disesuaikan dengan sungai sebagai jaringan drainase alamiah yang akan dimanfaatkan untuk saluran pembuangan akhir ke laut.

#### **i. Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana**

Untuk meminimalisir dampak tsunami terhadap manusia dan lingkungan maka dilakukan hal-hal berikut :

- Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan pesisir dilakukan dengan mencermati konsistensi kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang kawasan strategis atau rencana detail tata ruang.
- Mengembangkan kegiatan-kegiatan atau pemanfaatan ruang di kawasan pesisir dengan tanaman-tanaman yang dapat menahan tsunami seperti, mangrove dan pengembangan tanaman keras di kawasan pesisir (pohon kelapa dan cemara laut).

#### **b. Pola Ruang**

##### **a. Kawasan lindung**

Kondisi geografis dan alam Kabupaten Kepulauan Mentawai saat ini sebagian besar merupakan kawasan hutan. **Kawasan hutan** yang terdiri dari hutan lebat, hutan sejenis, semak belukar, memiliki persentasi terbesar yaitu mencapai **82 % dari luas wilayah** Kabupaten Kepulauan Mentawai atau sekitar **493.093** hektar dan sebagian besar merupakan lahan tidur, meliputi 456.956 hektar berupa hutan lebat (76,02%), 12.348 hektar berupa hutan sejenis (2,05%), dan selebihnya sebesar 42.740 hektar berupa semak belukar (7,11%).

Kawasan lindung yang akan direncanakan di Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi: Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Yang Memberikan Perlindungan



Terhadap Kawasan Bawahannya (Kawasan Resapan Air), Kawasan Suaka Alam, Kawasan Perlindungan Setempat, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Perlindungan Lainnya

b. Kawasan budidaya adalah kawasan yang diperuntukan bagi penduduk untuk melakukan kegiatan baik permukiman, usaha dan sebagainya. Kawasan budidaya yang di rencanakan di Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi :

- kawasan peruntukan hutan produksi, yang dirinci meliputi kawasan-kawasan : peruntukan hutan produksi terbatas, peruntukan hutan produksi tetap, dan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi;
- kawasan hutan rakyat;
- kawasan peruntukan pertanian, yang dirinci meliputi kawasan-kawasan: peruntukan pertanian lahan basah, peruntukan pertanian lahan kering, dan peruntukan hortikultura;
- kawasan peruntukan perkebunan, yang dirinci berdasarkan jenis komoditas perkebunan yang ada di wilayah kabupaten;
- kawasan peruntukan perikanan, yang dirinci meliputi kawasan-kawasan: peruntukan perikanan tangkap, peruntukan budidaya perikanan, dan peruntukan kawasan pengolahan ikan;
- kawasan peruntukan pertambangan, yang dirinci meliputi kawasan-kawasan: peruntukan bahan galian batuan, peruntukan minyak dan gas bumi, dan peruntukan air tanah di kawasan pertambangan;
- kawasan peruntukan industri, yang dirinci meliputi kawasan-kawasan: peruntukan industri besar, peruntukan industri sedang dan peruntukan industri rumah tangga;
- kawasan peruntukan pariwisata, yang dirinci meliputi kawasan-kawasan: peruntukan pariwisata budaya, peruntukan pariwisata alam, dan peruntukan pariwisata buatan;
- kawasan peruntukan permukiman, yang dirinci meliputi kawasan-kawasan: peruntukan permukiman perkotaan dan peruntukan permukiman perdesaan. Sebagai kawasan budidaya maka permukiman diarahkan dalam kajian lokasi dan fungsi masing-masing permukiman, terutama dikaitkan dengan karakter lokasi, misalnya di pegunungan, dataran tinggi, permukiman pantai, dan



sebagainya; dan

- kawasan peruntukan lainnya, seperti kawasan pertahanan dan keamanan (HANKAM) serta kawasan pendidikan.

## **2. Pembangunan Daerah Tahap III (2015-2020) dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2005-2025**

RPJPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2025 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan RPJMD, karena RPJMD Tahun 2017-2012 merupakan tahapan ketiga pelaksanaan pembangunan dari RPJPD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Alur tahapan dan penetapan skala prioritas yang ditetapkan ini mencerminkan pentingnya permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan yang lain. Oleh karena itu, tekanan pada skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua terus berkesinambungan dari periode satu keperiode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang yang telah disusun.

Visi RPJPD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2005-2025 adalah :

“Menjadi Kabupaten Maritim Yang Terkemuka di Pantai Barat Sumatera 2025” dengan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kehadiran Pemerintah dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
2. Mewujudkan Masyarakat maritim Yang Maju, Sehat, Berbudaya, berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Keunggulan Komparatif Dan Kompetitif Berbasis Maritim yang Berkelanjutan
4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Yang Berkeadilan Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang

Prioritas RPJPD 2005-2025 pada tahun RPJMD Tahap ke 3 adalah : “Peningkatan kualitas dan pengembangan prasarana dan sarana fisik maupun non-fisik dalam dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing untuk mendorong investasi dan pengembangan ekonomi maritime”. Prioritas Tahap III ini sejalan dengan Visi Misi serta Prioritas RPJMD Tahun 2017-2022.



### 3. Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Pembangunan yaitu sebagai berikut :

1. Dimensi Pembangunan Manusia, terdiri dari :
  - a. Pendidikan
  - b. Kesehatan
  - c. Perumahan
  - d. Mental / Karakter
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan terdiri dari :
  - a. Kedaulatan Pangan
  - b. Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan
  - c. Kemaritiman dan kelautan
  - d. Pariwisata dan Industri
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, terdiri dari :
  - a. Antar Kelompok Pendapatan
  - b. Antar Wilayah, Desa, pembangunan luar jawa dan kawasan timur



## BAB V

### VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN

#### 5.1 Visi

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 263 ayat 3 menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun. Undang-Undang tentang pemerintah daerah ini memberi pertegasan bahwa daerah saat ini memiliki kewenangan lebih untuk mengatur daerahnya, tanpa meninggalkan sinergitas dengan program-program pembangunan baik dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Di samping mengacu pada regulasi di atas, sistematis pembahasan visi dan misi dalam bab ini juga merujuk pada Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 angka 12 yang menyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi dan misi bersifat menjadi inspirasi, arah, dan posisi Kabupaten Kepulauan Mentawai di masa yang akan datang. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJMN. Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi, dan program dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 ini tidak hanya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah saja, namun juga telah dilakukan beberapa proses penyesuaian dari semua acuan dimaksud.

Visi Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2017-2022. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran



pembangunan jangka menengah daerah.

Visi Pembangunan visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2017-2022 adalah:

### 'Mentawai yang Mandiri, Maju dan Sejahtera'

Pokok – Pokok visi

1. **Mandiri** : Kondisi Kabupaten Kepulauan Mentawai mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dengan mengandalkan dan mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki serta proaktif membangun jejaring dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk memenuhi semua kebutuhannya. "Membangun dari apa yang ada dan dimiliki masyarakat, bebas dari ketertinggalan, ketergantungan dan kemiskinan.

Indikator :

- Terpenuhinya basic need (pangan sandang papan)
  - pangan 11.739 ton (60.200 jiwa (70% ) \*195 Kg beras / org)
  - penyediaan rumah
  - Energi terpenuhi : kemandirian energi 25 %
- Kontribusi PAD terhadap APBD Dominan (kondisi sekarang, 4,6%)
- Redistribusi aset yang belum merata (60 % lahan belum tersertifikasi)
- Perimbangan antara kawasan hutan dan kawasan kelola masyarakat menjadi 60 : 40
- UKM / Koperasi menjadi tulang punggung (semua masyarakat)

2. **Maju** : Kondisi Kualitas Kehidupan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang lebih baik didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki keunggulan dan intelektualitas,

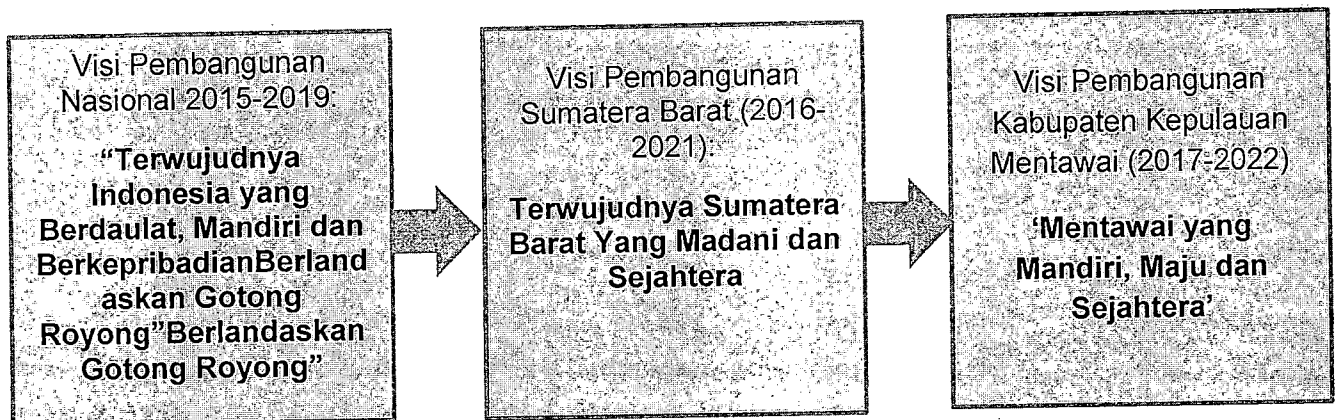
Indikator :

- Pendapatan perkapita
- Pertumbuhan penduduk
- Rata-rata lama sekolah
- Harapan Hidup
- Tingkat pengangguran
- Semua pusat pertumbuhan ekonomi terhubung

- Seluruh desa terhubung dengan pusat kecamatan
  - Kontribusi sektor jasa / tourism terhadap PDRB
  - Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan
3. Sejahtera : Kondisi Kabupaten Kepulauan Mentawai dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata.
- IPM
  - Tingkat kemiskinan di bawah 5 %
  - Gini Ratio (pemerataan pendapatan)
  - Kualitas lingkungan terjaga

Visi Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" dan Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat yaitu "Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani dan Sejahtera". Keterkaitan Visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 5.1**  
**Visi RPJMPD, RPJMN, DAN RPJMD Provinsi Sumatera Barat**



## 5.2 Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi





tersebut. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan menjadi 5 (lima) misi pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Produktif
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Merata, Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan
3. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat yang Berdaya Saing Berbasis Maritim
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih, Akuntabel dan Melayani
5. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Partisipatif, Harmonis dan Seimbang Berbasis Sosial dan Budaya

Misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 berpedoman pada RPJMN Tahun 2015-2019, dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sehingga terdapat hubungan yang kuat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 5.1**  
**Keselarasan Nawacita dengan Misi RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai**

NO	Misi RPJMN	RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2017-2022
1	Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan		Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat yang Berdaya Saing Berbasis Maritim
2	Mewujudkan masyarakat maju, Berkeseimbangan dan demokratis Berlandaskan negara hukum		Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Produktif
3	Mewujudkan bangsa yang berdaya saing	Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah;	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat yang Berdaya Saing Berbasis Maritim
4	Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera	Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Produktif



NO	Misi RPJMN	RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2017-2022
5	Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional		Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat yang Berdaya Saing Berbasis Maritim
6	Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan	Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah " Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Partisipatif, Harmonis dan Seimbang Berbasis Sosial dan Budaya
		Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih, Akuntabel dan Melayani
		Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.	Mewujudkan Infrastruktur yang Merata, Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

### 5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sasaran menggambarkan hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan.

Berdasarkan visi, misi dan isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Produktif

#### Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat

Misi 2 : Mewujudkan Infrastruktur yang Merata, Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

#### Tujuan :

1. Mewujudkan pemerataan pembangunan sektoral dan wilayah



2. Terpenuhinya kebutuhan perumahan bagi seluruh masyarakat
3. Terwujudnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan

Misi 3 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat yang Berdaya Saing Berbasis Maritim

**Tujuan :**

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata
2. Menyiapkan pembiayaan ringan dan terjangkau
3. Mewujudkan perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan inflasi daerah

Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih, Akuntabel dan Melayani

**Tujuan :**

1. Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang prima
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel

Misi 5 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya

**Tujuan :**

1. Mewujudkan pelestarian dan pengamalan Nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa
2. Mewujudkan kehidupan yang harmonis dan seimbang

Untuk lebih jelasnya keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dapat dilihat pada Tabel 5.2

Tabel 5.2  
Keterkaitan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran

**VISI : 'Mentawai yang Mandiri, Maju dan Sejahtera'**

Misi	Tujuan		Sasaran	
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Produktif	1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1	Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses dan mutu layanan pendidikan



Misi	Tujuan	Sasaran
	2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1 Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan
	3 Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang produktif	1 Meningkatkan keterampilan hidup (Life skill) sumber daya manusia
2. Mewujudkan Infrastruktur yang merata, berkualitas dan berwawasan lingkungan	1 Mewujudkan pemerataan pembangunan sektoral dan wilayah	1 Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata
		2 Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air
		3 Optimalisasi pengendalian daya rusak air
		4 Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah
		5 Terwujudnya prasarana dan fasilitas perhubungan
		6 Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan informatika
		7 Meningkatkan ratio elektrifikasi dengan pembaruan energi
2 Terpenuhinya kebutuhan perumahan bagi seluruh masyarakat	1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	
3 Terwujudnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	1 Optimalisasi pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air bersih	
		2 Optimalisasi pengelolaan sanitasi (limbah, sampah dan drainase) berwawasan lingkungan
		3 Meningkatkan prasarana dan sarana kawasan pemukiman
		4 Meningkatkan RTH Kawasan Permukiman
	4 Terwujudnya pengembangan wilayah yang terintegrasi dan terpadu	1 Meningkatkan pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh



Misi	Tujuan	Sasaran
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat yang berdaya saing berbasis maritim	1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata	1 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas
		2 Mewujudkan Pemerataan pendapatan
	2 Mewujudkan perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan inflasi daerah	1 Meningkatkan kesempatan kerja
		2 Mengendalikan tingkat inflasi daerah
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, akuntabel dan melayani	1 Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien	1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik
	2 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya	1 Mewujudkan pelestarian dan pengamalan Nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa	1 Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya
	2 Mewujudkan kehidupan yang harmonis dan seimbang	1 Peningkatan kehidupan yang aman dan harmonis

Tabel 5.3

Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Mentawai

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak/Impact)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir 2022
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Produktif	1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1 Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses dan mutu layanan pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia	%	58,27	59,46	60,48	61,5	62,52	63,54	64,56
			Harapan Lama sekolah	tahun	11,74	11,80	11,90	11,95	11,99	12,00	12,01
			Rata-rata lama sekolah	tahun	6,27	6,51	6,59	6,67	6,75	6,84	6,92
	2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1 Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan	Angka harapan hidup	%	64,36	64,65	64,67	64,89	65,11	65,33	65,54
			Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)	Per 1000 KH	27	27	26	25,5	25	24	24
			Angka Kematian Ibu (100rb kh)	(100rb kh)	442	397	379	361	343	325	306
			Prevalensi Gizi Buruk	%	0,35	0,49	1,78	0,86	1,10	0,91	0,35
			Prevalensi Gizi Kurang	%	4,75	4,7	4,65	4,6	4,55	4,5	4,45
			Desa Cakupan Imunisasi (%)	%	55,81	62,79	69,77	76,74	83,72	90,72	95,35
	3 Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang produktif	1 Meningkatnya keterampilan hidup (Life skill) sumber daya manusia	Angka Melek Huruf	%	93,7	94	95	96	97	98	99
Tingkat Pengangguran terbuka			%	1,25	1,24	1,20	1,19	1,16	1,15	1,14	
2. Mewujudkan Infrastruktur yang merata, berkualitas dan berwawasan lingkungan	1 Mewujudkan pemerataan pembangunan sektoral dan wilayah	1 Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata	Jalan Mantap	%	22%	27	32	37	42	47	49
		2 Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air	Cakupan jaringan irigasi	ha	442	500	600	700	800	900	1000

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak/Impact)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir 2022	
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		3	Optimalisasi pengendalian daya rusak air	Persentase pembangunan turap di wilayah rawan abrasi dan longsor	%	2.3	3.3	4.3	5.3	6.3	7.3	8.3
		4	Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah	Ketaatan terhadap RTRW	%	10	15	20	25	30	35	35%
		5	Terwujudnya prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah arus Penumpang umum kapal	orang/tahun	4950	5000	5050	5100	5150	5200	5250
		6	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan informatika	Cakupan layanan telekomunikasi	%	56%	57	59	61	63	65	67
		7	Meningkatnya ratio elektrifikasi dengan pembaruan energi	Rasio Elektrifikasi	%	25	31	32	33	35	40	46%
	Terpenuhinya kebutuhan perumahan bagi seluruh masyarakat	1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Rasio rumah layak huni	%	60	65	70	75	80	85	90%
	Terwujudnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	1	Optimalisasi pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air bersih	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih	%	30	40	45	50	55	60	65%



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak/Impact)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir 2022
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		2 Optimalisasi pengelolaan sanitasi (limbah, sampah dan drainase) berwawasan lingkungan	Fasilitas Pengurangan sampah di perkotaan	%	0	0	10	20	30	40	40%
			Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air minimal 1,5 m	km	0	0	2	4	6	10	10 km
		3 Meningkatkan prasarana dan sarana kawasan pemukiman	%	50	55	60	65	70	75	75%	
		4 Meningkatkan RTH Kawasan Permukiman	%	50.5	53	56	59	62	65	68	
	4 Terwujudnya pengembangan wilayah yang terintegrasi dan terpadu	1 Meningkatnya pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh	Sarana penghubung antar Desa	%	50						100
			Kawasan Agroindustri	kawasan	0	0	1	0	0	0	1
			Kawasan agrowisata	kawasan	0	0	1	0	0	0	1
			Desa Sangat Tertinggal	desa	12	10	7	5	3	0	0
			Desa tertinggal	desa	20	18	16	14	13	12	12
			Desa Berkembang	desa	7	10	13	15	17	20	20
			Desa Maju	desa	4	5	6	7	7	7	7
Desa Mandiri	desa	0	0	1	2	3	4	4			





Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak/Impact)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir 2022
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		2.Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana	Persentase bencana yang tertangani pada tanggap darurat dan RR	%	90%	90	90	90	90	90	90
3.Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat yang berdaya saing berbasis maritim	1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata	1 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	%	5.01	5.61	5.67	5.76	5.83	6	6
			Persentase PAD terhadap pendapatan	%	4,61	5	5,5	6	6,5	7	7
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,66	0,69	0,70	0,80	0,90	1	1
			Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	16,44	16,42	16,40	15,90	15,84	15,80	15,80
			Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	12,40	12,10	11,90	11,70	11,50	11,35	11,35
	2 Mewujudkan Pemerataan pendapatan	Pendapatan Perkapita	Rp juta/orang		42.79	46.21	49.56	52.91	56.27	59.62	59.62
			Gini Rasio	-	0,306	0,29	0,28	0,19	0,18	0,15	0,16
			Persentase penduduk miskin	%	15, 12	14.49	14.11	13.73	13.35	12.98	12.60
	2 Mewujudkan perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan inflasi daerah	1 Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran terbuka	%	1,25	1.01	0.85	0.70	0.55	0.39	0.24
			2 Mengendalikan tingkat inflasi daerah	Inflasi	%	4.81	4.33	4.20	4.07	3.95	3.82



RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak/Impact)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir 2022
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, akuntabel dan melayani	1 Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien	1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indes Kepuasan masyarakat								
	2 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah	Opini BPK	-	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Peringkat penilaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	C	C	CC	B	B	B	BB
			Maturitas SPIP	level	level 1	level 1	level 1	level 2	level 2	level 2	level 3
			Realisasi Indikator Kinerja yang tercapai sesuai target (%)	%	68	70	75	80	85	90	95
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya	1 Mewujudkan pelestarian dan pengamalan Nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa	1 Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	Festival	2	2	2	3	3	4	4
			Pengakuan Masyarakat hukum adat	MHA	0	0	2	3	4	5	5
	2 Mewujudkan kehidupan yang harmonis dan seimbang	Meningkatnya kehidupan yang aman dan harmonis	Tingkat Kriminalitas	%	3,54	3,4	3,3	3,2	3,1	3	2,9

**BAB VI****STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH****6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Menurut Tujuan dan Sasaran**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan upaya untuk mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2017-2022 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2017-2022 pada setiap tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1.  
Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan

**Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Produktif**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses dan mutu layanan pendidikan	1. Pengembangan pelayanan pendidikan formal yang merata dan berkeadilan	1. Pendidikan wajib belajar 9 tahun 2. Pembangunan pendidikan inklusif SD, SMP 3. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 4. Pemberian beasiswa berprestasi 5. Pengembangan sekolah berasrama (boarding school) untuk SMP dan SMA 6. Penyediaan dan Pemerataan distribusi guru
		2. Pengembangan profesionalisme tenaga pendidik	1. Pemenuhan kualifikasi guru (S1) 2. Peningkatan kompetensi guru



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan	1. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan 2. Pengembangan ITC (Internet, Telekomunikasi dan Computer) 3. Pengembangan sekolah inti setiap jenjang pendidikan perkecamatan
		4. Pengembangan sistem tata kelola manajemen pendidikan	1. Akreditasi institusi pendidikan 2. Pengembangan manajemen berbasis sekolah (MBS) 3. Pengembangan inovasi pendidikan 4. Pemantapan dan pengembangan kurikulum/pendidikan berkarakter mulia 5. Pengembangan sistem pengawasan dan evaluasi pendidikan
		5. Peningkatan keikutsertaan dalam lomba-lomba bidang pendidikan	1. Pengembangan intra dan ekstra kurikuler
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan	1. Pembangunan dan pengembangan layanan kesehatan dasar	1. Promosi kesehatan 2. Kesehatan lingkungan 3. Pencegahan pemberantasan penyakit menular 4. Kesehatan keluarga dan reproduksi 5. Perbaikan gizi masyarakat 6. Penyembuhan penyakit dan pelayanan kesehatan 7. Jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin 8. Pelayanan kesehatan untuk daerah terpencil/khusus



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2. Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana serta tenaga kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan kualifikasi tenaga kesehatan</li> <li>2. Pengembangan kompetensi tenaga kesehatan</li> <li>3. Pemenuhan dan pengembangan sarana prasarana kesehatan</li> <li>4. Akreditasi institusi pelayanan kesehatan</li> <li>5. Pengembangan sistem informasi kesehatan</li> </ol>
3. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang produktif	2. Meningkatnya keterampilan hidup (Life skill) sumber daya manusia)	1. Pembangunan dan pengembangan pendidikan non formal dan informal	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pengembangan pendidikan keterampilan khusus masyarakat (vokasional)</li> <li>3. Pengembangan pendidikan informal</li> <li>4. Pengembangan pendidikan non formal</li> </ol>
		1. Pemberdayaan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengarusutamaan gender (PUG)</li> <li>2. Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat</li> </ol>

Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Produktif

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan pemerataan pembangunan sektoral dan wilayah	1. Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata	1. Akselerasi pembangunan jalan melalui penyediaan infrastruktur jalan yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan penyelesaian jalan poros utama trans mentawai disetiap pulau</li> <li>2. Melakukan pemeliharaan rutin/berkala untuk mencapai kondisi jalan dan jembatan yang baik dan sedang</li> <li>3. Membuka akses darat yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat produksi yang belum terhubung</li> <li>4. Percepatan pembangunan jalan poros desa</li> </ol>



<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
	2. Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air	1. Akselerasi, pendayagunaan sumber daya air untuk meningkatkan perekonomian dan kebutuhan air beku	1. Pembangunan sistem layanan irigasi 2. Penyediaan air baku
	3. Optimalisasi pengendalian daya rusak air	1. Percepatan pengendalian daya rusak air dengan memanfaatkan green belt dan konstruksi yang adaptif	1. Pengendalian abrasi pantai dan sungai 2. Penanaman kembali lahan kritis pesisir pantai
	4. Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah	1. Mengoptimalkan proporsi peruntukan kawasan budidaya pada pola ruang RTRW kabupaten untuk mengakomodir kebutuhan ruang pembangunan jangka panjang	1. Melakukan revisi RTRW kabupaten 2. Percepatan penyelesaian rencana rinci tata ruang wilayah 3. menyiapkan instrumen izain pemanfaatan ruang 4. Penyediaan sistem informasi tata ruang
	5. Terwujudnya prasarana dan fasilitas perhubungan	1. Terwujudnya prasarana dan fasilitas perhubungan	1. Percepatan pembangunan pelabuhan laut dan penyeberangan untuk konektivitas antar wilayah dan luar wilayah yang terintegrasi dengan jalan trans Mentawai 2. Meningkatkan layanan moda transportasi 3. Pembangunan dan pengembangan bandara 4. Pembangunan sistem logistik dan pemusatan pergerakan orang dan barang



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	6. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan informatika	1. Mendorong penyediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan informatika yang menjangkau ke seluruh wilayah kabupaten dengan pola kerjasama dengan pihak terkait	1. Mendorong pihak swasta untuk meningkatkan perluasan jaringan telekomunikasi seluler dan internet 2. Pengembangan jaringan radio milik pemerintah 3. Pengembangan sistem informasi berbasis IT
	7. Meningkatnya rasio elektrifikasi dengan pembaruan energi	1. Mendorong pihak swasta dan pengembang untuk penyediaan energi	1. Menyediakan layanan listrik/energi untuk seluruh desa 2. Mengembangkan energi baru terbarukan
		2. Pembangunan energi berbasis komunitas	
		3. Memprioritaskan pengembangan energi baru terbarukan	
2. Terpenuhinya kebutuhan perumahan bagi seluruh masyarakat	1. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	1. Mendorong pengembangan kawasan perumahan oleh swasta/BUMD	1. Pengembangan kawasan perumahan swadaya 2. Pengembangan kawasan perumahan oleh pengembang 3. Pemberian bantuan stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
		2. Perbaiki rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	4. Pengembangan perumahan khusus nelayan, PNS 5. Relokasi/revitalisasi kawasan padat kumuh perumahan dan permukiman/rumah adat tradisional
3. Terwujudnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	1. Optimalisasi pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air bersih	1. Percepatan pengembangan SPAM Regional untuk IKK	1. Penyediaan air baku



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2. Percepatan pengembangan PAMSIMAS untuk kawasan perdesaan	1. Percepatan penyediaan dan pengelolaan air bersih/minum 2. Pembangunan sistem drainase yang terpadu disetiap kawasan dan ramah lingkungan
	2. Optimalisasi pengelolaan sanitasi (limbah, sampah, dan drainase) berwawasan lingkungan	1. Percepatan pembangunan sistem pengelolaan limbah, sampah dan drainase	2. Pembangunan sistem pengelolaan limbah terpadu disetiap kawasan permukiman 3. Pembangunan sistem pengelolaan sampah mandiri, terpadu dengan pola 3 R 4. Pembangunan sistem drainase yang terpadu disetiap kawasan dan ramah lingkungan
	3. Meningkatkan prasarana dan sarana kawasan permukiman	1. Percepatan pembangunan jalan lingkungan serta penunjang lainnya efektif 2. Pemanfaatan material lokal yang efektif dan efisien serta ramah lingkungan	1. Prioritas pembangunan jalan lingkungan dikawasan padat penduduk 2. Penelitian, diseminasi dan pemanfaatan material lokal yang efektif dan efisien serta ramah lingkungan untuk material serta spesifikasi jalan
	4. Meningkatnya RTH kawasan permukiman	1. Percepatan pembangunan RTH yang ramah terhadap anak, lansia, dan masyarakat berkebutuhan khusus	1. Pembangunan ruang terbuka hijau terpadu 2. Penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung disepanjang jalan utama 3. Pembangunan fasilitas umum dan sosial





Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
4. Terwujudnya pengembangan wilayah yang terintegrasi dan terpadu	1. Meningkatnya pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh	1. Pengembangan desa dan kota yang saling ketergantungan /link dan match untuk menghilangkan terjadinya enclave	1. Pembangunan sistem sarana dan prasarana transportasi yang terhubung antara kota dengan desa dan antar desa 2. Pengembangan kawasan agroindustri/agro wisata

Misi 3 : Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat yang berdaya saing berbasis maritim

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata	1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas	1. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis investasi	1. Pembangunan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Pariwisata
		2. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis masyarakat	1. Pengembangan desa wisata
		1. Pengembangan dan pengelolaan sentra perikanan dan kelautan terpadu	2. Pembangunan dan pengembangan kelembagaan nelayan 3. Pembangunan dan pengembangan modernisasi alat tangkap ikan 4. Pengembangan pengelolaan dan pemasaran hasil-hasil perikanan dan kelautan 5. Pengembangan kemitraan nelayan dengan investor
		1. Pengembangan tanaman pangan	1. Pengembangan tanaman pangan hortikultura 2. Diversifikasi tanaman pangan 3. Distribusi dan keamanan pangan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2. Pengembangan agribisnis	1. Pengembangan kawasan pertanian terpadu berbasis pulau dan pasar 2. Pengembangan jaringan pemasaran hasil-hasil pertanian 3. Pengembangan hasil-hasil kehutanan dan pengelolaan hutan lestari berbasis hutan kemasyarakatan (HKm)
		3. Pembangunan dan pengembangan peternakan	1. Pengembangan kawasan peternakan terpadu berbasis pulau dan pasar 2. Pengembangan jaringan pemasaran serta pengolahan hasil peternakan
		1. Pengembangan industri berbasis komoditas lokal	1. Pengembangan jaringan pemasaran hasil industri pertanian 2. Pengembangan industri berbasis rumah tangga
		1. Pengembangan pasar regional	1. Pembangunan pasar regional antar pulau 2. Pembangunan pasar komoditas
		2. Pengembangan koperasi dan UMKM yang mandiri	1. Pembinaan dan pengembangan koperasi mandiri 2. Pembinaan dan pengembangan UMKM Mandiri 3. Pembangunan dan pengembangan BUMD untuk sektor strategis 4. Pembinaan wirausaha pemula/start up (entrepreneurship)



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2. Mewujudkan perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan inflasi daerah	1. Meningkatnya kesempatan kerja dan Pemerataan pendapatan	1. Penyediaan dan penjaminan kredit modal/ kerja	1. Pembangunan institusi lembaga keuangan disetiap wilayah 2. Penyediaan dan penjaminan kredit modal kerja bagi masyarakat
		2. Pengembangan ekonomi yang seimbang dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat	1. Penyediaan lapangan Kerja berbasis masyarakat 2. Pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok.
		3. Menciptakan pelayanan perizinan yang murah, cepat dan pasti	1. Pelayanan satu pintu
		4. Menciptakan keunggulan yang komparatif dan kompetitif dalam iklim bisnis yang baik dan sehat	1. Mengembangkan komoditas unggulan daerah
	2. Mengendalikan tingkat inflasi daerah	1. Penyusunan regulasi dan pengawasan distribusi perdagangan barang dan jasa	1. Pengawasan reguler terhadap distribusi perdagangan barang dan jasa
		2. Penyiapan cadangan pangan sebesar 10%/kebutuhan 1 bulan tersedia	1. Cadangan pangan tersedia di setiap pulau

Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, akuntabel dan melayani

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Pembinaan, perlindungan dan pengembangan aparatur	1. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi aparatur 2. Peningkatan disiplin dan etos kerja aparatur



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		1. Pemberian penghargaan berbasis kinerja	1. Penilaian aparatur dengan merit system
		2. Penempatan aparatur sesuai kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki	1. Penyusunan formasi berdasarkan analisis beban kerja dan analisis jabatan
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	1. Pengembangan kerangka kelembagaan pemerintah daerah	1. Penyusunan SOP dan SPM institusi pemerintah yang memberikan pelayanan public 2. Penyusunan regulasi dan deregulasi yang efektif dan efisien 3. Pengembangan struktur organisasi pemerintah yang efektif, efisien berbasis kepulauan
		2. Peningkatan dan pengembangan kualitas sarana dan prasarana aparatur	1. Standarisasi sarana dan prasarana aparatur
		1. Meningkatkan fungsi koordinasi lintas sektor dan kerjasama pemerintah daerah	1. Peningkatan koordinasi lintas sector 2. Peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta 3. Peningkatan kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah lainnya
		1. Membangun SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	1. Peningkatan sistem informasi perencanaan dan penganggaran 2. Peningkatan sistem pengendalian internal instansi pemerintah 3. Peningkatan sistem informasi teknologi (e-government)



Misi 5 :Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan pelestarian dan pengamalan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya	1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya	1. Penanaman nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsasejak dini	1. Pengembangan kurikulum pendidikan agama, moral dan kebudayaan
		2. Penangkalan/dera dikalisme terhadap paham-paham anti nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa	1. Perlindungan dan pengamanan terhadap pengamalan nilai agamam dan budaya 2. Pengawasan terhadap paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila 3. Pengawasan bahaya laten dan orang asing
		3. Mendorong pengamalan agama dan budaya bagi semua masyarakat	1. Pengembangan dan pembinaan aktifitas keagamaan dan kebudayaan
		1. Penanaman nilai-nilai luhur budaya mentawai bagi generasi muda	1. Pengembangan kurikulum budaya mentawai
		2. Pengembangan budaya mentawai menjadi budaya nasional	1. Keikutsertaan budaya mentawai pada pentas nasional
		3. Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat mentawai	1. Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat mentawai
		4. Pelestarian dan revitalisasi budaya mentawai	1. Pembangunan dan pengembangancagar budaya
		2. Mewujudkan kehidupan yang harmonis dan seimbang	1. Meningkatnya kehidupan yang aman dan harmonis



		2. Pembinaan kelembagaan-kelembagaan agama dan masyarakat	1. Pengakuan, perlindungan dan pembinaan terhadap kelembagaan agama dan masyarakat
--	--	---	--

## 6.2 Prioritas Pembangunan

Merumuskan Program prioritas pembangunan daerah sangat penting dalam RPJMD karena hasil perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas. Perumusan program prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mampu merefleksikan tujuan startegis Bupati terpilih dalam 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Bupati terpilih. Pada intinya Janji-jani Bupati pada saat kampanye di definisikan dalam bentuk strategi pembangunan, kebijakan umum, program prioritas dan kegiatan. Bila bersifat makro maka dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, kebijakan umum, yang bersifat mikro maka akan didefinisikan dalam bentuk program (outcome) dan kegiatan (output).

Prioritas Pembangunan :

### 1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)

Prioritas ini diarahkan pada pembangunan pendidikan yaitu peningkatan kualitas dan akses pendidikan. Dengan prioritas ini diharapkan meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) semua jenjang pendidikan, dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah guru mencukupi, kualitas guru meningkat.

### 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)

Prioritas ini diarahkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Capaian dari prioritas ini antara lain meningkatnya angka harapan hidup, memastikan jaminan kesehatan diterima oleh masyarakat miskin, perbaikan gizi masyarakat, pola hidup bersih diterapkan, penanganan intensif bagi bayi balita dan ibu melahirkan, peningkatan pelayanan puskesmas, pembentukan BLUD RSUD.

### 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)

Pembangunan jalan mantap merupakan program pada priotas ini. Pembangunan



jalan trans Mentawai Jalan Kolektor, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan, untuk dinaikkan statusnya menjadi Jalan Nasional, Jalan Provinsimenghubungkan konektivitas antar pulau dan konektivitas ke luar Mentawai, membangun pelabuhan penyeberangan dan Pengembangan Bandara, mengembangkan jaringan telekomunikasi dan internet ke semua pelosok Mentawai, pembangunan jaringan irigasi

4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Pemukiman (Mentawai Bersih)  
Prioritas ini diarahkan pada peningkatan kualitas pemukiman. Tersedianya air bersih saluran drainase, pengendalian limbah dan persampahan, tersedianya rumah swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), mendorong relokasi pemukiman kumuh dan merusak lingkungan, membangun drainase untuk pengendalian banjir serta pembuangan limbah rumah tangga, mengupayakan Area Penggunaan Lainnya (APL) lebih optimal, melindungi dan memajukan Hak-hak Masyarakat Adat
5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)  
Prioritas ini diarahkan dengan pendekatan agribisnis maupun agroindustry (ekonomi kerakyatan), peningkatan nilai tambah komoditas pertanian dan perluasan pemasaran, pembangunan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu
6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)  
Prioritas ini diarahkan pada tujuan menjadikan Mentawai menjadi pariwisata kelas dunia melalui pembangunan dan penataan destinasi pariwisata.
7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)  
Prioritas ini dilaksanakan melalui pengembangan industry berbasis produl local dengan memanfaatkan BUMD atau BUMDes, dalam prioritas ini diharapkan munculnya wirausahawan muda
8. Kedaulatan Energi (Mentawai Terang)  
Prioritas ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas produksi listrik di Kepulauan Mentawai dengan melakukan bauran energi dan koordinasi dan bekerjasama dengan PLN
9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)  
Prioritas ini dilakukan pemerintah dengan mendorong dan memfasilitasi kegiatan keagamaan, pembangunan rumah ibadah, pembinaan generasi muda,



pembinaan ormas, pembinaan perempuan dan pengembangan seni budaya dan serta mengembangkan dialog-dialog antar umat beragama, pembangunan perkampungan multikulturalisme

10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)

Prioritas ini dilakukan dengan menjalankan Reformasi Birokrasi dan pelayanan Publik. Dalam kebijakan Reformasi Birokrasi dan pelayanan public, menata kembali struktur pemerintah, peningkatan kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah, tersusunnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewujudkan WTP atas Laporan Keuangan Daerah, Penataan Pegawai Honor.

**Tabel 6.2**  
**Sinergitas Dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai Dengan Prioritas Pembangunan Nasional Dan Provinsi Sumatera Barat**

NO	Prioritas Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Prioritas Provinsi Sumatera Barat	Prioritas Pembangunan Nasional
1	Pembangunan Pendidikan	Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revolusi Mental</li> <li>• Pelayanan Pendidikan</li> </ul>
2	Pembangunan Kesehatan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.	Pelayanan kesehatan
3	Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerataan antarkelompok pendapatan</li> <li>• Pembangunan desa dan kawasan perdesaan</li> <li>• Pembangunan perkotaan</li> </ul>
4	Pembangunan Pariwisata	Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha</li> <li>• Pembangunan Pariwisata</li> </ul>
5	Pembangunan Kedaulatan Pangan, Kemaritiman dan Kelautan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis.</li> <li>• Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemaritiman dan Kelautan</li> <li>• Kedaulatan Pangan</li> </ul>
6	Kedaulatan Energi	Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur.	Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan





NO	Prioritas Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Prioritas Provinsi Sumatera Barat	Prioritas Pembangunan Nasional
7	Pembangunan Industri, Usaha Kecil dan Menengah	Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi	Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8	Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman		Pembangunan Perumahan dan Permukiman
9	Penataan Birokrasi	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reformasi Birokrasi</li><li>• Revolusi Mental</li></ul>
10	Pembangunan Kebudayaan;	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan Mental Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat.</li><li>• Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana</li></ul>	



**Tabel 6.3**  
**Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif**

Misi 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas dan produktif

MISI / TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT /OUTCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2022	
				2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Milyar)
				Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)		
Tujuan 1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia														
Sasaran 1	Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses dan mutu layanan pendidikan	Indeks Pembangun Manusia	58.27	59.46	60.48	61.5	62.52	63.54	64.56						
		Rata-rata lama sekolah	6.27	6,51	6,59	6,67	6,75	6,84	6,92						
		Harapan Lama sekolah	11,74	11,8	11,9	11,95	11,99	12	12,01						
	1. Progam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatnya APK PAUD	20%	25	25,0	30	25,0	35	25,1	40	25,3	45	25,4	50	25,5
	2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD	111	113.01	114,45	115,9	117.35	118.79	119						
		APK SMP	79.73%	83,07 %	84%	85%	86%	88%	88.76%						
		APM SD /MI/ paket A	98.30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
		APM SMP SMP /MTS/ Paket B	59.19%	66%	70.38	75%	80%	85%	86%						
		Bangunan Sekolah SD kondisi bangunan Baik	92.64%	94%	95%	96%	97%	98%	99%						
		Bangunan Sekolah SMP kondisi Bangunan Baik	94.62%	95%	96%	97%	98%	99%	100%						
Angka Putus sekolah SD /MI/ paket A	0,21%	0,20%	0,19%	0,18%	0,17%	0,16%	15								

MISI / TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT /OUTCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2022		
			2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Milyar)	
			Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)			
	Angka Putus sekolah SMP /MTS/ Paket B	0,36%	0,35%		0,34%		0,33%		0,32%		0,31%		7,5		
3.Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru Yang memenuhi kulaifikasi S1	74,19%	79%	12,0	84%	12,1	89%	12,1	94%	12,2	100%	12,2	3,50	12,3	
	Angka Kelulusan SD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		4,00		
	Angka Kelulusan SMP	98%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Sekolah berakreditasi	0 sekolah	0		2		2		2		2		10 sekolah		
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	59,91%	60%		63		64		65		66		67		
	4.Program Pendidikan Tinggi	Rasio Lulusan pendidikan tinggi	40%	42	2,5	44	2,51	46	2,53	48	2,54	50	2,55	52	2,56
	5.Program Pendidikan Non Formal	Tuntasnya buta Aksara	93, 70%	94	2,5	95	2,51	96	2,53	97	2,54	98	2,55	99	2,56
	6.Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1450 orang	1500	0,3	1600	0,30	1700	0,30	1800	0,30	1900	0,31	2000	
Tujuan 2	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat														
Sasaran 1:	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	64.36	64,65		64,67		64,89		65,11		65,33		65,54	
		Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)	27 /1000 KH	27		27		26		25,5		25		24	
		Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH)	442 / 100rb KH	397		379		361		343		325		306	



RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022

MISI / TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT /OUTCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2022								
			2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Milyar)							
			Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)									
	Prevalensi Gizi Buruk	0,35%	0,49		1,78		0,86		1,1		0,91		0,35								
	Prevalensi Gizi Kurang pada Balita	4,75%	4,7		4,65		4,6		4,55		4,5		4,45								
	Desa Cakupan Imunisasi (%)	55,81%	62,79		69,77		76,74		83,72		90,72		95,35								
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin	70%	80%	24,0	90%	24,12	100%	24,24	100%	24,36	100%	24,48	100%	24,61							
	Cakupan Desa UCI	51%	1		60		63		67		72		76								
	Menurunnya kasus penyakit menular	50%	60		70		80		85		90		95								
	Angka kematian Bayi	15 kasus	15		13		11		9		7		3								
	Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan	45%	5		4		3		2		1		-								
	Cakupan penemuan dan penanganan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	85,60%	80%		70%		60%		50%		40%		30%								
	2. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan obat dengan kebutuhan obat	50%		60		4,0		70		4,02		80		4,04	90	4,06	100	4,08	100	4,10
	3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100		100%		2,0		100%		2,01		100%		2,02	100%	2,03	100%	2,04	100%	2,05
4. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rasio dokter per satuan penduduk	0,03	0,1		0,2		0,3		0,4		0,5		0,6								



MISI / TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT /OUTCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2022	
			2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Milyar)
			Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)		
	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,09	0.2		0.4		0.6		0.8		0.9		1	
5. Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Puskesmas	Rasio puskesmas	1,8%	2,0%	18,0	3,0%	18,09	4,0%	18,18	5,0%	18,27	6,0%	18,36	7,0%	18,45
	Cakupan pembantu puskesmas	15,16	20%		25%		30%		35%		40%		45%	
6. Program Pengadaan, Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru/rumah sakit mata	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1,30%	1,5%	10,0	1,6%	10,05	1,7%	10,10	1,8%	10,15	1,9%	10,20	2%	10,25
7. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Cakupan penemuan dan penanganan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	86%	87%	2,0	88%	2,01	89%	2,02	90%	2,03	95%	2,04	100%	2,05
Tujuan 3	Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang produktif													



MISI / TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT /OUTCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2022	
				2017		2018		2019		2020		2021			
				Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)
Sasaran 1	Meningkatnya keterampilan hidup (Life skill) sumber daya manusia	Tingkat Pengangguran terbuka	1,25%	1,24		1,2		1,19		1,16		1,15		1,14	
	1.Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	0	5	4,6	12	4,62	14	4,65	16	4,67	18	4,69	20	4,72
	2.Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	0	5	3,0	12	3,02	14	3,03	16	3,05	18	3,06	20	3,08
	3.Program keluarga Berencana	Rasio Akseptor KB	53,23	60%	3,0	70%	3,02	75%	3,03	80%	3,05	85%	3,06	90%	3,08

Misi 2 : Mewujudkan Infrastruktur yang merata, berkualitas dan berwawasan lingkungan

MISI / TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT /OUTCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2022	
				2017		2018		2019		2020		2021			
				Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)
Tujuan 1	Mewujudkan pemerataan pembangunan sektoral dan wilayah														
Sasaran 1	Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	5,97%	7		9		11		13		15		17	



RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022

MISI / TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT /OUTCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2022		
			2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Milya)	
			Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)			
	1. Program pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	5,97%	7	146	9	146.73	11	147.46	13	148.20	15	148.94	17	149.6
Sasaran 2	Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air	Cakupan jaringan irigasi	442 ha	500		600		700		800		900		1000	
	1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rasio Jaringan Irigasi	11,61 %	13	6	15	6.03	17	6.06	19	6.09	21	6.12	23	6.15
Sasaran 3	Optimalisasi Pengendalian daya rusak	Persentase pembangunan turap di wilayah rawan abrasi dan longsong	2.3	3.3	6	4.3	6.03	5.3	6.06	6.3	6.09	7.3	6.12	8.3	6.15
	1. Program pembangunan turap/talud/bronjong														
		Persentase sungai yang dinormalisasi	0	10		20		30		40		50		60	
Sasaran 4	Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah	Ketaatan terhadap RTRW	10%	15		20		25		30		35		40	
	1. Program Perencanaan, pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	10%	15	1.8	20	1.81	25	1.82	30	1.83	35	1.84	40	1.85

MISI / TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT /OUTCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2022		
			2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Milya)	
			Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)			
	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	1%	2		3		4		5		6		7		
	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	50.5%	50		47		45		43		42		41		
	2. Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Transportasi			9.7		9.75		9.80		9.85		9.90		9.94	
	Pelabuhan	9 buah	9		9		10		11		14		16		
	Udara	1 buah	1		1		2		2		2		2		
	Terminal Bis	0	0		0		1		1		2		3		
	Jumlah kapal														
Sasaran 5	Terwujudnya prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah arus Penumpang angkutan umum	4950 orang/ tahun	5000		5050		5100		5150		5200		5250	
	1. Program peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah orang/ melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	101.235 kali	108,235	0.90	115,235	0.90	122,235	0.91	129,235	0.91	136,235	0.92	143,235	0.92
		Jumlah barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	87.456 ton	89,156		90,856		92,556		94,256		95,956		97,656	
	2. Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Terjaga dan terkendalinya keamanan lalu lintas	99%	100	0.9	100	0.90	100	0.91	100	0.91	100	0.92	100	0.92





RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022

MISI / TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT /OUTCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2022	
				2017		2018		2019		2020		2021			
				Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milya)
Sasaran 6	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan informatika	Cakupan layanan telekomunikasi	56%	57		59		61		63		65		67	
	1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan layanan telekomunikasi	56%	57	0.3	59	0.30	61	0.30	63	0.30	65	0.31	67	0.31
Sasaran 7	Meningkatnya ratio elektrifikasi dengan pembaruan energi	Rasio Elektrifikasi	32%	34		35		36		37		38	1	39	
	1. Program pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan	Persentase Rumah tangga menggunakan tenaga listrik	30%	33	4.2	36	4.22	39	4.24	42	4.26	45	4.28	48	4.31
Tujuan 2 :	Terpenuhinya kebutuhan perumahan bagi seluruh masyarakat														
Sasaran 1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Rasio rumah layak huni													
	1. Program Pengembangan Perumahan	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	14%	13	4.2	12.5	4.22	12	4.24	11.5	4.26	10	4.28	9	4.31
Tujuan 3	Terwujudnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan														
Sasaran 1	Optimalisasi pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air bersih	Persentase rumah tinggal bersanitasi	31,15%	35		40		42		45		47		50	



RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022

MISI / TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT /OUTCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2022	
				2017		2018		2019		2020		2021			
				Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)
Sasaran 2	Optimalisasi pengelolaan sanitasi (limbah, sampah dan drainase) berwawasan lingkungan	Fasilitas Pengurangan sampah di perkotaan	0	0		0		10		20		30		40	
	1. Program Peningkatan kinerja air minum dan air limbah	Persentase rumah tinggal berakses air minum	30%	33		38		40		42		43		47	
Sasaran 3	Meningkatkannya prasarana dan sarana kawasan pemukiman	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	50%	52		55		57		59		60		62	
	1. Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Pemukiman	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	50%	52	4.2	55	4.22	57	4.24	59	4.26	60	4.28	62	4.31
Sasaran 4	Meningkatnya RTH Kawasan Permukiman	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	50.50%	50	1.8	47	1.81	45	1.82	43	1.83	42	1.84	41	1.85
	1. Program perencanaan dan pengembangan wilayah Strategis dan Cepat tumbuh	Kawasan Agroindustri	0	0	9	1	9.05	1	9.09	2	9.14	3	9.18	3	9.23
Tujuan 4.	Terwujudnya pengembangan wilayah yang terintegrasi dan terpadu														

MISI / TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT /OUTCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2022			
				2017		2018		2019		2020		2021					
				Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)
Sasaran 1	Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana	Persentase bencana yang tertangani pada tanggap darurat dan RR	90%	90		90		90		90		90		90		90	
	1. Program Penanggulangan Bencana	Persentase bencana tertangani	65 %	67%		70%		74%		75%		75%		78%			

Misi 3 : Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat yang berdaya saing berbasis maritim

MISI / TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT /OUTCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR (2022)			
				2017		2018		2019		2020		2021					
				Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp.
Tujuan 1 :	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata																
Sasaran 1	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,01%	5,61		5,67		5,83		5,9		6		6			
		Persentase PAD terhadap pendapatan	4,61	5		5,5		6		6,5		7		7,1			
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,66	0,69		0,70		0,80		0,90		1		1,1			



RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022

MISI / TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT /OUTCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKI (2022)	
			2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Milyar)
			Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)		
	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	16,44	16,42		16,40		15,90		15,84		15,80		15,82	
	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	12,40	12,10		11,90		11,70		11,50		11,35		11,30	
1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah wisatawan mancanegara	5480 orang	10.000	3	20.000	3	30.000	3	40.000	3	50.000	3	60.000	3
	jumlah wisatawan domestik	685.000 orang	700.000		800.000		900.000		100.000		1.100.000		1.200.000	
	PAD sektor pariwisata	4 M	5		6		7		8		9		11	
2. Program Pengembangan destinasi Pariwisata	Lama kunjungan wisata	2 hari	3	9	4	9,05	5	9,09	6	9,14	7	9,18	7	9
3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	Rasio cadangan pangan utama	0,70%	0,75	4,2	0,8	4,22	0,85	4,24	0,9	4,26	0,95	4,28	1	4
	Produksi Peternakan													
	Sapi	1315 ekor	1.600		1.900		2.200		2.500		2.800		3.100	
	Babi	28610 ekor	28.640		28.670		28.700		28.730		28.760		28.790	
	Unggas	75904 ekor	80.000		95.000		110.000		125.000		140.000		155.000	
	Produksi telur	31665 butir	40000		43000		46000		49000		51000		55000	
	Produksi susu	0 liter	10		15		30		60		90		120	



MISI / TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT /OUTCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKI (2022)	
			2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.
			Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)		
4. Program Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	4973 ton	5000	9	5450	9,05	5950	9,09	6350	9,14	6500	9,18	7000	
	Produksi komoditas unggulan													
	kelapa	6494.5 ton	16.000		17.000		18.000		19.000		20.000		21.000	
	pisang	25693 ton	175.000		225.000		375.000		525.000		675.000		825.000	
	cengkeh	97.78 ton	597		697		797		897		997		1.097	
	pala	111.1 ton	600		1.100		1.600		2.100		2.600		3.100	
	cabe	34.2 ton	100		170		240		310		380		450	
	kangkung	39.5 ton	139		239		339		439		539		639	
	bayam	4.2 ton	8		12		16		10		24		28	
	kacang panjang	20.7 ton	40		60		80		100		120		140	
	terong	12 ton	32		52		72		92		112		132	
	durian	137435 ton	138.000		13.900		14.000		14.100		14.200		14.300	
	ubi	860 ton	960		1.060		1.200		1.260		1.320		1.380	
	keladi	1778	1.800		1.850		1.900		1.950		2.000		2.100	
	lada	0	0		600		900		1.200		1.500		1.800	
	Cakupan bina kelompok petani	0	0		43		215		258		300		341	



MISI / TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT /OUTCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKI (2022)	
			2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.
			Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)		
5. Program Pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap	6920 ton	7.500	12	8.000	12	8.500	12	9.000	12	9.500	12	10.000	1
	Cakupan bina kelompok nelayan	166	190		210		220		260		280		300	
	Konsumsi ikan	37.37 kg	38		39		40		42		43		44	
6. Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya	10255 ton	10700	1	12200	1,05	12700	0,95	13200	0,9	13700	0,85	14200	
7. Program pengembangan industri kecil dan menengah	Cakupan bina kelompok pengrajin	0	0	12	5	12,06	10	12,12	15	12,18	20	12,24	25	1
Tujuan 2 :	Mewujudkan perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan inflasi daerah													
Sasaran 1	Meningkatnya kesempatan kerja Pemerataan pendapatan	Tingkat Pengangguran terbuka	1,25	1,01	0,85		0,7		0,55		0,39		0,24	
		Pendapatan Perkapita	42,79	46,21	49,56		52,91		56,27		59,62		60	
		Gini Rasio	0,306	0,29	0,28		0,19		0,18		0,15		0,13	
		Persentase penduduk miskin	15,12	14,49	14,11		13,73		13,35		12,98		12,5	



MISI / TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT /OUTCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKI (2022)	
			2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Milyar)
			Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)		
1. Program pengembangan kewirausahaan, keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dan koperasi	Persentase koperasi aktif	35,88%	3588,00%	3	36	3	37	3	38	3	40	3	50	3
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	99,9%	99,9%		99		98,5		98		97,5		97	
Program Peningkatan penanaman modal daerah	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi Penanaman Modal Daerah (milyar rupiah)	66160 juta rupiah	66.700	4	67.400	4	68.000	4	68.700	4	69.400	4	71.000	4
Sasaran 2	Terkendalinya tingkat inflasi daerah	4,81	4,33		4,2		4,07		3,95		3,82		3,69	
Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Cakupan pasar per satuan wilayah	50%	60	1,8	70	1,81	80	1,82	90	1,83	90	1,84	100	1

Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih, Akuntabel dan Melayani

MISI / TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT /OURCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR (2022)	
			2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Milyar)
			Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)		
Tujuan 1 :	Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien													



MISI / TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT /OURCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR (2022)	
				2017		2018		2019		2020		2021			
				Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)		
Sasaran 1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indes Kepuasan masyarakat	0	0	28		45		55		65		65		
	1. Program perencanaan pembangunan daerah	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	10%	15	9	20	9,05	25	9,09	30	9,14	35	9,18	40	9,2:
		Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	70%	70		80		100		100		100		100	
		Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	70%	70		80		100		100		100		100	
	2. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WDP	9	WTP	9,05	WTP	9,09	WTP	9,14	WTP	9,18	WTP	9,2:
		% PAD terhadap total pendapatan	4,61%	5		7		9		11		13		15	
	3. Program Penelitian dan Pengembangan pembangunan Daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	0%	0	1,2	1	1,21	1	1,21	2	1,22	2	1,22	5	1,2:
	4. Program Pengembangan data / informasi dan statistik daerah	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	3 sistem	8	1,8	8	1,81	9	1,82	10	1,83	10	1,84	10	1,8:





RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022

MISI / TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT /OURCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR (2022)	
			2017		2018		2019		2020		2021			
			Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)		
5. Peningkatan Kapasitas, pembinaan dan pengembangan Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	30%	35	9	40	9,05	45	9,09	50	9,14	65	9,18	70	9.23
	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%												
6. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Penyelesaian kasus tanah negara	2%	5	1	7	1	9	1	11	1	15	1	20	6
Tujuan 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel														
Sasaran 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Opini BPK	WDP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	
	Peringkat penilaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	C	C		CC		B		B		B		BB	
	Maturitas SPIP	level 1	level 1		level 1		level 2		level 3		level 3		level 3	



RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022

MISI / TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT /OURCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR (2022)	
			2017		2018		2019		2020		2021			
			Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)		
	Realisasi Indikator Kinerja yang tercapai sesuai target (%)	68	70		75		80		85		90		95	
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksana Kebijakan KDH	Persentase tindak lanjut temuan	20%	40	6,6	60	60	70	60,30	80	60,60	90	60,90	100	61,2
	Persentase pelanggaran pegawai	20%	40		60		70		80		90		100	
	Jumlah temuan BPK menurun meningkat	50%	40		35		30		25		15		10	
2. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Tersedianya Kebijakan pembangunan daerah	40%	45	24	50	24,12	52	24,24	55	24,36	60	24,48	70	24,6
3. Program peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	0%	0	24	20	24,12	30	24,24	40	24,36	45	24,48	50	24,6
	Jumlah produk hukum inisiatif DPRD	10%	10		15		17		20		22		25	



RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022

MISI / TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT /OURCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR (2022)	
			2017		2018		2019		2020		2021			
			Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)
4. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	1	3	0,6	3	0,60	3	0,61	6	0,61	6	0,61	28	0,61
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah														

Misi 5 : Mewujudkan pelestarian dan pengamalan Nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa

MISI / TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT /OURCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2022	
			2017		2018		2019		2020		2021			
			Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)
Tujuan 1 : Mewujudkan pelestarian dan pengamalan Nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa														
Sasaran 1 Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya	Budaya Mentawai yang dilindungi dan dilestarikan	0 MHA	0		2		3		4		5		5	



RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022

MISI / TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT /OURCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2022		
			2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Milyar)	
			Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)			
	1. Program Pengembangan Nilai Budaya	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	2 kali	2	3,6	3	3,62	4	3,64	5	3,65	6	3,67	7	3,69
	2. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Penetapan masyarakat hukum adat	0	0	0,3	2	0,30	3	0,30	4	0,30	5	0,31	5	
Tujuan 2 :	Mewujudkan kehidupan yang harmonis dan seimbang														
Sasaran 1	Meningkatnya kehidupan yang aman dan harmonis	Tingkat Kriminalitas	3,54 %	3,4		3,3		3,2		3,1		3		2,9	
	1. Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	45,63	50		60		70		80		90		100	
		Rasio bayi berakte kelahiran	53,73	55		65		75		85		95		100	
		Rasio pasangan berakte nikah	24,42	40		55		70		80		90		100	
	2. Program peningkatan Keberdayaan masyarakat Pedesaan	Persentase Posyandu aktif	40%	50		60		70		80		90		100	
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	345	355		365		375		385		395		400	
	3. Program pemerintahan desa	Desa Sangat Tertinggal	12 desa	10	54	7	54,27	5	54,54	3	54,81	0	55,09	0	



MISI / TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT /OURCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2022		
			2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Milyar)	
			Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)			
	Desa tertinggal	20 desa	18		16		14		13		12		12		
	Desa Berkembang	7 desa	10		13		15		17		20		20		
	Desa Maju	4 desa	5		6		7		7		7		7		
	Desa Mandiri	0 desa	0		1		2		3		4		4		
	4. Program pembinaan kepemudaan dan olahraga	Persentase organisasi pemuda yang aktif	5 organisasi	6	2,4	7	2,41	8	2,42	9	2,44	10	2,45	11	
		Persentase wirausaha muda	1%	1		2		5		7		10		15	
		Jumlah atlet berprestasi	22 atlet	25		28		31		34		37		41	
		Jumlah prestasi olahraga	8 olahraga	9		11		13		15		17		19	
	5. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	80	80	0,3	85	0,30	87	0,30	90	0,30	95	0,31	100	
		Persentase Penegakan PERDA	40%	45		50		55		65		70		75	

MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT / OURCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2022	
			2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. (Milyar)
			Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)		
6. Program Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya (PMKS)	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	18,91 %	20	0,6	25	0,60	30	0,61	35	0,61	40	0,61	45	
7. Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80%	85	0,3	90	0,30	95	0,30	100	0,30	100	0,31	100	
8. Program pembinaan anak terlantar para penyandang cacat dan trauma	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	60	60	0,3	65	0,30	68	0,30	70	0,30	75	0,31	77	



## RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022

MISI / TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT /OURCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2022	
				2017		2018		2019		2020		2021			
				Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)
	9. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	45	50	0,3	52	0,30	55	0,30	57	0,30	58	0,31	60	

## BAB VII

### KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Indikasi rencana program prioritas merupakan upaya-upaya yang akan ditempuh dan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Dalam implementasinya secara operasional, program-program tersebut dijabarkan kedalam urusan-urusan yang menjadikewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Program-program tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait sehingga dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas Perangkat Daerah dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah disusun, yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah langsung dalam pencapaian Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan indikator kinerja tersebut dikelompokkan ke dalam 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.

Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sosial, Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, dan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sedangkan untuk urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan : tenaga kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Arsip.

Terkait dengan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yaitu Urusan :





Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi.

Untuk dapat merumuskan program secara terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing program diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Indikator dan target kinerja ini ditetapkan dengan memperhatikan kondisi awal dan disusun bersama dengan Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan untuk mencapai target tersebut.

Pada target kinerja diperkirakan output dan outcome yang akan dihasilkan dari masing-masing program. Penulisan outcome selain output pada indikator kinerja dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada Perangkat Daerah dalam merumuskan kegiatan-kegiatan pada setiap program prioritas pada penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Sedangkan pada kerangka pendanaan diperkirakan besarnya dana APBD dan sumber dana lainnya yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian target tersebut serta Perangkat Daerah penanggungjawab. Dalam rancangan RPJMD ini belum memperhitungkan indikasi pendanaan peralihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rincian program berdasarkan urusan dengan indikator dan target kinerja serta indikasi kebutuhan pendanaan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.1. dan 7.2



**Tabel 7.1**  
**Integrasi Program/Kegiatan Prioritas dengan Pusat dan Provinsi Sumatera Barat beserta Sumber Pendanaannya**

NO	PROYEK	TARGET	LOKASI	PERKIRAAN ANGGARAN (Milyar Rupiah)	INTEGRASI PROGRAM NASIONAL	PERKIRAAN SUMBER ANGGARAN
1	Pembangunan Jalan	250 km	Jalan Trans Mentawai	1000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Jalan P. Sipora</li> <li>Pembangunan Jalan Sieberut - Muara Sigep (KSPN)</li> </ul>	APBN, APBD
2	Pembangunan Embung	4 lokasi	(DAS Saureinuk, DAS Siberut, DAS Sikabalauan, DAS Malakopa)	40		APBN, APBD
3	Pembangunan Irigasi	2500 ha	42 daerah irigasi	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan DI Malakopa, DI Pogari Takmunga, DI Bay-Bai, DI Mabolak, DI Saureinu</li> </ul>	APBN, APBD
4	Pembangunan SPAM	7 lokasi	10 kec	49		APBN, APBD
5	Pembangunan TPA	4 TPA	TPA Siberut, TPA Berkat, TPA Pagai Utara, TPA Pagai Selatan	20		APBN, APBD
6	Pembangunan Destinasi Pariwisata	4 lokasi	Siberut Barat Daya, Sipora Selatan, Pagai Selatan, Pagai Utara	80		APBN, APBD
7	Pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu	7 lokasi	Siberut Utara, Siberut Selatan, Sipora Utara Sipora Selatan, Pagai Utara, Pagai Selatan, Sikakap	70		APBN, APBD
8	Pembangunan Perikanan Terpadu	3 lokasi	Sikakap, Sipora, Siberut Utara	60		APBN, APBD
9	Pembangunan Peternakan Terpadu	4 lokasi	Siberut, Sipora Pagai Utara, Pagai Selatan	40		APBN, APBD
10	Pembangunan Energi Baru Terbarukan	5 lokasi	5 desa	100	Pembangunan PLTS di 8 lokasi	Swasta



## RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022

NO	PROYEK	TARGET	LOKASI	PERKIRAAN ANGGARAN (Milyar Rupiah)	INTEGRASI PROGRAM NASIONAL	PERKIRAAN SUMBER ANGGARAN
11	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	1200 unit	10 Kecamatan	18		APBN, APBD
12	Pembangunan BTS	12 lokasi	10 Kecamatan	-	Penyediaan Akses Internet di 11 lokasi	APBN
13	Pembangunan Perguruan Tinggi	1 Lokasi	Sipora Utara	20		APBN, APBD
14	Pembangunan Rumah Sakit Pratama	2 buah	Siberut, Sikakap	40		APBN, APBD
15	Pembangunan Bandara Rokot Dan Peipei	2 lokasi	Rokot dan Peipei	10	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan Bandara Rokot (KSPN)</li></ul>	APBN, APBD
16	Pembangunan Dermaga	5 lokasi	Labuan Bajau, Subelen, Mabukuk, Sagitci, Sinakak	50	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan Pelabuhan Laut Pasapat</li><li>• Pengembangan Dermaga Penyeberangan Tuapejat</li><li>• Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sikakap</li></ul>	APBN, APBD
17	Pengadaan Kapal	2 buah	Ke Pantai Barat, Penyeberangan Sipora Pagai	60		APBN, APBD
18	Penyertaan modal BUMD	75 M	Tuapejat	75		APBN, APBD
19	Pembangunan Kewirausahaan	1000 UKM	10 kecamatan	10		APBN, APBD
20	Pembangunan Kawasan Industri	1 industri	Taraet	30		APBN, APBD
21	Pembangunan Kawasan Ibukota Kabupaten	1 lokasi	Tuapejat	20		APBN, APBD
22	Pembangunan KEK	1 lokasi	KEK Pei-pe	10		APBN, APBD
23	Beasiswa	500 orang	10 kecamatan	55		APBD, Swasta
24	Pembangunan GOR	1 buah	SP 3	100		
<b>TOTAL</b>				<b>2.017</b>		



Tabel 7.2

Indikasi Rencana Program prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kepulauan Mentawai

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN												KONDISI AKHIR 2022		PERANGK. DAERAH PENANGGUL JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. (Milyar)	
				Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)			
	Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai)				300		301.50		303.01		304.52		306.05		307.58		1,823	Seluruh Of
	Non Urusan																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	40	100%	40.20	100%	40.40	100%	40.60	100%	40.81	100%	41.01	100%	243	Seluruh Of
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	10	100%	10.05	100%	10.10	100%	10.15	100%	10.20	100%	10.25	100%	61	Seluruh Of
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	10	100%	10.05	100%	10.10	100%	10.15	100%	10.20	100%	10.25	100%	61	Seluruh Of
5	Program Peningkatan Sdisiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100%	100%	5	100%	5.03	100%	5.05	100%	5.08	100%	5.10	100%	5.13	100%	30	
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	5	100%	5.03	100%	5.05	100%	5.08	100%	5.10	100%	5.13	100%	30	Seluruh Of
1.01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																	
1.01.01	PENDIDIKAN																	
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatnya APK PAUD	20%	25	3.60	30	3.62	35	3.6	40	3.7	45	3.7	50	3.7	50	22	Dinas Pendid dan Kebudayaan



RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN												KONDISI AKHIR 2022		PERANGK. DAERAH PENANGGU JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. (Milyar)	
				Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)			
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD	111	113.01	99.60	114.45	100.1	115.9	100.6	117.35	101.1	118.79	101.6	119	102.1	119	605	Dinas Pendid dan Kebuday
		APK SMP	79.73%	83, 07 %		84%		85%		86%		88%		88.76%		88.76 %		Dinas Pendid dan Kebuday
		APM SD /MI/ paket A	98.30%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Pendid dan Kebuday
		APM SMP SMP/MTS/Paket B	59.19%	66%		70.38		75%		80%		85%		86%		86%		Dinas Pendid dan Kebuday
		Bangunan Sekolah SD kondisi bangunan Baik	92.64%	94%		95%		96%		97%		98%		99%		99%		Dinas Pendid dan Kebuday
		Bangunan Sekolah SMP kondisi bangunan Baik	94.62%	95%		96%		97%		98%		99%		100%		100%		Dinas Pendid dan Kebuday
		Angka Putus sekolah SD /MI/ paket A	0.21%	0.20%		0.19%		0.18%		0.17%		0.16%		0.15%		0.15%		Dinas Pendid dan Kebuday
		Angka Putus sekolah SMP/MTS/Paket B	0.36%	0.35%		0.34%		0.33%		0.32%		0.31%		0.30%		0.30%		Dinas Pendid dan Kebuday
3	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru Yang memenuhi kualifikasi S1	74.19%	79%	12.00	84%	12.1	89%	12.1	94%	12.2	100%	12.2	100%	12.3	100%	73	Dinas Pendid dan Kebuday
		Angka Kelulusan SD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Pendid dan Kebuday
		Angka Kelulusan SMP	98%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Pendid dan Kebuday
		Sekolah berakreditasi	0 sekolah	0		2		2		2		2		10 sekolah		10 sekolah		Dinas Pendid dan Kebuday
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	59.91%	60%		63		64		65		66		67		67		Dinas Pendid dan Kebuday
4	Program Pendidikan Tinggi	Rasio Lulusan pendidikan tinggi	40%	42	2.40	44	2.41	46	2.42	48	2.44	50	2.45	52	2.46	52	15	Dinas Pendid dan Kebuday



RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN												KONDISI AKHIR 2022		PERANGK. DAERAH PENANGGU JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. (Milyar)	
				Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)			
5	Program Pendidikan Non Formal	Tuntasnya buta Aksara	93, 70%	94	2.40	95	2.41	96	2.42	97	2.44	98	2.45	99	2.46	99	15	Dinas Pendid dan Kebudayaan
1.01.02	<b>KESEHATAN</b>																	
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin	70%	80%	24.00	80%	24.12	100%	24.24	100%	24.36	100%	24.48	100%	24.61	100%	146	Dinas Keseh
		Cakupan Desa UCI	51%	55		60		63		67		72		76		76		Dinas Keseh
		Menurunnya kasus penyakit menular	50%	60		70		80		85		90		95		95		Dinas Keseh
		Angka kematian Bayi	15 kasus	15		13		11		9		7		3		3		Dinas Keseh
		Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan	45%	5		4		3		2		1		-		-		Dinas Keseh
		Cakupan penemuan dan penanganan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	85.60%	80%		70%		60%		50%		40%		30%		30%		Dinas Keseh
2	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan obat dengan kebutuhan obat	50%	60	4.00	70	4.02	80	4.04	90	4.06	100	4.08	100	4.10	100	24	Dinas Keseh
3	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%	2.00	100%	2.01	100%	2.02	100%	2.03	100%	2.04	100%	2.05	100%	12	Dinas Keseh
4	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rasio dokter per satuan penduduk	0.03	0.1	6.60	0.2	6.63	0.3	6.67	0.4	6.70	0.5	6.73	0.6	6.77	0.6	40	Dinas Keseh
		Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0.09	0.2		0.4	0.6	0.8		0.9		1		1		-	Dinas Keseh	
5	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Puskesmas	rasio puskesmas	1.8%	2.0%	18.00	3.0%	18.09	4.0%	18.18	5.0%	18.27	6.0%	18.36	7.0%	18.45	7.0%	109	Dinas Keseh
		Cakupan pembantu puskesmas	15.16	20%		25%	30%		35%		40%		45%		45%		-	Dinas Keseh



RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN												KONDISI AKHIR 2022		PERANGK. DAERAH PENANGGU JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	
6	Program pencegahan dan penganggulangan penyakit menular	Cakupan penemuan dan penanganan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	86%	87%	2.00	88%	2.01	89%	2.02	90%	2.03	95%	2.04	100%	2.05	100%	12	Dinas Keseh
7	Program Pengadaan, Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1.30%	1.5%	10.00	1.6%	10.05	1.7%	10.10	1.8%	10.15	1.9%	10.20	2%	10.25	2%	61	RSUD
1.01.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
1	Program pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	5,97%	7	146.00	9	146.73	11	147.46	13	148.20	15	148.94	17	149.69	17	887	Pekerjaan ur dan penata ruang
2	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rasio Jaringan Irigasi	11,61 %	13	6.00	15	6.03	17	6.06	19	6.09	21	6.12	23	6.15	25	36	Pekerjaan ur dan penata ruang
3	Program pembangunan turap/talud/ bronjong	Persentase pembangunan turap di wilayah rawan abrasi dan longsong	2.3	3.3	6.00	4.3	6.03	5.3	6.06	6.3	6.09	7.3	6.12	8.3	6.15	9.3	36	Pekerjaan ur dan penata ruang
		Persentase sungai yang dinormalisasi	0	10		20		30		40		50		60		60		Pekerjaan ur dan penata ruang
4	Program Perencanaan, pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	10%	15	1.80	20	1.81	25	1.82	30	1.83	35	1.84	40	1.85	40	11	Pekerjaan ur dan penata ruang, Bapp



RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN												KONDISI AKHIR 2022		PERANGK. DAERAH PENANGGU JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	
		Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	1%	2		3		4		5		6		7		7		Pekerjaan ur dan penata ruang
		Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	50.5%	50		47		45		43		42		41		41		Pekerjaan ur dan penata ruang
1.01.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
1	Program Pengembangan Perumahan	Rasio rumah layak huni	65%		4.20		4.22		4.24		4.26		4.28		4.31		26	Dinas Perum dan Kawas Pemukima
		Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	14%	13		12.5		12		11.5		10		9		9		Dinas Perum dan Kawas Pemukima
2	Program Peningkatan kinerja air minum dan air limbah	Persentase rumah tinggal berakses air minum	30%	33	15.60	38	15.68	40	15.76	42	15.84	43	15.91	47	15.99	47	95	Dinas Perum dan Kawas Pemukima
3	Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	50%	52	4.20	55	4.22	57	4.24	59	4.26	60	4.28	62	4.31	62	26	Dinas Perum dan Kawas Pemukima
1.01.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
1	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	80	80	0.30	85	0.30	87	0.30	90	0.30	95	0.31	100	0.31	100	2	Setda, Kan Kesbang, Sa Polisi Pamc Praja dan Pemadan Kebakara





RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN												KONDISI AKHIR 2022		PERANGK. DAERAH PENANGGU JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. (Milyar)	
				Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)			
1.01.06	SOSIAL																	
1	Program Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya (PMKS)	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	18,91 %	20	0.60	25	0.60	30	0.61	35	0.61	40	0.61	45	0.62	45	4	Dinas Sosial Pemberday. Perempuan. Perlindungan
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80%	85	0.30	90	0.30	95	0.30	100	0.30	100	0.31	100	0.31	100	2	Dinas Sosial Pemberday. Perempuan. Perlindungan
3	Program pembinaan anak terantar para penyandang cacat dan trauma	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	60	60	0.30	65	0.30	68	0.30	70	0.30	75	0.31	77	0.31	77	2	Dinas Sosial Pemberday. Perempuan. Perlindungan
4	Program Penanggulangan bencana	Desa Siaga bencana	0	2	3.00	4	3.02	6	3.03	8	3.05	10	3.06	12	3.08	12	18	BPBD
1.02	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																	
1.02.01	TENAGA KERJA																	
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	0	5	3.00	12	3.02	14	3.03	16	3.05	18	3.06	20	3.08	20	18	Dinas Penan. Modal dan P



RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN												KONIDI AKHIR 2022		PERANGK. DAERAH PENANGGU JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. (Milyar)	
				Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)			
1.02.02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
2	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	45	50	0.30	52	0.30	55	0.30	57	0.30	58	0.31	60	0.31	60	2	Dinas Sosial Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan
1.02.03	PANGAN																	
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Rasio cadangan pangan utama	0.70%	0.75	4.20	0.8	4.22	0.85	4.24	0.9	4.26	0.95	4.28	1	4.31	1	26	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Produksi Pelenakan																Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Sapi	1315 ekor	1,600		1,900		2,200		2,500		2,800		3,100		3,100		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Babi	28610 ekor	28,640		28,670		28,700		28,730		28,760		28,790		28,790		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Unggas	75904 ekor	80,000		95,000		110,000		125,000		140,000		155,000		155,000		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Produksi telur																Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Produksi susu																Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.02.04	PERTANAHAN																	
1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Penyelesaian kasus tanah negara	2%	5	0.60	7	0.60	9	0.61	11	0.61	15	0.61	20	0.62	20	4	Seluruh OPD



RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN												KONDISI AKHIR 2022		PERANGK. DAERAH PENANGGU JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. (Milyar)	
				Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)			
1.02.05	LINGKUNGAN HIDUP																	
1	Program Peningkatan kinerja persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	5,9%	8	4.20	10	4.22	15	4.24	17	4.26	20	4.28	22	4.31	22	26	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
1.02.06	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL																	
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	45.63	50	1.80	60	1.81	70	1.82	80	1.83	90	1.84	100	1.85	100	11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Rasio bayi berakte kelahiran	53.73	55		65		75		85		95		100		100	-	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Rasio pasangan berakte nikah	24.42	40		55		70		80		90		100		100	-	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.02.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
1	Program peningkatan Keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase Posyandu aktif	40%	50		60		70		80		90		100		100	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	345	355		365		375		385		395		400		400	-	
2	Program pemerintahan desa	Desa Sangat Tertinggal	12 desa	10	54.00	7	54.27	5	54.54	3	54.81	0	55.09	0	55.36	0	328	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Desa tertinggal	20 desa	18		16		14		13		12		12		12	12	DPMDPP dan
		Desa Berkembang	7 desa	10		13		15		17		20		20		20	20	DPMDPP dan
		Desa Maju	4 desa	5		6		7		7		7		7		7	7	DPMDPP dan
		Desa Mandiri	0 desa	0		1		2		3		4		4		4	4	DPMDPP dan



RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN												KONDISI AKHIR 2022		PERANGK. DAERAH PENANGGU JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. (Milyar)	
				Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)			
1.02.08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
	Program keluarga Berencana	Rasio Akseptor KB	53.23	60%	3.00	70%	3.02	75%	3.03	80%	3.05	85%	3.06	90%	3.08	90%	18	Dinas Pemberdaya Masyarakat, C dan Pengend Penduduk c Keluarga Berencana
1.02.09	PERHUBUNGAN																	
1	Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Transportasi	Jumlah sarana dan prasarana perhubungan			9.70		9.75		9.80		9.85		9.90		9.94		59	Dinas Perhubu
		Pelabuhan	9 buah	9		9		10		11		13		14		14	-	Dinas Perhubu
		Udara	1 buah	1		1		2		2		2		2		2	-	Dinas Perhubu
		Terminal Bis	0	0		0		1		1		2		3		3	-	Dinas Perhubu
		Jumlah kapal															-	Dinas Perhubu
2	Program peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah orang/ melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	101.235 kali	108,235	0.90	115,235	0.90	122,235	0.91	129,235	0.91	136,235	0.92	143,235	0.92	143,235	5	Dinas Perhubu
		Jumlah barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	87.456 ton	89,156		90,856		92,556		94,256		95,956		97,656		97,656	-	Dinas Perhubu
4	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Terjaga dan terkenadinya keamanan lalu lintas	99%	100	0.90	100	0.90	100	0.91	100	0.91	100	0.92	100	0.92	100	5	Dinas Perhubu
1.02.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan layanan telekomunikasi	56%	57	0.30	59	0.30	61	0.30	63	0.30	65	0.31	67	0.31	67	2	Dinas Komun dan Informa



RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN												KONDISI AKHIR 2022		PERANGK. DAERAH PENANGGU JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. (Milyar)	
				Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)			
1.02.11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																	
1	Program pengembangan kewirausahaan, keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dan koperasi	Persentase koperasi aktif	35,88%	35,88%	3,00	36	3	37	3	38	3	40	3	50	3,08	50	18	Dinas Koper Perindustrian Perdagangan
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	99,9%	99,9%		99		98,5		98		97,5		97		97		Dinas Koper Perindustrian Perdagangan
1.02.12	PENANAMAN MODAL																	
1	Program Peningkatan penanaman modal daerah	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi Penanaman Modal Daerah (milyar rupiah)	66160 juta rupiah	66,700	4,20	67,400	4	68,000	4	68,700	4	69,400	4	71,000	4,31	71,000	26	Dinas Penan Modal dan P
1.02.13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA																	
1	Program pembinaan kepemudaan dan olahraga	Persentase organisasi pemuda yang aktif	5 organisasi	6	2,40	7	2,41	8	2,42	9	2,44	10	2,45	11	2,46	11	15	Dinas Pariwis Pemuda di Olahraga
		Persentase wirausaha muda	1%	1		2		5		7		10		15		15		Dinas Pariwis Pemuda di Olahraga
		Jumlah atlet berprestasi	22 atlet	25		28		31		34		37		41		41		Dinas Pariwis Pemuda di Olahraga
		Jumlah prestasi olahraga	8 olahraga	9		11		13		15		17		19		19		Dinas Pariwis Pemuda di Olahraga
1.02.14	URUSAN KEBUDAYAAN																	
1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	2 kali	2	3,60	3	3,62	4	3,64	5	3,65	6	3,67	7	3,69	7	22	Dinas Pendid dan Kebudayaan
	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Penetapan masyarakat hukum adat	0	0	0,3	2	0,30	3	0,30	4	0,30	5	0,31	5	0,31		2	Dinas Pendid dan Kebudayaan



RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN												KONDISI AKHIR 2022		PERANGK. DAERAH PENANGGU JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. (Milyar)	
				Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)			
1.02.15	PERPUSTAKAAN																	
	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1450 orang	1500	0.30	1600	0.30	1700	0.30	1800	0.30	1900	0.31	2000	0.31	2000	2	Dinas Kearsi dan Perpustakaan
1.02.16	KEARSIPAN																	
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	0 SKPD	1	0.60	3	0.60	6	0.61	6	0.61	6	0.61	28	0.62	40	4	Dinas Kearsi dan Perpustakaan
2.00	URUSAN PILIHAN																	
2.00.01	KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
1	Program Pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap	6920 ton	7,500	12.00	8,000	12	8,500	12	9,000	12	9,500	12	10,000	12.30	10,000	73	Dinas Perikanan
		Cakupan bina kelompok nelayan	166	190		210		220		260		280		300		300		Dinas Perikanan
		Konsumsi ikan	37.37 kg	38		39		40		42		43		44		44		Dinas Perikanan
2	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya	10255 ton	10700	6.00	12200	6.03	12700	6.06	13200	6.09	13700	6.12	14200	6.15	14200	36	Dinas Perikanan
2.00.02	PARIWISATA																	
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah wisatawan mancanegara	5480 orang	10,000	3.00	20,000	3	30,000	3	40,000	3	50,000	3	60,000	3.08	60,000	18	Dinas Pariwisata
		jumlah wisatawan domestik	685,000 orang	700,000		800,000		900,000		100,000		1,100,000		1,200,000		1,200,000		Dinas Pariwisata
		PAD sektor pariwisata	4 M	5		6		7		8		9		11		11		Dinas Pariwisata
2	Program Pengembangan destinasi Pariwisata	Lama kunjungan wisata	2 hari	3	9.00	4	9.05	5	9.09	6	9.14	7	9.18	7	9.23	7	55	Dinas Pariwisata



RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN												KONDISI AKHIR 2022		PERANGK. DAERAH PENANGGU JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. (Milyar)	
				Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)			
3	Program perencanaan dan pengembangan wilayah Strategis dan Cepat tumbuh	Kawasan Agroindustri	0	0	9.00	1	9.05	1	9.09	2	9.14	3	9.18	3	9.23	3	55	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2.00.03	<b>PERTANIAN</b>																	
1	Program Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan agroindustri berbasis kawasan (sentra industry)	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	4973 ton	5000	9.00	5450	9.05	5950	9.09	6350	9.14	6500	9.18	7000	9.23	7000	55	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Produksi komoditas unggulan																Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		kelapa	6494.5 ton	16,000		17,000		18,000		19,000		20,000		21,000		21,000		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		pisang	25693 ton	175,000		225,000		375,000		525,000		675,000		825,000		825,000		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		cengkeh	97.78 ton	597		697		797		897		997		1,097		1,097		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		pala	111.1 ton	600		1,100		1,600		2,100		2,600		3,100		3,100		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		cabe	34.2 ton	100		170		240		310		380		450		450		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		kangkung	39.5 ton	139		239		339		439		539		639		639		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
bayam	4.2 ton	8		12		16		10		24		28		28		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
kacang panjang	20.7 ton	40		60		80		100		120		140		140		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
terong	12 ton	32		52		72		92		112		132		132		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
durian	137435 ton	138,000		13,900		14,000		14,100		14,200		14,300		14,300		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		



RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN												KONDI AKHIR 2022		PERANGK. DAERAH PENANGGU JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. (Milyar)	
				Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)			
		ubi	860 ton	960		1,060		1,200		1,260		1,320		1,380		1,380		Dinas Ketaha Pangan da Pertanian
		keladi	1778	1,800		1,850		1,900		1,950		2,000		2,100		2,100		Dinas Ketaha Pangan da Pertanian
		lada	0	0		600		900		1,200		1,500		1,800		1,800		Dinas Ketaha Pangan da Pertanian
		Cakupan bina kelompok petani	0	0		43		215		258		300		341		341		Dinas Ketaha Pangan da Pertanian
2.00.04	PERDAGANGAN																	
	Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Cakupan pasar per satuan wilayah	50%	60	1.80	70	1.81	80	1.82	90	1.83	90	1.84	100	1.85	100	11	Dinas Koper Perindustrian Perdagangan
2.00.05	PERINDUSTRIAN																	
1	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Cakupan bina kelompok pengrajin	0	0	12.00	5	12.06	10	12.12	15	12.18	20	12.24	25	12.30	25	73	Dinas Koper Perindustrian Perdagangan
2	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	0	5	4.60	12	4.62	14	4.65	16	4.67	18	4.69	20	4.72	20	28	Dinas Koper Perindustrian Perdagangan
3	Program pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan	Persentase Rumah tangga menggunakan tenag listrik	30%	33	4.20	36	4.22	39	4.24	42	4.26	45	4.28	48	4.31	51	26	Dinas Koper Perindustrian Perdagangan
3.00	FUNGSI LAINNYA																	
3.00.01	PERENCANAAN PEMBANGUNAN																	
1	Program perencanaan pembangunan daerah	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	10%	15	9.00	20	9.05	25	9.09	30	9.14	35	9.18	40	9.23	40	55	Badan Perencana Pembangun Daerah





RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN												KONDISI AKHIR 2022		PERANGK. DAERAH PENANGGU JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. (Milyar)	
				Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)			
		Konsistensi Program RPJMD kedalam RPKD	70%	70		80		100		100		100		100		100		Badan Perencana Pembangun Daerah
		Penjabaran Konsistensi Program RPKD kedalam APBD	70%	70		80		100		100		100		100		100		Badan Perencana Pembangun Daerah
3.00.02	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	
	Program Penelitian dan Pengembangan pembangunan Daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	0%	0	1.20	1	1.21	1	1.21	2	1.22	2	1.22	5	1.23	5	7	Badan Perencana Pembangun Daerah
3.00.03	KEUANGAN																	
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WDP	9.00	WTP	9.05	WTP	9.09	WTP	9.14	WTP	9.18	WTP	9.23	WTP	55	Badan Keuar Daerah
		% PAD terhadap total pendapatan	4,61%	5		7		9		11		13		15		15		Badan Keuar Daerah
3.00.04	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																	
	Peningkatan Kapasitas, pembinaan dan pengembangan Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	50%	9.00		9.05		9.09		9.14		9.18		9.23		55	BKPSDV
3.00.05	PENGAWASAN																	
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksana Kebijakan KDH	Persentase tindak lanjut temuan	20%	40	6.60	60	60	70	60.30	80	60.60	90	60.90	100	61.21	100	310	Inspektora
		Persentase pelanggaran pegawai	20%	40		60		70		80		90		100		100		Inspektora



RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL (2016)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN												KONDISI AKHIR 2022		PERANGK. DAERAH. PENANGGU JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. (Milyar)	
				Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)			
		Jumlah temuan BPK menurun meningkat	50%	40		35		30		25		15		10		10		Inspektora
3.00.06	SEKDA																	
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Tersedianya Kebijakan pembangunan daerah	40%	45	24.00	50	24.12	52	24.24	55	24.36	60	24.48	70	24.61	70	146	Setda
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan																	
3.00.07	SEKWAN																	
	Program peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	0%	0	24.00	20	24.12	30	24.24	40	24.36	45	24.48	50	24.61	50	146	Sekretariat D
		Jumlah produk hukum inisiatif DPRD	10%	10		15		17		20		22		25		25		Sekretariat D
		TOTAL			991		992,29		992,78		993,28		993,78		1,075		6,318	



## BAB VIII

### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

#### 8.1. Indikator Kinerja Utama

Keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala daerah periode 2017-2022 tercermin dari indikator utama yang telah ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif diharapkan akan terus berlangsung dalam proses pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam proses pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai ke depan. Pemerataan pendapatan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan diupayakan dapat menciptakan lapangan kerja yang tersedia sehingga dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan. Muara dari seluruh pelaksanaan pembangunan tersebut adalah peningkatan indeks pembangunan manusia. Disamping itu seluruh pelaksanaan pembangunan tersebut diupayakan mampu menjaga keselarasan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih indikator kinerja utama dan daerah dan target capaian selama lima tahun ke depan



**Tabel 8.1**  
**Indikator Kinerja Utama**

NO	IKU	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Produktif									
1	Indeks Pembangun Manusia	%	58,27	59,46	60,48	61,5	62,52	63,54	64,56
2	Harapan Lama sekolah	tahun	11,74	11,80	11,90	11,95	11,99	12,00	12,01
3	Rata-rata lama sekolah	tahun	6,27	6,51	6,59	6,67	6,75	6,84	6,92
4	Angka harapan-hidup	%	64,36	64,65	64,67	64,89	65,11	65,33	65,54
5	Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)	Per 1000 KH	27	27	26	25,5	25	24	27
6	Angka Kematian Ibu (100rb kh)	(100rb kh)	442	397	379	361	343	325	306
7	Prevalensi Gizi Buruk	%	0,35	0,49	1,78	0,86	1,10	0,91	0,35
8	Prevalensi Gizi Kurang	%	4,75	4,7	4,65	4,6	4,55	4,5	4,45
9	Angka Melek Huruf	%	93,7	94	95	96	97	98	99
Misi 2 : Mewujudkan Infrastruktur yang Merata, Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan									
1	Jalan Mantap	%	0						
2	Ketaaan terhadap RTRW	%	10	15	20	25	30	35	35%
3	Jumlah arus Penumpang umum kapal	orang/ tahun	4950	5000	5050	5100	5150	5200	5250
4	Cakupan layanan telekomunikasi	%	80	83	86	90	95	100	100



NO	IKU	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
5	Rasio Elektrifikasi	%	25	32	33	35	40	46	46%
6	Rasio rumah layak huni	%	60	65	70	75	80	85	90%
7	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih	%	30	40	45	50	55	60	65%
8	Fasilitas Pengurangan sampah di perkotaan	%	0	0	10	20	30	40	40%
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	50	55	60	65	70	75	75%
10	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	33	33	33	32	32	32	32%
Misi 3 :Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat yang Berdaya Saing Berbasis Maritim									
1	Pertumbuhan ekonomi	%	5.01	5.61	5.67	5.76	5.83	6	6
2	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	4,61	5	5,5	6	6,5	7	7
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,66	0,69	0,70	0,80	0,90	1	1
4	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	16,44	16,42	16,40	15,90	15,84	15,80	15,80
5	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	12,40	12,10	11,90	11,70	11,50	11,35	11,35
6	Pendapatan Perkapita	Rp juta/orang	42.79	46.21	49.56	52.91	56.27	59.62	59.62
7	Gini Rasio	-	0,306	0,29	0,28	0,19	0,18	0,15	0,16
8	Persentase penduduk miskin	%	15, 12	14.49	14.11	13.73	13.35	12.98	12.60



NO	IKU	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
9	Tingkat Pengangguran terbuka	%	1,25	1.01	0.85	0.70	0.55	0.39	0.24
10	Inflasi	%	4.81	4.33	4.20	4.07	3.95	3.82	3.69
<b>Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih, Akuntabel dan Melayani</b>									
1	Indes Kepuasan masyarakat	-	0	0	28	45	55	65	65
2	Opini BPK	-	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Peringkat penilaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	C	C	CC	B	B	B	BB
4	Maturitas SPIP	level	level 1	level 1	level 1	level 2	level 3	level 3	level 3
5	Realisasi Indikator Kinerja yang tercapai sesuai target (%)	%	68	70	75	80	85	90	95
<b>Misi 5 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Partisipatif, Harmonis dan Seimbang Berbasis Sosial dan Budaya</b>									
1	Pengakuan Masyarakat hukum adat	MHA	0	0	2	3	4	5	5
2	Tingkat Kriminalitas	%	3,54	3,4	3,3	3,2	3,1	3	2,9

## 8.2 Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau komposisinya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2017-2022 yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.



**Tabel 8.2**  
**Indikator Kinerja Daerah**

No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Awal (2016)	Capaian Kinerja Program Dan Kinerja Pendanaan					Kondisi Akhir 2022
			2017	2018	2019	2020	2021	
			Target	Target	Target	Target	Target	
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>								
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.01%	5.61	5.67	5.76	5.83	6	6
2	Laju inflasi (%)	4.81%	4.33	4.2	4.07	3.95	3.82	3.69
3	PDRB per kapita (Rp. juta)	42.79	46.21	49.56	52.91	56.27	59.62	59.62
4	Indeks Gini	0,306	0,29	0,28	0,19	0,18	0,15	0,16
5	Persentase penduduk miskin (%)	15,12 %	14.49	14.11	13.73	13.35	12.98	12.6
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	58,27	59,46	60,48	61,5	62,52	63,54	64,56
a.	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	6,27	6.51	6.59	6.67	6.75	6.84	6.92
b.	Angka harapan hidup (tahun)	64,36	64,65	64,67	64,89	65,11	65,33	65,54
c.	Pengeluaran Perkapita (Ribu/Kapita/Tahun)							
12	Angka Melek Huruf	93,70	94	95	96	97	98	99
13	Prevalensi Gizi Buruk	0,35	0,49	1,78	0,86	1,10	0,91	0,35
14	Prevalensi balita gizi kurang	4,75	4,7	4,65	4,6	4,55	4,5	4,45
15	Cakupan Desa Siaga Aktif							
16	Tingkat pengangguran terbuka	1,25	1.01	0.85	0.7	0.55	0.39	0.24
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	0	28	45	55	65	65
18	Persentase PAD terhadap pendapatan	4,61	5	5,5	6	6,5	7	7
19	Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
20	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,66 %	0,69	0,70	0,80	0,90	1	1





No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Awal (2016)	Capaian Kinerja Program Dan Kinerja Pendanaan					Konidi Akhir 2022
			2017	2018	2019	2020	2021	Target
			Target	Target	Target	Target	Target	
21	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	16,44 %	16.42	16,40	15,90	15,84	15,80	15,80
22	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	12,40 %	12,10	11,90	11,70	11,50	11,35	11,35
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>								
I	<b>URUSAN WAJIB</b>							
1	<b>Pendidikan</b>							
a	APK PAUD	20%	25	30	35	40	45	50
b	Angka Partisipasi Kasar							
	a. APK SD	111	113.01	114,45	115,9	117.35	118.79	119
	b. APK SMP	79.73%	83	84	85	86	88	88,76
c	Angka Partisipasi Murni							
	a. APM SD /MI/ paket A	98.30%	99	99.5	100	100	100	100
	b. APM SMP SMP/MTS/Paket B	59.19%	66	70	75	80	85	86
d	Angka Putus Sekolah							
	a. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,21%	0,20%	0,19%	0,18%	0,17%	0,16%	0,15%
	b. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,36%	0,35%	0,34%	0,33%	0,32%	0,31%	0,30%
e	Angka Kelulusan							
	a. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100	100	100
	b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	98.41	100	100	100	100	100	100
f	Angka Melanjutkan							
	a. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	94.21	96.00	98	100	100	100	100



No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Awal (2016)	Capaian Kinerja Program Dan Kinerja Pendanaan					Konidi Akhir 2022
			2017	2018	2019	2020	2021	Target
			Target	Target	Target	Target	Target	
	b. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	98.11	98	100	100	100	100	100
g	Bangunan Sekolah SD kondisi bangunan Baik	92.64%	94%	95%	96%	97%	98%	99%
h	Bangunan Sekolah SMP kondisi Bangunan Baik	94.62%	95%	96%	97%	98%	99%	100%
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	59,91%	60%	63	64	65	66	67
i	Guru Yang memenuhi kulaifikasi S1	74,19%	79%	84%	89%	94%	100%	100%
j	Rasio Lulusan pendidikan tinggi	40%	42	44	46	48	50	52
2	<b>Kesehatan</b>							
a	Jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%
b	Cakupan Desa UCI	51%	1	60	63	67	72	76
c	Menurunnya kasus penyakit menular	50%	60	70	80	85	90	95
d	Angka kematian Bayi	15 kasus	15	13	11	9	7	3
e	Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan	45%	5	4	3	2	1	-
f	Cakupan penemuan dan penanganan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	85,60%	80%	70%	60%	50%	40%	30%
g	Persentase Ketersediaan obat dengan kebutuhan obat	50%	60	70	80	90	100	100
h	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Awal (2016)	Capaian Kinerja Program Dan Kinerja Pendanaan					Konidi Akhir 2022
			2017	2018	2019	2020	2021	Target
			Target	Target	Target	Target	Target	
i	Rasio dokter per satuan penduduk	0,03	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
j	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,09	0.2	0.4	0.6	0.8	0.9	1
k	rasio puskesmas	1,8%	2,0%	3,0%	4,0%	5,0%	6,0%	7,0%
l	Cakupan pembantu puskesmas	15,16	20%	25%	30%	35%	40%	45%
m	Cakupan penemuan dan penanganan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	86%	87%	88%	89%	90%	95%	100%
n	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1,30%	1,5%	1,6%	1,7%	1,8%	1,9%	2%
3	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>							
a	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	5,97%	7	9	11	13	15	17.
b	Rasio Jaringan Irigasi	11,61 %	13	15	17	19	21	23
c	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik							
d	Persentase pembangunan turap di wilayah rawan abrasi dan longsong	2,3	3,3	4,3	5,3	6,3	7,3	8,3
e	Persentase sungai yang dinormalisasi	0	10	20	30	40	50	60
f	Ketaatan terhadap RTRW	10%	15	20	25	30	35	40
g	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	1%	2	3	4	5	6	7
h	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	50,5%	50	47	45	43	42	41



No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Awal (2016)	Capaian Kinerja Program Dan Kinerja Pendanaan					Konidi Akhir 2022
			2017	2018	2019	2020	2021	Target
			Target	Target	Target	Target	Target	
4	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>							
a	Rasio rumah layak huni	65%	66	70	75	80	85	90
b	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	14%	13	12,5	12	11,5	10	9
c	Persentase rumah tinggal berakses air minum	30%	33	38	40	42	43	47
d	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	50%	52	55	57	59	60	62
5	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>							
a	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	80	80	85	87	90	95	100
6	<b>Sosial</b>							
a	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	18,91 %	20	25	30	35	40	45
b	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80%	85	90	95	100	100	100
c	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	60 %	60	65	68	70	75	77
d	Desa Siaga bencana	0	2	4	6	8	10	12



No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Awal (2016)	Capaian Kinerja Program Dan Kinerja Pendanaan					Konidi Akhir 2022
			2017	2018	2019	2020	2021	Target
			Target	Target	Target	Target	Target	
	<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>							
1	<b>Tenaga Kerja</b>							
a	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	0	5	12	14	16	18	2.5
b	Rasio lulusan S1/S2/S3	1,9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	
2	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>							
a	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	45	50	52	55	57	58	60
3	<b>Pangan</b>							
a	Rasio cadangan pangan utama	0,70%	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95	1
4	<b>Pertanahan</b>							
a	Persentase luas lahan bersertifikat	50%	55	60	65	70	75	75
b	Penyelesaian kasus tanah negara	2%	5	7	9	11	15	20
5	<b>Lingkungan Hidup</b>							
a	Persentase jumlah sampah yang tertangani	5,9%	8	10	15	17	20	22
6	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>							



No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Awal (2016)	Capaian Kinerja Program Dan Kinerja Pendanaan					Konidi Akhir 2022
			2017	2018	2019	2020	2021	Target
			Target	Target	Target	Target	Target	
a	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	45,63	50	60	70	80	90	100
b	Rasio bayi berakte kelahiran	53,73	55	65	75	85	95	100
c	Rasio pasangan berakte menikah	24,42	40	55	70	80	90	100
<b>7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>								
a	Persentase Posyandu aktif	40%	50	60	70	80	90	100
b	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	345	355	365	375	385	395	400
c	Desa Sangat Tertinggal	12 desa	10	7	5	3	0	0
d	Desa tertinggal	20 desa	18	16	14	13	12	12
e	Desa Berkembang	7 desa	10	13	15	17	20	20
f	Desa Maju	4 desa	5	6	7	7	7	7
g	Desa Mandiri	0 desa	0	1	2	3	4	4
<b>8 Pengendalian Penduduk dan KB</b>								
	Rasio Akseptor KB	53,23	60%	70%	75%	80%	85%	90%
<b>9 Perhubungan</b>								
a	Jumlah sarana dan prasarana perhubungan							
	- Pelabuhan	9 buah	9	9	10	11	12	12
	- Udara	1 buah	1	1	2	2	2	2
	- Terminal Bis	0	0	0	1	1	2	3
	- Jumlah kapal	0	0	1	0	1	0	2

No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Awal (2016)	Capaian Kinerja Program Dan Kinerja Pendanaan					Konidi Akhir 2022
			2017	2018	2019	2020	2021	Target
			Target	Target	Target	Target	Target	
b	Jumlah orang/ melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	101.235 kali	108.235	115.235	122.235	129.235	136.235	143.235
c	Jumlah barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	87.456 ton	89.156	90.856	92.556	94.256	95.956	97.656
d	Terjaga dan terkenalnya keamanan lalu lintas	99%	100	100	100	100	100	100
10	<b>Komunikasi dan informatika</b>							
a	Cakupan layanan telekomunikasi	56%	57	59	61	63	65	67
11	<b>Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>							
a	Persentase koperasi aktif	35,88%	35,88%	36	37	38	40	50
b	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	99,9%	99,9%	99	98,5	98	97,5	97
12	<b>Penanaman Modal</b>							
a	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi Penanaman Modal Daerah (milyar rupiah)	66160 juta rupiah	66.7	67.4	68	68.7	69.4	71
13	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>							
a	Persentase organisasi pemuda yang aktif	5 organisasi	6	7	8	9	10	11
b	Persentase wirausaha muda	1%	1	2	5	7	10	15
c	Jumlah atlet berprestasi	22 atlet	25	28	31	34	37	41
d	Jumlah prestasi olahraga	8 olahraga	9	11	13	15	17	19



No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Awal (2016)	Capaian Kinerja Program Dan Kinerja Pendanaan					Konidi Akhir 2022
			2017	2018	2019	2020	2021	Target
			Target	Target	Target	Target	Target	
14	<b>Kebudayaan</b>							
a	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	2 kali	2	3	4	5	6	7
b	Penetapan masyarakat hukum adat	0	0	2	3	4	5	5
15	<b>Perpustakaan</b>							
a	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1450 orang	1500	1600	1700	1800	1900	2000
16	<b>Kearsipan</b>							
a	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	0	1	3	3	6	6	28
II	<b>URUSAN PILIHAN</b>							
1	<b>Pariwisata</b>							
a	Jumlah wisatawan mancanegara	5480 orang	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60
b	jumlah wisatawan domestik	685.000 orang	700.000	800.000	900.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
c	PAD sektor pariwisata	4 M	5	6	7	8	9	11
d	Lama kunjungan wisata	2 hari	3	4	5	6	7	7
e	Kawasan Agroindustri	0	0	1	1	2	3	3
2	<b>Pertanian</b>							
a	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	4973 ton	5000	5450	5950	6350	6500	7000
b	Produksi komoditas unggulan							
	kelapa	6494.5 ton	16	17	18	19	20	21





No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Awal (2016)	Capaian Kinerja Program Dan Kinerja Pendanaan					Konidi Akhir 2022
			2017	2018	2019	2020	2021	Target
			Target	Target	Target	Target	Target	
	pisang	25693 ton	175	225	375	525	675	825
	cengkeh	97.78 ton	597	697	797	897	997	1.097
	pala	111.1 ton	600	1.1	1.6	2.1	2.6	3.1
	cabe	34.2 ton	100	170	240	310	380	450
	kangkung	39.5 ton	139	239	339	439	539	639
	bayam	4.2 ton	8	12	16	10	24	28
	kacang panjang	20.7 ton	40	60	80	100	120	140
	terong	12 ton	32	52	72	92	112	132
	durian	137435 ton	138	13.9	14	14.1	14.2	14.3
	ubi	860 ton	960	1.06	1.2	1.26	1.32	1.38
	keladi	1778	1.8	1.85	1.9	1.95	2	2.1
	lada	0	0	600	900	1.2	1.5	1.8
	Cakupan bina kelompok petani	0	0	43	215	258	300	341
<b>3</b>	<b>Perdagangan</b>							
a	Cakupan pasar per satuan wilayah	50%	60	70	80	90	90	100
<b>4</b>	<b>Perindustrian</b>							
a	Cakupan bina kelompok pengrajin	0	0	5	10	15	20	25
b	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	0	5	12	14	16	18	20
c	Persentase Rumah tangga menggunakan tenaga listrik	30%	33	36	39	42	45	48
<b>5</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>							



No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Awal (2016)	Capaian Kinerja Program Dan Kinerja Pendanaan					Konidi Akhir 2022
			2017	2018	2019	2020	2021	Target
			Target	Target	Target	Target	Target	
a	Produksi perikanan tangkap	6920 ton	7500	8000	8500	9000	9500	10
b	Cakupan bina kelompok ne layan	166	190	210	220	260	280	300
c	Konsumsi ikan	37.37 kg	38	39	40	42	43	44
d	Produksi perikanan budidaya	388 ton	420	455	534	629	742	885
<b>3</b>	<b>FUNGSI LAINNYA</b>							
<b>1</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>							
a	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	10%	15	20	25	30	35	40
b	Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	70%	70	80	100	100	100	100
c	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	70%	70	80	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>							
a	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	0%	0	1	1	2	2	5
<b>3</b>	<b>Keuangan</b>							
a	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
b	% PAD terhadap total pendapatan	4,61%	5	7	9	11	13	15
<b>4</b>	<b>Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan</b>							
a	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	45%	50%	55	60	65	70	75



No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Awal (2016)	Capaian Kinerja Program Dan Kinerja Pendanaan					Konidi Akhir 2022
			2017	2018	2019	2020	2021	Target
			Target	Target	Target	Target	Target	
5	<b>Pengawasan</b>							
a	Persentase tindak lanjut temuan	20%	40	60	70	80	90	100
b	Persentase pelanggaran pegawai	20%	40	60	70	80	90	100
c	Jumlah temuan BPK menurun meningkat	50%	40	35	30	25	15	10
6	<b>Sekda</b>							
a	Tersedianya Kebijakan pembangunan daerah	40%	45	50	52	55	60	70
7	<b>Sekwan</b>							
a	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	0%	0	20	30	40	45	50
b	Jumlah produk hukum inisiatif DPRD	10%	10	15	17	20	22	25
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>								
1	Produktivitas total daerah	58,07	60	62	63	64	65	66
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	90	91	92	93	94	95	96
3	Angka kriminalitas (%)	3,54 %	3,4	3,3	3,2	3,1	3	2,9
4	Rasio ketergantungan (%)	64.32%	63	62	61	59	58	57



## **BAB IX**

### **PENUTUP**

#### **9.1 Pedoman Transisi**

Pedoman transisi dalam penyusunan RPJMD ini adalah :

1. RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan kebijakan umum serta prioritas program dalam APBD masa transisi yaitu tahun pertama pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
2. RPJMD sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan untuk menyelesaikan permasalahan yang belum dapat terselesaikan pada RPJMD sebelumnya dan masalah yang dihadapi pada periode RPJMD masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
3. RKPD masa transisi pada tahun pertama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

#### **9.2 Kaidah Pelaksanaan**

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa bakti 2017-2022 dan berpedoman pada RPJP Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2005-2025. RPJMD juga sebagai pedoman bagi SKPD untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD tahun 2017-2022, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RPJMD Tahun 2017-2022 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Kepulauan Mentawai dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Kepulauan Mentawai dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kepala Bappeda) Kabupaten Kepulauan Mentawai;
3. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2017-2022 dengan sebaiknya;



4. Setiap SKPD, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Kecamatan dan Perangkat Daerah lainnya, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022;
5. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2017-2022 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022;
6. Penyusunan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang Kabupaten;
7. RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
8. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
9. Renja-SKPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
10. Dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2017-2022, setiap SKPD perlu mengupayakan pengaturan peran stakeholders dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Tahun 2017-2022 ini, dan melakukan sosialisasi baik kepada seluruh komponen aparat yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, instansi terkait maupun masyarakat luas;
11. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2017-2022, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2017-2022, sebagai berikut:
  - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD;



- b. Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
  - c. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya;
  - d. Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
  - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
12. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan pembiayaan dan lain-lain dalam RPJMD, maka penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.
13. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

**BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI**

  
**YUDAS SABAGGALET**